



SALINAN

RH

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 227/PL.01.1-Kpt/03/KPU/XII/2017

TENTANG

**KEDUDUKAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014
PADA DAERAH OTONOM BARU DALAM PEMENUHAN PERSYARATAN PARTAI
POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa pembentukan provinsi pemekaran mempengaruhi kesetaraan kepemilikan kepengurusan partai politik di seluruh provinsi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 173 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

b. bahwa pembentukan provinsi pemekaran mempengaruhi kesetaraan 75% (tujuh puluh lima persen) kepemilikan kepengurusan partai politik di kabupaten/kota pada provinsi pemekaran dan provinsi induk sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 173 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

c. bahwa pembentukan kabupaten/kota pemekaran pada suatu provinsi mempengaruhi kesetaraan 75% (tujuh puluh lima persen) kepemilikan kepengurusan partai politik di kabupaten/kota pada provinsi yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 173 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

d. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a, huruf b huruf c, dan huruf d serta untuk menegaskan pada tataran pelaksanaan ketentuan Pasal 7 dan Bab V Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan

Perwakilan . . .

Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia tentang Kedudukan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 pada Daerah Otonom Baru dalam Pemenuhan Persyaratan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5364);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Manokwari Selatan di Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5365);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pegunungan Arfak di Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2012 Nomor 233, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5366);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5395);
 8. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Malaka di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5396);
 9. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5397);
 10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Banggai Laut di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5398);
 11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Taliabu di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5399);
 12. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5400);
 13. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5401);

14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5414);
15. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5415);
16. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Musirawas Utara di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5429);
17. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Muna Barat di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5561);
18. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Tengah di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5562);
19. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5563);
20. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1045);

22. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225);
23. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1296);

Memperhatikan:

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 156/Kpts/KPU/Tahun 2012 tentang Data Wilayah Administrasi Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Jumlah Penduduk Provinsi dan Kabupaten/Kota Untuk Keperluan Persyaratan Partai Politik Menjadi Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD Tahun 2014;
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 165/HK.03.1-Kpt/03/KPU/IX/2017 tentang Jumlah Kabupaten/Kota dan Kecamatan serta Jumlah Penduduk Setiap Kabupaten/Kota di Setiap Provinsi;
3. Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia 470/9603/Dukcapil, tanggal 21 Agustus 2017, perihal Penyampaian Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2) Semester I Tahun 2017 dan Data Administrasi Wilayah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA TENTANG KEDUDUKAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014 PADA DAERAH OTONOM BARU DALAM PEMENUHAN PERSYARATAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 yang dinyatakan masih memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat kesetaraan 75% (tujuh puluh lima persen) jumlah kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Utara, masing-masing beserta nama kabupaten/kota pada provinsi yang bersangkutan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 yang dinyatakan masih memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat kesetaraan 75% (tujuh puluh lima persen) jumlah kabupaten/kota di Provinsi Lampung, masing-masing beserta nama kabupaten/kota pada provinsi yang bersangkutan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 yang dinyatakan masih memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat kesetaraan 75% (tujuh puluh lima persen) jumlah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan, masing-masing beserta nama kabupaten/kota pada provinsi yang bersangkutan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 yang dinyatakan masih memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat kesetaraan 75% (tujuh puluh lima persen) jumlah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat, masing-masing beserta nama kabupaten/kota pada provinsi yang bersangkutan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 yang dinyatakan masih memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat kesetaraan 75% (tujuh puluh lima persen) jumlah kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur, masing-masing beserta nama kabupaten/kota pada provinsi yang bersangkutan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEENAM : Partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 yang dinyatakan masih memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat kesetaraan 75% (tujuh puluh lima persen) jumlah kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Barat, masing-masing beserta nama kabupaten/kota pada provinsi yang bersangkutan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KETUJUH : Partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 yang dinyatakan masih memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat kesetaraan 75% (tujuh puluh lima persen) jumlah kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah, masing-masing beserta nama kabupaten/kota pada provinsi yang bersangkutan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDELAPAN : Partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 yang dinyatakan masih memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat kesetaraan 75% (tujuh puluh lima persen) jumlah kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tenggara, masing-masing beserta nama kabupaten/kota pada provinsi yang bersangkutan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KESEMBILAN : Partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 yang dinyatakan masih memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat kesetaraan 75% (tujuh puluh lima persen) jumlah kabupaten/kota di Provinsi Maluku Utara, masing-masing beserta nama kabupaten/kota pada provinsi yang bersangkutan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KESEPULUH : Partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 yang dinyatakan masih memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat kesetaraan 75% (tujuh puluh lima persen) jumlah kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat, masing-masing beserta nama kabupaten/kota pada provinsi yang bersangkutan sebagaimana tercantum dalam Lampiran X Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KESEBELAS : Partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 yang dinyatakan tidak memenuhi syarat kesetaraan 75% (tujuh puluh lima persen) jumlah kabupaten/kota di Provinsi yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA sampai dengan Diktum KESEPULUH, wajib menambah sejumlah kepengurusan tingkat kabupaten/

kota dan didaftarkan kepada KPU sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 173 dan Pasal 177 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum serta menyerahkan dokumen pemenuhan persyaratan kepada KPU Kabupaten/Kota.

KEDUABELAS : Dokumen pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESEBELAS, dilakukan penelitian administrasi oleh KPU dan KPU Kabupaten/Kota serta verifikasi faktual oleh KPU Kabupaten/Kota.

KETIGABELAS : Kepengurusan Partai Politik peserta Pemilu Tahun 2014 di Provinsi Kalimantan Utara dilakukan verifikasi faktual oleh KPU Provinsi.

KEEMPATBELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Desember 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

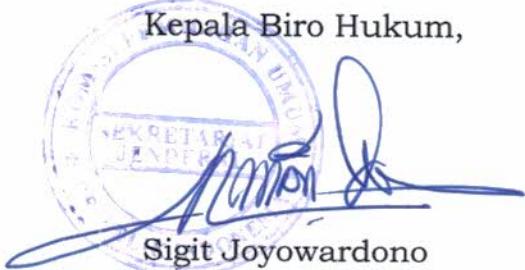
ttd.

ARIEF BUDIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Kepala Biro Hukum,

Sigit Joyowardono



LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR : 227/PL.01.1-Kpt/03/KPU/XII/2017

TENTANG KEDUDUKAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014 PADA DAERAH OTONOM BARU DALAM PEMENUHAN PERSYARATAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

PEMENUHAN PERSYARATAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TERAKHIR PADA DAERAH OTONOM BARU MENJADI PESERTA PEMILU TAHUN 2019
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PARTAI NASIONAL DEMOKRAT (NasDem)

NO.	PEMILU 2014					PEMILU 2019				KETERANGAN
	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	JML KAB/KOTA YANG DIAJUKAN	NAMA KAB/KOTA	STATUS	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	NAMA KAB/KOTA	STATUS	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	14	11	14	1 Kota Samarinda 2 Kota Balikpapan 3 Penajam Pasir Utara 4 Paser 5 Kutai Kartanegara 6 Kutai Barat 7 Bontang 8 Kutai Timur 9 Berau 10 Bulungan 11 Tana Tidung 12 Nunukan 13 Malinau 14 Kota Tarakan	MS	10	8	1 Kota Samarinda 2 Kota Balikpapan 3 Penajam Pasir Utara 4 Paser 5 Kutai Kartanegara 6 Kutai Barat 7 Bontang 8 Kutai Timur 9 Berau 10 Makaham Ulu	MS	1 Tidak dilakukan verifikasi faktual di Provinsi Kalimantan Timur karena telah memenuhi syarat sebaran kabupaten/kota yaitu 9 kabupaten/kota dari 8 batas minimum syarat sebaran setelah terbentuknya Provinsi Kalimantan Utara. 2 4 Kabupaten dan 1 Kota semula menjadi wilayah Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan UU 20 Nomor Tahun 2012 menjadi wilayah Provinsi Kalimantan Utara yaitu : 1. Bulungan 2. Tana Tidung 3. Nunukan 4. Malinau 5. Kota Tarakan 3 Terdapat satu kabupaten pemekaran dari Kabupaten Kutai Barat di Provinsi Kalimantan Timur yaitu Kabupaten Mahakam Ulu berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 2013. 4 Kepengurusan di 4 Kabupaten dan 1 Kota yang diajukan tersebut yang semula masuk wilayah Provinsi Kalimantan Timur telah berpindah menjadi wilayah Provinsi Kalimantan Utara. 5 Kepengurusan di 4 Kabupaten dan 1 Kota tersebut tetap dinyatakan memenuhi syarat administrasi dan faktual berdasarkan hasil penelitian administrasi dan verifikasi faktual pada masa pendaftaran, penelitian administrasi dan verifikasi faktual untuk menjadi peserta Pemilu Tahun 2014 di Provinsi Kalimantan Utara.

**PEMENUHAN PERSYARATAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TERAKHIR PADA DAERAH OTONOM BARU MENJADI PESERTA PEMILU TAHUN 2019
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PARTAI DEMOKRAT**

NO.	PEMILU 2014					PEMILU 2019					KETERANGAN
	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	JML KAB/KOTA YANG DIAJUKAN	NAMA KAB/KOTA	STATUS	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	NAMA KAB/KOTA	STATUS	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	14	11	14	1 Kota Samarinda 2 Kota Balikpapan 3 Penajam Pasir Utara 4 Paser 5 Kutai Kartanegara 6 Kutai Barat 7 Bontang 8 Kutai Timur 9 Berau 10 Bulungan 11 Tana Tidung 12 Nunukan 13 Malinau 14 Kota Tarakan	MS	10	8	1 Kota Samarinda 2 Kota Balikpapan 3 Penajam Pasir Utara 4 Paser 5 Kutai Kartanegara 6 Kutai Barat 7 Bontang 8 Kutai Timur 9 Berau 10 Makaham Ulu	MS	1	Tidak dilakukan verifikasi faktual di Provinsi Kalimantan Timur karena telah memenuhi syarat sebaran kabupaten/kota yaitu 9 kabupaten/kota dari 8 batas minimum syarat sebaran setelah terbentuknya Provinsi Kalimantan Utara. 2 4 Kabupaten dan 1 Kota semula menjadi wilayah Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan UU 20 Nomor Tahun 2012 menjadi wilayah Provinsi Kalimantan Utara yaitu : 1. Bulungan 2. Tana Tidung 3. Nunukan 4. Malinau 5. Kota Tarakan 3 Terdapat satu kabupaten pemekaran dari Kabupaten Kutai Barat di Provinsi Kalimantan Timur yaitu Kabupaten Mahakam Ulu berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 2013. 4 Kepengurusan di 4 Kabupaten dan 1 Kota yang diajukan tersebut yang semula masuk wilayah Provinsi Kalimantan Timur telah berpindah menjadi wilayah Provinsi Kalimantan Utara. 5 Kepengurusan di 4 Kabupaten dan 1 Kota tersebut tetap dinyatakan memenuhi syarat administrasi dan faktual berdasarkan hasil penelitian administrasi dan verifikasi faktual pada masa pendaftaran, penelitian administrasi dan verifikasi faktual untuk menjadi peserta Pemilu Tahun 2014 di Provinsi Kalimantan Utara.

**PEMENUHAN PERSYARATAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TERAKHIR PADA DAERAH OTONOM BARU MENJADI PESERTA PEMILU TAHUN 2019
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS)**

**PEMENUHAN PERSYARATAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TERAKHIR PADA DAERAH OTONOM BARU MENJADI PESERTA PEMILU TAHUN 2019
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN)**

NO.	PEMILU 2014					PEMILU 2019					KETERANGAN
	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	JML KAB/KOTA YANG DIAJUKAN	NAMA KAB/KOTA	STATUS	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	NAMA KAB/KOTA	STATUS	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	14	11	14	1 Kota Samarinda 2 Kota Balikpapan 3 Penajam Pasir Utara 4 Paser 5 Kutai Kartanegara 6 Kutai Barat 7 Bontang 8 Kutai Timur 9 Berau # Bulungan # Tana Tidung # Nunukan # Malinau # Kota Tarakan	MS	10	8	1 Kota Samarinda 2 Kota Balikpapan 3 Penajam Pasir Utara 4 Paser 5 Kutai Kartanegara 6 Kutai Barat 7 Bontang 8 Kutai Timur 9 Berau 10 Makaham Ulu	MS	1 Tidak dilakukan verifikasi faktual di Provinsi Kalimantan Timur karena telah memenuhi syarat sebaran kabupaten/kota yaitu 9 kabupaten/kota dari 8 batas minimum syarat sebaran setelah terbentuknya Provinsi Kalimantan Utara. 2 4 Kabupaten dan 1 Kota semula menjadi wilayah Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan UU 20 Nomor Tahun 2012 menjadi wilayah Provinsi Kalimantan Utara yaitu : 1. Bulungan 2. Tana Tidung 3. Nunukan 4. Malinau 5. Kota Tarakan 3 Terdapat satu kabupaten pemekaran dari Kabupaten Kutai Barat di Provinsi Kalimantan Timur yaitu Kabupaten Mahakam Ulu berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 2013. 4 Kepengurusan di 4 Kabupaten dan 1 Kota yang diajukan tersebut yang semula masuk wilayah Provinsi Kalimantan Timur telah berpindah menjadi wilayah Provinsi Kalimantan Utara. 5 Kepengurusan di 4 Kabupaten dan 1 Kota tersebut tetap dinyatakan memenuhi syarat administrasi dan faktual berdasarkan hasil penelitian administrasi dan verifikasi faktual pada masa pendaftaran, penelitian administrasi dan verifikasi faktual untuk menjadi peserta Pemilu Tahun 2014 di Provinsi Kalimantan Utara.	

PEMENUHAN PERSYARATAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TERAKHIR PADA DAERAH OTONOM BARU MENJADI PESERTA PEMILU TAHUN 2019
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP)

NO.	PEMILU 2014					PEMILU 2019				KETERANGAN
	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	JML KAB/KOTA YANG DIAJUKAN	NAMA KAB/KOTA	STATUS	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	NAMA KAB/KOTA	STATUS	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	14	11	14	1 Kota Samarinda 2 Kota Balikpapan 3 Penajam Pasir Utara 4 Paser 5 Kutai Kertanegara 6 Kutai Barat 7 Bontang 8 Kutai Timur 9 Berau 10 Bulungan 11 Tana Tidung 12 Nunukan 13 Malinau 14 Kota Tarakan	MS	10	8	1 Kota Samarinda 2 Kota Balikpapan 3 Penajam Pasir Utara 4 Paser 5 Kutai Kertanegara 6 Kutai Barat 7 Bontang 8 Kutai Timur 9 Berau 10 Makaham Ulu	MS	1 Tidak dilakukan verifikasi faktual di Provinsi Kalimantan Timur karena telah memenuhi syarat sebaran kabupaten/kota yaitu 9 kabupaten/kota dari 8 batas minimum syarat sebaran setelah terbentuknya Provinsi Kalimantan Utara. 2 4 Kabupaten dan 1 Kota semula menjadi wilayah Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan UU 20 Nomor Tahun 2012 menjadi wilayah Provinsi Kalimantan Utara yaitu : 1. Bulungan 2. Tana Tidung 3. Nunukan 4. Malinau 5. Kota Tarakan 3 Terdapat satu kabupaten pemekaran dari Kabupaten Kutai Barat di Provinsi Kalimantan Timur yaitu Kabupaten Mahakam Ulu berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 2013. 4 Kepengurusan di 4 Kabupaten dan 1 Kota yang diajukan tersebut yang semula masuk wilayah Provinsi Kalimantan Timur telah berpindah menjadi wilayah Provinsi Kalimantan Utara. 5 Kepengurusan di 4 Kabupaten dan 1 Kota tersebut tetap dinyatakan memenuhi syarat administrasi dan faktual berdasarkan hasil penelitian administrasi dan verifikasi faktual pada masa pendaftaran, penelitian administrasi dan verifikasi faktual untuk menjadi peserta Pemilu Tahun 2014 di Provinsi Kalimantan Utara.

**PEMENUHAN PERSYARATAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TERAKHIR PADA DAERAH OTONOM BARU MENJADI PESERTA PEMILU TAHUN 2019
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)**

NO.	PEMILU 2014					PEMILU 2019					KETERANGAN
	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	JML KAB/KOTA YANG DIAJUKAN	NAMA KAB/KOTA	STATUS	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	NAMA KAB/KOTA	STATUS	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	14	11	14	1 Kota Samarinda 2 Kota Balikpapan 3 Penajam Pasir Utara 4 Paser 5 Kutai Kertanegara 6 Kutai Barat 7 Bontang 8 Kutai Timur 9 Berau 10 Bulungan 11 Tana Tidung 12 Nunukan 13 Malinau 14 Kota Tarakan	MS	10	8	1 Kota Samarinda 2 Kota Balikpapan 3 Penajam Pasir Utara 4 Paser 5 Kutai Kertanegara 6 Kutai Barat 7 Bontang 8 Kutai Timur 9 Berau 10 Makaham Ulu	MS	11	1 Tidak dilakukan verifikasi faktual di Provinsi Kalimantan Timur karena telah memenuhi syarat sebaran kabupaten/kota yaitu 9 kabupaten/kota dari 8 batas minimum syarat sebaran setelah terbentuknya Provinsi Kalimantan Utara. 2 4 Kabupaten dan 1 Kota semula menjadi wilayah Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan UU 20 Nomor Tahun 2012 menjadi wilayah Provinsi Kalimantan Utara yaitu : 1. Bulungan 2. Tana Tidung 3. Nunukan 4. Malinau 5. Kota Tarakan 3 Terdapat satu kabupaten pemekaran dari Kabupaten Kutai Barat di Provinsi Kalimantan Timur yaitu Kabupaten Mahakam Ulu berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 2013. 4 Kepengurusan di 4 Kabupaten dan 1 Kota yang diajukan tersebut yang semula masuk wilayah Provinsi Kalimantan Timur telah berpindah menjadi wilayah Provinsi Kalimantan Utara. 5 Kepengurusan di 4 Kabupaten dan 1 Kota tersebut tetap dinyatakan memenuhi syarat administrasi dan faktual berdasarkan hasil penelitian administrasi dan verifikasi faktual pada masa pendaftaran, penelitian administrasi dan verifikasi faktual untuk menjadi peserta Pemilu Tahun 2014 di Provinsi Kalimantan Utara.

**PEMENUHAN PERSYARATAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TERAKHIR PADA DAERAH OTONOM BARU MENJADI PESERTA PEMILU TAHUN 2019
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDIP)**

NO.	PEMILU 2014					PEMILU 2019					KETERANGAN
	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	JML KAB/KOTA YANG DIAJUKAN	NAMA KAB/KOTA	STATUS	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	NAMA KAB/KOTA	STATUS	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	14	11	14	1 Kota Samarinda 2 Kota Balikpapan 3 Penajam Pasir Utara 4 Paser 5 Kutai Kertanegara 6 Kutai Barat 7 Bontang 8 Kutai Timur 9 Berau 10 Bulungan 11 Tana Tidung 12 Nunukan 13 Malinau 14 Kota Tarakan	MS	10	8	1 Kota Samarinda 2 Kota Balikpapan 3 Penajam Pasir Utara 4 Paser 5 Kutai Kertanegara 6 Kutai Barat 7 Bontang 8 Kutai Timur 9 Berau 10 Makaham Ulu	MS	1 Tidak dilakukan verifikasi faktual di Provinsi Kalimantan Timur karena telah memenuhi syarat sebaran kabupaten/kota yaitu 9 kabupaten/kota dan 8 batas minimum syarat sebaran setelah terbentuknya Provinsi Kalimantan Utara. 2 4 Kabupaten dan 1 Kota semula menjadi wilayah Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan UU Nomor Tahun 2012 menjadi wilayah Provinsi Kalimantan Utara yaitu : 1. Bulungan 2. Tana Tidung 3. Nunukan 4. Malinau 5. Kota Tarakan 3 Terdapat satu kabupaten pemekaran dari Kabupaten Kutai Barat di Provinsi Kalimantan Timur yaitu Kabupaten Mahakam Ulu berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 2013. 4 Kepengurusan di 4 Kabupaten dan 1 Kota yang diajukan tersebut yang semula masuk wilayah Provinsi Kalimantan Timur telah berpindah menjadi wilayah Provinsi Kalimantan Utara. 5 Kepengurusan di 4 Kabupaten dan 1 Kota tersebut tetap dinyatakan memenuhi syarat administrasi dan faktual berdasarkan hasil penelitian administrasi dan verifikasi faktual pada masa pendaftaran, penelitian administrasi dan verifikasi faktual untuk menjadi peserta Pemilu Tahun 2014 di Provinsi Kalimantan Utara.	

**PEMENUHAN PERSYARATAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TERAKHIR PADA DAERAH OTONOM BARU MENJADI PESERTA PEMILU TAHUN 2019
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PARTAI HATI NURANI RAKYAT (HANURA)**

NO.	PEMILU 2014					PEMILU 2019					KETERANGAN
	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	JML KAB/KOTA YANG DIAJUKAN	NAMA KAB/KOTA	STATUS	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	NAMA KAB/KOTA	STATUS		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	14	11	14	1 Kota Samarinda 2 Kota Balikpapan 3 Penajam Pasir Utara 4 Paser 5 Kutai Kertanegara 6 Kutai Barat 7 Bontang 8 Kutai Timur 9 Berau 10 Bulungan 11 Tana Tidung 12 Nunukan 13 Malinau 14 Kota Tarakan	MS	10	8	1 Kota Samarinda 2 Kota Balikpapan 3 Penajam Pasir Utara 4 Paser 5 Kutai Kertanegara 6 Kutai Barat 7 Bontang 8 Kutai Timur 9 Berau 10 Makaham Ulu	MS	1 Tidak dilakukan verifikasi faktual di Provinsi Kalimantan Timur karena telah memenuhi syarat sebaran kabupaten/kota yaitu 9 kabupaten/kota dari 8 batas minimum syarat sebaran setelah terbentuknya Provinsi Kalimantan Utara. 2 4 Kabupaten dan 1 Kota semula menjadi wilayah Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan UU 20 Nomor Tahun 2012 menjadi wilayah Provinsi Kalimantan Utara yaitu : 1. Bulungan 2. Tana Tidung 3. Nunukan 4. Malinau 5. Kota Tarakan 3 Terdapat satu kabupaten pemekaran dari Kabupaten Kutai Barat di Provinsi Kalimantan Timur yaitu Kabupaten Mahakam Ulu berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 2013. 4 Kepengurusan di 4 Kabupaten dan 1 Kota yang diajukan tersebut yang semula masuk wilayah Provinsi Kalimantan Timur telah berpindah menjadi wilayah Provinsi Kalimantan Utara. 5 Kepengurusan di 4 Kabupaten dan 1 Kota tersebut tetap dinyatakan memenuhi syarat administrasi dan faktual berdasarkan hasil penelitian administrasi dan verifikasi faktual pada masa pendaftaran, penelitian administrasi dan verifikasi faktual untuk menjadi peserta Pemilu Tahun 2014 di Provinsi Kalimantan Utara.	

**PEMENUHAN PERSYARATAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TERAKHIR PADA DAERAH OTONOM BARU MENJADI PESERTA PEMILU TAHUN 2019
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PARTAI GOLONGAN KARYA (GOLKAR)**

**PEMENUHAN PERSYARATAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TERAKHIR PADA DAERAH OTONOM BARU MENJADI PESERTA PEMILU TAHUN 2019
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA (PKPI)**

**PEMENUHAN PERSYARATAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TERAKHIR PADA DAERAH OTONOM BARU MENJADI PESERTA PEMILU TAHUN 2019
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB)**

NO.	PEMILU 2014					PEMILU 2019					KETERANGAN
	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	JML KAB/KOTA YANG DIAJUKAN	NAMA KAB/KOTA	STATUS	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	NAMA KAB/KOTA	STATUS	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	14	11	14	1 Kota Samarinda 2 Kota Balikpapan 3 Penajam Pasir Utara 4 Paser 5 Kutai Kertanegara 6 Kutai Barat 7 Bontang 8 Kutai Timur 9 Berau 10 Bulungan 11 Tana Tidung 12 Nunukan 13 Malinau 14 Kota Tarakan	MS	10	8	1 Kota Samarinda 2 Kota Balikpapan 3 Penajam Pasir Utara 4 Paser 5 Kutai Kertanegara 6 Kutai Barat 7 Bontang 8 Kutai Timur 9 Berau 10 Makaham Ulu	MS	MS	1 Tidak dilakukan verifikasi faktual di Provinsi Kalimantan Timur karena telah memenuhi syarat sebaran kabupaten/kota yaitu 9 kabupaten/kota dari 8 batas minimum syarat sebaran setelah terbentuknya Provinsi Kalimantan Utara. 2 4 Kabupaten dan 1 Kota semula menjadi wilayah Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan UU 20 Nomor Tahun 2012 menjadi wilayah Provinsi Kalimantan Utara yaitu : 1. Bulungan 2. Tana Tidung 3. Nunukan 4. Malinau 5. Kota Tarakan 3 Terdapat satu kabupaten pemekaran dari Kabupaten Kutai Barat di Provinsi Kalimantan Timur yaitu Kabupaten Mahakam Ulu berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 2013. 4 Kepengurusan di 4 Kabupaten dan 1 Kota yang diajukan tersebut yang semula masuk wilayah Provinsi Kalimantan Timur telah berpindah menjadi wilayah Provinsi Kalimantan Utara. 5 Kepengurusan di 4 Kabupaten dan 1 Kota tersebut tetap dinyatakan memenuhi syarat administrasi dan faktual berdasarkan hasil penelitian administrasi dan verifikasi faktual pada masa pendaftaran, penelitian administrasi dan verifikasi faktual untuk menjadi peserta Pemilu Tahun 2014 di Provinsi Kalimantan Utara.

**PEMENUHAN PERSYARATAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TERAKHIR PADA DAERAH OTONOM BARU MENJADI PESERTA PEMILU TAHUN 2019
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PARTAI BULAN BINTANG (PBB)**

NO.	PEMILU 2014					PEMILU 2019					KETERANGAN
	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	JML KAB/KOTA YANG DIAJUKAN	NAMA KAB/KOTA	STATUS	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	NAMA KAB/KOTA	STATUS	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	14	11	14		MS	10	8		MS		1 Tidak dilakukan verifikasi faktual di Provinsi Kalimantan Timur karena telah memenuhi syarat sebaran kabupaten/kota yaitu 8 kabupaten/kota dari 8 batas minimum syarat sebaran setelah terbentuknya Provinsi Kalimantan Utara. 2 4 Kabupaten dan 1 Kota semula menjadi wilayah Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan UU 20 Nomor Tahun 2012 menjadi wilayah Provinsi Kalimantan Utara yaitu : 1. Bulungan 2. Tana Tidung 3. Nunukan 4. Malinau 5. Kota Tarakan 3 Terdapat satu kabupaten pemekaran dari Kabupaten Kutai Barat di Provinsi Kalimantan Timur yaitu Kabupaten Mahakam Ulu berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 2013. 4 Kepengurusan di 4 Kabupaten dan 1 Kota yang diajukan tersebut yang semula masuk wilayah Provinsi Kalimantan Timur telah berpindah menjadi wilayah Provinsi Kalimantan Utara. 5 Kepengurusan di 4 Kabupaten dan 1 Kota tersebut tetap dinyatakan memenuhi syarat administrasi dan faktual berdasarkan hasil penelitian administrasi dan verifikasi faktual pada masa pendaftaran, penelitian administrasi dan verifikasi faktual untuk menjadi peserta Pemilu Tahun 2014 di Provinsi Kalimantan Utara.
				1 Kota Samarinda 2 Kota Balikpapan 3 Penajam Pasir Utara 4 Paser 5 Kutai Kertanegara 6 Kutai Barat 7 Bontang 8 Kutai Timur 9 Berau # Bulungan # Tana Tidung # Nunukan # Malinau # Kota Tarakan	MS MS MS MS MS MS MS MS TMS MS MS MS MS MS MS MS MS		1 Kota Samarinda 2 Kota Balikpapan 3 Penajam Pasir Utara 4 Paser 5 Kutai Kertanegara 6 Kutai Barat 7 Bontang 8 Kutai Timur 9 Berau 10 Makaham Ulu	MS MS MS MS MS MS MS MS TMS MS MS MS MS MS MS MS			

PEMENUHAN PERSYARATAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TERAKHIR PADA DAERAH OTONOM BARU MENJADI PESERTA PEMILU TAHUN 2019
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
PARTAI NASIONAL DEMOKRAT (NasDem)

NO.	PEMILU 2014					PEMILU 2019					KETERANGAN
	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	JML KAB/KOTA YANG DIAJUKAN	NAMA KAB/KOTA	STATUS	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	NAMA KAB/KOTA	STATUS		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
						5	4	1 Bulungan 2 Tana Tidung 3 Nunukan 4 Malinau 5 Kota Tarakan	MS MS MS MS MS	1 Tidak dilakukan verifikasi faktual di 4 kabupaten dan 1 kota di wilayah Provinsi Kalimantan Utara karena telah memenuhi syarat sebaran 75 % jumlah kabupaten/kota yaitu 5 kabupaten/kota dari 4 batas minimum syarat sebaran kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara. 2 Kepengurusan di 4 Kabupaten dan 1 Kota tersebut dinyatakan tetap memenuhi syarat administrasi dan faktual berdasarkan hasil penelitian administrasi dan verifikasi faktual pada masa pendaftaran, penelitian administrasi dan verifikasi faktual untuk menjadi peserta Pemilu Tahun 2014.	

PEMENUHAN PERSYARATAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TERAKHIR PADA DAERAH OTONOM BARU MENJADI PESERTA PEMILU TAHUN 2019
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
PARTAI DEMOKRAT

NO.	PEMILU 2014					PEMILU 2019				KETERANGAN
	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	JML KAB/KOTA YANG DIAJUKAN	NAMA KAB/KOTA	STATUS	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	NAMA KAB/KOTA	STATUS	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						5	4	1 Bulungan 2 Tana Tidung 3 Nunukan 4 Malinau 5 Kota Tarakan	MS	1 Tidak dilakukan verifikasi faktual di 4 kabupaten dan 1 kota di wilayah Provinsi Kalimantan Utara karena telah memenuhi syarat sebaran 75 % jumlah kabupaten/kota yaitu 5 kabupaten/kota dari 4 batas minimum syarat sebaran kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara. 2 Kepengurusan di 4 Kabupaten dan 1 Kota tersebut dinyatakan tetap memenuhi syarat administrasi dan faktual berdasarkan hasil penelitian administrasi dan verifikasi faktual pada masa pendaftaran, penelitian administrasi dan verifikasi faktual untuk menjadi peserta Pemilu Tahun 2014.

PEMENUHAN PERSYARATAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TERAKHIR PADA DAERAH OTONOM BARU MENJADI PESERTA PEMILU TAHUN 2019
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS)

NO.	PEMILU 2014					PEMILU 2019					KETERANGAN
	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	JML KAB/KOTA YANG DIAJUKAN	NAMA KAB/KOTA	STATUS	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	NAMA KAB/KOTA	STATUS		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
						5	4	1 Bulungan 2 Tana Tidung 3 Nunukan 4 Malinau 5 Kota Tarakan	MS MS MS MS MS	1 Tidak dilakukan verifikasi faktual di 4 kabupaten dan 1 kota di wilayah Provinsi Kalimantan Utara karena telah memenuhi syarat sebaran 75 % jumlah kabupaten/kota yaitu 5 kabupaten/kota dari 4 batas minimum syarat sebaran kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara. 2 Kepengurusan di 4 Kabupaten dan 1 Kota tersebut dinyatakan tetap memenuhi syarat administrasi dan faktual berdasarkan hasil penelitian administrasi dan verifikasi faktual pada masa pendaftaran, penelitian administrasi dan verifikasi faktual untuk menjadi peserta Pemilu Tahun 2014.	

PEMENUHAN PERSYARATAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TERAKHIR PADA DAERAH OTONOM BARU MENJADI PESERTA PEMILU TAHUN 2019
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN)

NO.	PEMILU 2014					PEMILU 2019				KETERANGAN
	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	JML KAB/KOTA YANG DIAJUKAN	NAMA KAB/KOTA	STATUS	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	NAMA KAB/KOTA	STATUS	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						5	4	1 Bulungan 2 Tana Tidung 3 Nunukan 4 Malinau 5 Kota Tarakan	MS MS MS MS MS	1 Tidak dilakukan verifikasi faktual di 4 kabupaten dan 1 kota di wilayah Provinsi Kalimantan Utara karena telah memenuhi syarat sebaran 75 % jumlah kabupaten/kota yaitu 5 kabupaten/kota dari 4 batas minimum syarat sebaran kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara. 2 Kepengurusan di 4 Kabupaten dan 1 Kota tersebut dinyatakan tetap memenuhi syarat administrasi dan faktual berdasarkan hasil penelitian administrasi dan verifikasi faktual pada masa pendaftaran, penelitian administrasi dan verifikasi faktual untuk menjadi peserta Pemilu Tahun 2014.

PEMENUHAN PERSYARATAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TERAKHIR PADA DAERAH OTONOM BARU MENJADI PESERTA PEMILU TAHUN 2019
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
PARTAI PERSATUAN PEMBANGUAN (PPP)

NO.	PEMILU 2014					PEMILU 2019					KETERANGAN
	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	JML KAB/KOTA YANG DIAJUKAN	NAMA KAB/KOTA	STATUS	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	NAMA KAB/KOTA	STATUS		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
						5	4	1 Bulungan 2 Tana Tidung 3 Nunukan 4 Malinau 5 Kota Tarakan	MS MS MS MS MS	1 Tidak dilakukan verifikasi faktual di 4 kabupaten dan 1 kota di wilayah Provinsi Kalimantan Utara karena telah memenuhi syarat sebaran 75 % jumlah kabupaten/kota yaitu 5 kabupaten/kota dari 4 batas minimum syarat sebaran kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara. 2 Kepengurusan di 4 Kabupaten dan 1 Kota tersebut dinyatakan tetap memenuhi syarat administrasi dan faktual berdasarkan hasil penelitian administrasi dan verifikasi faktual pada masa pendaftaran, penelitian administrasi dan verifikasi faktual untuk menjadi peserta Pemilu Tahun 2014.	

PEMENUHAN PERSYARATAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TERAKHIR PADA DAERAH OTONOM BARU MENJADI PESERTA PEMILU TAHUN 2019
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)

NO.	PEMILU 2014					PEMILU 2019				KETERANGAN
	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	JML KAB/KOTA YANG DIAJUKAN	NAMA KAB/KOTA	STATUS	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	NAMA KAB/KOTA	STATUS	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						5	4	1 Bulungan 2 Tana Tidung 3 Nunukan 4 Malinau 5 Kota Tarakan	MS MS	1 Tidak dilakukan verifikasi faktual di 4 kabupaten dan 1 kota di wilayah Provinsi Kalimantan Utara karena telah memenuhi syarat sebaran 75 % jumlah kabupaten/kota yaitu 5 kabupaten/kota dari 4 batas minimum syarat sebaran kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara. 2 Kepengurusan di 4 Kabupaten dan 1 Kota tersebut dinyatakan tetap memenuhi syarat administrasi dan faktual berdasarkan hasil penelitian administrasi dan verifikasi faktual pada masa pendaftaran, penelitian administrasi dan verifikasi faktual untuk menjadi peserta Pemilu Tahun 2014.

PEMENUHAN PERSYARATAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TERAKHIR PADA DAERAH OTONOM BARU MENJADI PESERTA PEMILU TAHUN 2019
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDIP)

NO.	PEMILU 2014					PEMILU 2019					KETERANGAN
	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	JML KAB/KOTA YANG DIAJUKAN	NAMA KAB/KOTA	STATUS	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	NAMA KAB/KOTA	STATUS		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
						5	4	1 Bulungan 2 Tana Tidung 3 Nunukan 4 Malinau 5 Kota Tarakan	MS MS MS MS MS	1 Tidak dilakukan verifikasi faktual di 4 kabupaten dan 1 kota di wilayah Provinsi Kalimantan Utara karena telah memenuhi syarat sebaran 75 % jumlah kabupaten/kota yaitu 5 kabupaten/kota dari 4 batas minimum syarat sebaran kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara. 2 Kepengurusan di 4 Kabupaten dan 1 Kota tersebut dinyatakan tetap memenuhi syarat administrasi dan faktual berdasarkan hasil penelitian administrasi dan verifikasi faktual pada masa pendaftaran, penelitian administrasi dan verifikasi faktual untuk menjadi peserta Pemilu Tahun 2014.	

PEMENUHAN PERSYARATAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TERAKHIR PADA DAERAH OTONOM BARU MENJADI PESERTA PEMILU TAHUN 2019
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
PARTAI HATI NURANI RAKYAT (HANURA)

NO.	PEMILU 2014					PEMILU 2019					KETERANGAN
	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	JML KAB/KOTA YANG DIAJUKAN	NAMA KAB/KOTA	STATUS	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	NAMA KAB/KOTA	STATUS		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
						5	4	1 Bulungan 2 Tana Tidung 3 Nunukan 4 Malinau 5 Kota Tarakan	MS MS MS MS MS	1 Tidak dilakukan verifikasi faktual di 4 kabupaten dan 1 kota di wilayah Provinsi Kalimantan Utara karena telah memenuhi syarat sebaran 75 % jumlah kabupaten/kota yaitu 5 kabupaten/kota dari 4 batas minimum syarat sebaran kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara. 2 Kepengurusan di 4 Kabupaten dan 1 Kota tersebut dinyatakan tetap memenuhi syarat administrasi dan faktual berdasarkan hasil penelitian administrasi dan verifikasi faktual pada masa pendaftaran, penelitian administrasi dan verifikasi faktual untuk menjadi peserta Pemilu Tahun 2014.	

PEMENUHAN PERSYARATAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TERAKHIR PADA DAERAH OTONOM BARU MENJADI PESERTA PEMILU TAHUN 2019
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
PARTAI GOLONGAN KARYA (GOLKAR)

NO.	PEMILU 2014					PEMILU 2019					KETERANGAN
	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	JML KAB/KOTA YANG DIAJUKAN	NAMA KAB/KOTA	STATUS	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	NAMA KAB/KOTA	STATUS		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
						5	4	1 Bulungan 2 Tana Tidung 3 Nunukan 4 Malinau 5 Kota Tarakan	MS MS MS MS MS	1 Tidak dilakukan verifikasi faktual di 4 kabupaten dan 1 kota di wilayah Provinsi Kalimantan Utara karena telah memenuhi syarat sebaran 75 % jumlah kabupaten/kota yaitu 5 kabupaten/kota dari 4 batas minimum syarat sebaran kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara. 2 Kepengurusan di 4 Kabupaten dan 1 Kota tersebut dinyatakan tetap memenuhi syarat administrasi dan faktual berdasarkan hasil penelitian administrasi dan verifikasi faktual pada masa pendaftaran, penelitian administrasi dan verifikasi faktual untuk menjadi peserta Pemilu Tahun 2014.	

PEMENUHAN PERSYARATAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TERAKHIR PADA DAERAH OTONOM BARU MENJADI PESERTA PEMILU TAHUN 2019
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
PARTAI BULAN BINTANG (PBB)

NO.	PEMILU 2014					PEMILU 2019					KETERANGAN
	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	JML KAB/KOTA YANG DIAJUKAN	NAMA KAB/KOTA	STATUS	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	NAMA KAB/KOTA	STATUS		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
						5	4	1 Bulungan 2 Tana Tidung 3 Nunukan 4 Malinau 5 Kota Tarakan	MS MS MS MS MS	1 Tidak dilakukan verifikasi faktual di 4 kabupaten dan 1 kota di wilayah Provinsi Kalimantan Utara karena telah memenuhi syarat sebaran 75 % jumlah kabupaten/kota yaitu 5 kabupaten/kota dari 4 batas minimum syarat sebaran kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara. 2 Kepengurusan di 4 Kabupaten dan 1 Kota tersebut dinyatakan tetap memenuhi syarat administrasi dan faktual berdasarkan hasil penelitian administrasi dan verifikasi faktual pada masa pendaftaran, penelitian administrasi dan verifikasi faktual untuk menjadi peserta Pemilu Tahun 2014.	

PEMENUHAN PERSYARATAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TERAKHIR PADA DAERAH OTONOM BARU MENJADI PESERTA PEMILU TAHUN 2019
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB)

NO.	PEMILU 2014					PEMILU 2019					KETERANGAN
	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	JML KAB/KOTA YANG DIAJUKAN	NAMA KAB/KOTA	STATUS	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	NAMA KAB/KOTA	STATUS		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
						5	4	1 Bulungan 2 Tana Tidung 3 Nunukan 4 Malinau 5 Kota Tarakan	MS MS MS MS MS	1 Tidak dilakukan verifikasi faktual di 4 kabupaten dan 1 kota di wilayah Provinsi Kalimantan Utara karena telah memenuhi syarat sebaran 75 % jumlah kabupaten/kota yaitu 5 kabupaten/kota dari 4 batas minimum syarat sebaran kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara. 2 Kepengurusan di 4 Kabupaten dan 1 Kota tersebut dinyatakan tetap memenuhi syarat administrasi dan faktual berdasarkan hasil penelitian administrasi dan verifikasi faktual pada masa pendaftaran, penelitian administrasi dan verifikasi faktual untuk menjadi peserta Pemilu Tahun 2014.	

PEMENUHAN PERSYARATAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TERAKHIR PADA DAERAH OTONOM BARU MENJADI PESERTA PEMILU TAHUN 2019
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA (PKPI)

NO.	PEMILU 2014					PEMILU 2019					KETERANGAN
	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	JML KAB/KOTA YANG DIAJUKAN	NAMA KAB/KOTA	STATUS	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	NAMA KAB/KOTA	STATUS		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
						5	4	1 Bulungan 2 Tana Tidung 3 Nunukan 4 Malinau 5 Kota Tarakan	MS MS MS MS MS	1 Tidak dilakukan verifikasi faktual di 4 kabupaten dan 1 kota di wilayah Provinsi Kalimantan Utara karena telah memenuhi syarat sebaran 75 % jumlah kabupaten/kota yaitu 5 kabupaten/kota dari 4 batas minimum syarat sebaran kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara. 2 Kepengurusan di 4 Kabupaten dan 1 Kota tersebut dinyatakan tetap memenuhi syarat administrasi dan faktual berdasarkan hasil penelitian administrasi dan verifikasi faktual pada masa pendaftaran, penelitian administrasi dan verifikasi faktual untuk menjadi peserta Pemilu Tahun 2014.	

Ditetapkan di Jakarta
 pada tanggal 11 Desember 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 REPUBLIK INDONESIA

ttd.

ARIEF BUDIMAN

Salinan sesuai aslinya
 SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM
 REPUBLIK INDONESIA
 Kepala Biro Hukum,

Sigit Joyowardono



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 227/PL.01.1-Kpt/03/KPU/XII/2017
TENTANG KEDUDUKAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2014 PADA DAERAH OTONOM BARU DALAM PEMENUHAN
PERSYARATAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

**PEMENUHAN PERSYARATAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TERAKHIR PADA DAERAH OTONOM BARU MENJADI PESERTA PEMILU TAHUN 2019
PROVINSI LAMPUNG
PARTAI NASIONAL DEMOKRAT (NasDem)**

NO.	PEMILU 2014					PEMILU 2019					KETERANGAN
	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	JML KAB/KOTA YANG DIAJUKAN	NAMA KAB/KOTA	STATUS	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	NAMA KAB/KOTA	STATUS		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	14	11	14		MS	15	12		MS		1 Tidak dilakukan verifikasi faktual karena masih memenuhi syarat sebaran kabupaten/kota yaitu 14 kabupaten/kota dari 12 batas minimum syarat sebaran setelah terbentuknya Kabupaten Pesisir Barat. 2 Terdapat satu kabupaten pemekaran dari Kabupaten Lampung Barat yaitu Kabupaten Pesisir Barat berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 2012.
				1 Lampung Selatan 2 Lampung Tengah 3 Lampung Utara 4 Lampung Timur 5 Lampung Barata 6 Tulang Bawang 7 Way Kanan 8 Tanggamus 9 Pesawaran 10 Pringsewu 11 Tulang Bawang Barat 12 Mesuji 13 Metro 14 Bandar Lampung	MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS		1 Lampung Selatan 2 Lampung Tengah 3 Lampung Utara 4 Lampung Timur 5 Lampung Barata 6 Tulang Bawang 7 Way Kanan 8 Tanggamus 9 Pesawaran 10 Pringsewu 11 Tulang Bawang Barat 12 Mesuji 13 Metro 14 Bandar Lampung 15 Pesisir Barat	MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS			

PEMENUHAN PERSYARATAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TERAKHIR PADA DAERAH OTONOM BARU MENJADI PESERTA PEMILU TAHUN 2019
PROVINSI LAMPUNG
PARTAI DEMOKRAT

NO.	PEMILU 2014					PEMILU 2019					KETERANGAN
	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	JML KAB/KOTA YANG DIAJUKAN	NAMA KAB/KOTA	STATUS	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	NAMA KAB/KOTA	STATUS		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	14	11	14	1 Lampung Selatan 2 Lampung Tengah 3 Lampung Utara 4 Lampung Timur 5 Lampung Barata 6 Tulang Bawang 7 Way Kanan 8 Tanggamus 9 Pesawaran 10 Pringsewu 11 Tulang Bawang Barat 12 Mesuji 13 Metro 14 Bandar Lampung	MS	15	12	1 Lampung Selatan 2 Lampung Tengah 3 Lampung Utara 4 Lampung Timur 5 Lampung Barata 6 Tulang Bawang 7 Way Kanan 8 Tanggamus 9 Pesawaran 10 Pringsewu 11 Tulang Bawang Barat 12 Mesuji 13 Metro 14 Bandar Lampung 15 Pesisir Barat	MS	1 Tidak dilakukan verifikasi faktual karena masih memenuhi syarat sebaran kabupaten/kota yaitu 14 kabupaten/kota dari 12 batas minimum syarat sebaran setelah terbentuknya Kabupaten Pesisir Barat. 2 Terdapat satu kabupaten pemekaran dari Kabupaten Lampung Barat yaitu Kabupaten Pesisir Barat berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 2012.	

PEMENUHAN PERSYARATAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TERAKHIR PADA DAERAH OTONOM BARU MENJADI PESERTA PEMILU TAHUN 2019
PROVINSI LAMPUNG
PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS)

NO.	PEMILU 2014					PEMILU 2019					KETERANGAN
	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	JML KAB/KOTA YANG DIAJUKAN	NAMA KAB/KOTA	STATUS	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	NAMA KAB/KOTA	STATUS		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	14	11	14	1 Lampung Selatan 2 Lampung Tengah 3 Lampung Utara 4 Lampung Timur 5 Lampung Barata 6 Tulang Bawang 7 Way Kanan 8 Tanggamus 9 Pesawaran 10 Pringsewu 11 Tulang Bawang Barat 12 Mesuji 13 Metro 14 Bandar Lampung	MS	15	12	1 Lampung Selatan 2 Lampung Tengah 3 Lampung Utara 4 Lampung Timur 5 Lampung Barata 6 Tulang Bawang 7 Way Kanan 8 Tanggamus 9 Pesawaran 10 Pringsewu 11 Tulang Bawang Barat 12 Mesuji 13 Metro 14 Bandar Lampung 15 Pesisir Barat	MS	1 Tidak dilakukan verifikasi faktual karena masih memenuhi syarat sebaran kabupaten/kota yaitu 14 kabupaten/kota dari 12 batas minimum syarat sebaran setelah terbentuknya Kabupaten Pesisir Barat. 2 Terdapat satu kabupaten pemekaran dari Kabupaten Lampung Barat yaitu Kabupaten Pesisir Barat berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 2012.	

PEMENUHAN PERSYARATAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TERAKHIR PADA DAERAH OTONOM BARU MENJADI PESERTA PEMILU TAHUN 2019
PROVINSI LAMPUNG
PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN)

NO.	PEMILU 2014					PEMILU 2019					KETERANGAN
	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	JML KAB/KOTA YANG DIAJUKAN	NAMA KAB/KOTA	STATUS	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	NAMA KAB/KOTA	STATUS		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	14	11	14	1 Lampung Selatan 2 Lampung Tengah 3 Lampung Utara 4 Lampung Timur 5 Lampung Barata 6 Tulang Bawang 7 Way Kanan 8 Tanggamus 9 Pesawaran 10 Pringsewu 11 Tulang Bawang Barat 12 Mesuji 13 Metro 14 Bandar Lampung	MS	15	12	1 Lampung Selatan 2 Lampung Tengah 3 Lampung Utara 4 Lampung Timur 5 Lampung Barata 6 Tulang Bawang 7 Way Kanan 8 Tanggamus 9 Pesawaran 10 Pringsewu 11 Tulang Bawang Barat 12 Mesuji 13 Metro 14 Bandar Lampung 15 Pesisir Barat	MS	1 Tidak dilakukan verifikasi faktual karena masih memenuhi syarat sebaran kabupaten/kota yaitu 14 kabupaten/kota dari 12 batas minimum syarat sebaran setelah terbentuknya Kabupaten Pesisir Barat. 2 Terdapat satu kabupaten pemekaran dari Kabupaten Lampung Barat yaitu Kabupaten Pesisir Barat berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 2012.	

PEMENUHAN PERSYARATAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TERAKHIR PADA DAERAH OTONOM BARU MENJADI PESERTA PEMILU TAHUN 2019
PROVINSI LAMPUNG
PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP)

NO.	PEMILU 2014					PEMILU 2019					KETERANGAN
	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	JML KAB/KOTA YANG DIAJUKAN	NAMA KAB/KOTA	STATUS	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	NAMA KAB/KOTA	STATUS		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	14	11	14	1 Lampung Selatan 2 Lampung Tengah 3 Lampung Utara 4 Lampung Timur 5 Lampung Barata 6 Tulang Bawang 7 Way Kanan 8 Tanggamus 9 Pesawaran 10 Pringsewu 11 Tulang Bawang Barat 12 Mesuji 13 Metro 14 Bandar Lampung	MS	15	12	1 Lampung Selatan 2 Lampung Tengah 3 Lampung Utara 4 Lampung Timur 5 Lampung Barata 6 Tulang Bawang 7 Way Kanan 8 Tanggamus 9 Pesawaran 10 Pringsewu 11 Tulang Bawang Barat 12 Mesuji 13 Metro 14 Bandar Lampung 15 Pesisir Barat	MS	1 Tidak dilakukan verifikasi faktual karena masih memenuhi syarat sebaran kabupaten/kota yaitu 14 kabupaten/kota dari 12 batas minimum syarat sebaran setelah terbentuknya Kabupaten Pesisir Barat. 2 Terdapat satu kabupaten pemekaran dari Kabupaten Lampung Barat yaitu Kabupaten Pesisir Barat berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 2012.	

PEMENUHAN PERSYARATAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TERAKHIR PADA DAERAH OTONOM BARU MENJADI PESERTA PEMILU TAHUN 2019
PROVINSI LAMPUNG
PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)

NO.	PEMILU 2014					PEMILU 2019					KETERANGAN
	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	JML KAB/KOTA YANG DIAJUKAN	NAMA KAB/KOTA	STATUS	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	NAMA KAB/KOTA	STATUS		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	14	11	14	1 Lampung Selatan 2 Lampung Tengah 3 Lampung Utara 4 Lampung Timur 5 Lampung Barata 6 Tulang Bawang 7 Way Kanan 8 Tanggamus 9 Pesawaran 10 Pringsewu 11 Tulang Bawang Barat 12 Mesuji 13 Metro 14 Bandar Lampung	MS	15	12	1 Lampung Selatan 2 Lampung Tengah 3 Lampung Utara 4 Lampung Timur 5 Lampung Barata 6 Tulang Bawang 7 Way Kanan 8 Tanggamus 9 Pesawaran 10 Pringsewu 11 Tulang Bawang Barat 12 Mesuji 13 Metro 14 Bandar Lampung 15 Pesisir Barat	MS	1 Tidak dilakukan verifikasi faktual karena masih memenuhi syarat sebaran kabupaten/kota yaitu 14 kabupaten/kota dari 12 batas minimum syarat sebaran setelah terbentuknya Kabupaten Pesisir Barat. 2 Terdapat satu kabupaten pemekaran dari Kabupaten Lampung Barat yaitu Kabupaten Pesisir Barat berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 2012.	

PEMENUHAN PERSYARATAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TERAKHIR PADA DAERAH OTONOM BARU MENJADI PESERTA PEMILU TAHUN 2019
PROVINSI LAMPUNG
PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDIP)

NO.	PEMILU 2014					PEMILU 2019					KETERANGAN
	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	JML KAB/KOTA YANG DIAJUKAN	NAMA KAB/KOTA	STATUS	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	NAMA KAB/KOTA	STATUS		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	14	11	14	1 Lampung Selatan 2 Lampung Tengah 3 Lampung Utara 4 Lampung Timur 5 Lampung Barata 6 Tulang Bawang 7 Way Kanan 8 Tanggamus 9 Pesawaran 10 Pringsewu 11 Tulang Bawang Barat 12 Mesuji 13 Metro 14 Bandar Lampung	MS	15	12	1 Lampung Selatan 2 Lampung Tengah 3 Lampung Utara 4 Lampung Timur 5 Lampung Barata 6 Tulang Bawang 7 Way Kanan 8 Tanggamus 9 Pesawaran 10 Pringsewu 11 Tulang Bawang Barat 12 Mesuji 13 Metro 14 Bandar Lampung 15 Pesisir Barat	MS	1 Tidak dilakukan verifikasi faktual karena masih memenuhi syarat sebaran kabupaten/kota yaitu 14 kabupaten/kota dari 12 batas minimum syarat sebaran setelah terbentuknya Kabupaten Pesisir Barat. 2 Terdapat satu kabupaten pemekaran dari Kabupaten Lampung Barat yaitu Kabupaten Pesisir Barat berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 2012.	

PEMENUHAN PERSYARATAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TERAKHIR PADA DAERAH OTONOM BARU MENJADI PESERTA PEMILU TAHUN 2019
PROVINSI LAMPUNG
PARTAI HATI NURANI RAKYAT (HANURA)

NO.	PEMILU 2014					PEMILU 2019					KETERANGAN
	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	JML KAB/KOTA YANG DIAJUKAN	NAMA KAB/KOTA	STATUS	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	NAMA KAB/KOTA	STATUS		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	14	11	14	1 Lampung Selatan 2 Lampung Tengah 3 Lampung Utara 4 Lampung Timur 5 Lampung Barata 6 Tulang Bawang 7 Way Kanan 8 Tanggamus 9 Pesawaran 10 Pringsewu 11 Tulang Bawang Barat 12 Mesuji 13 Metro 14 Bandar Lampung	MS	15	12	1 Lampung Selatan 2 Lampung Tengah 3 Lampung Utara 4 Lampung Timur 5 Lampung Barata 6 Tulang Bawang 7 Way Kanan 8 Tanggamus 9 Pesawaran 10 Pringsewu 11 Tulang Bawang Barat 12 Mesuji 13 Metro 14 Bandar Lampung 15 Pesisir Barat	MS	1 Tidak dilakukan verifikasi faktual karena masih memenuhi syarat sebaran kabupaten/kota yaitu 14 kabupaten/kota dari 12 batas minimum syarat sebaran setelah terbentuknya Kabupaten Pesisir Barat. 2 Terdapat satu kabupaten pemekaran dari Kabupaten Lampung Barat yaitu Kabupaten Pesisir Barat berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 2012.	

PEMENUHAN PERSYARATAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TERAKHIR PADA DAERAH OTONOM BARU MENJADI PESERTA PEMILU TAHUN 2019
PROVINSI LAMPUNG
PARTAI GOLONGAN KARYA (GOLKAR)

NO.	PEMILU 2014					PEMILU 2019					KETERANGAN
	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	JML KAB/KOTA YANG DIAJUKAN	NAMA KAB/KOTA	STATUS	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	NAMA KAB/KOTA	STATUS		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	14	11	14	1 Lampung Selatan 2 Lampung Tengah 3 Lampung Utara 4 Lampung Timur 5 Lampung Barata 6 Tulang Bawang 7 Way Kanan 8 Tanggamus 9 Pesawaran 10 Pringsewu 11 Tulang Bawang Barat 12 Mesuji 13 Metro 14 Bandar Lampung	MS	15	12	1 Lampung Selatan 2 Lampung Tengah 3 Lampung Utara 4 Lampung Timur 5 Lampung Barata 6 Tulang Bawang 7 Way Kanan 8 Tanggamus 9 Pesawaran 10 Pringsewu 11 Tulang Bawang Barat 12 Mesuji 13 Metro 14 Bandar Lampung 15 Pesisir Barat	MS	1 Tidak dilakukan verifikasi faktual karena masih memenuhi syarat sebaran kabupaten/kota yaitu 14 kabupaten/kota dari 12 batas minimum syarat sebaran setelah terbentuknya Kabupaten Pesisir Barat. 2 Terdapat satu kabupaten pemekaran dari Kabupaten Lampung Barat yaitu Kabupaten Pesisir Barat berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 2012.	

**PEMENUHAN PERSYARATAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TERAKHIR PADA DAERAH OTONOM BARU MENJADI PESERTA PEMILU TAHUN 2019
PROVINSI LAMPUNG
PARTAI BULAN BINTANG (PBB)**

NO.	PEMILU 2014					PEMILU 2019					KETERANGAN
	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	JML KAB/KOTA YANG DIAJUKAN	NAMA KAB/KOTA	STATUS	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	NAMA KAB/KOTA	STATUS	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	14	11	14		MS	15	12		MS		1 Tidak dilakukan verifikasi faktual karena masih memenuhi syarat sebaran kabupaten/kota yaitu 13 kabupaten/kota dari 12 batas minimum syarat sebaran setelah terbentuknya Kabupaten Pesisir Barat. 2 Terdapat satu kabupaten pemekaran dari Kabupaten Lampung Barat yaitu Kabupaten Pesisir Barat berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 2012.
				1 Lampung Selatan 2 Lampung Tengah 3 Lampung Utara 4 Lampung Timur 5 Lampung Barat 6 Tulang Bawang 7 Way Kanan 8 Tanggamus 9 Pesawaran 10 Pringsewu 11 Tulang Bawang Barat 12 Mesuji 13 Metro 14 Bandar Lampung	MS MS MS MS TMS MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS		1 Lampung Selatan 2 Lampung Tengah 3 Lampung Utara 4 Lampung Timur 5 Lampung Barata 6 Tulang Bawang 7 Way Kanan 8 Tanggamus 9 Pesawaran 10 Pringsewu 11 Tulang Bawang Barat 12 Mesuji 13 Metro 14 Bandar Lamupng 15 Pesisir Barat	MS MS MS MS TMS MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS			

PEMENUHAN PERSYARATAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TERAKHIR PADA DAERAH OTONOM BARU MENJADI PESERTA PEMILU TAHUN 2019
PROVINSI LAMPUNG
PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB)

NO.	PEMILU 2014					PEMILU 2019				KETERANGAN
	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	JML KAB/KOTA YANG DIAJUKAN	NAMA KAB/KOTA	STATUS	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	NAMA KAB/KOTA	STATUS	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	14	11	14	1 Lampung Selatan 2 Lampung Tengah 3 Lampung Utara 4 Lampung Timur 5 Lampung Barata 6 Tulang Bawang 7 Way Kanan 8 Tanggamus 9 Pesawaran 10 Pringsewu 11 Tulang Bawang Barat 12 Mesuji 13 Metro 14 Bandar Lampung	MS	15	12	1 Lampung Selatan 2 Lampung Tengah 3 Lampung Utara 4 Lampung Timur 5 Lampung Barata 6 Tulang Bawang 7 Way Kanan 8 Tanggamus 9 Pesawaran 10 Pringsewu 11 Tulang Bawang Barat 12 Mesuji 13 Metro 14 Bandar Lampung 15 Pesisir Barat	MS	1 Tidak dilakukan verifikasi faktual karena masih memenuhi syarat sebaran kabupaten/kota yaitu 14 kabupaten/kota dari 12 batas minimum syarat sebaran setelah terbentuknya Kabupaten Pesisir Barat. 2 Terdapat satu kabupaten pemekaran dari Kabupaten Lampung Barat yaitu Kabupaten Pesisir Barat berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 2012.

**PEMENUHAN PERSYARATAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TERAKHIR PADA DAERAH OTONOM BARU MENJADI PESERTA PEMILU TAHUN 2019
PROVINSI LAMPUNG**
PARTAI KEDILIAN DAN PERSATUAN INDONESIA (PKPI)

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Desember 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

ARIEF BUDIMAN

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA
Kepala Biro Hukum

Sigit Jovowardono

LAMPIRAN III

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 227/PL.01.1-Kpt/03/KPU/XII/2017

TENTANG KEDUDUKAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014 PADA DAERAH OTONOM BARU DALAM PEMENUHAN PERSYARATAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

PEMENUHAN PERSYARATAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TERAKHIR PADA DAERAH OTONOM BARU MENJADI PESERTA PEMILU TAHUN 2019
PROVINSI SUMATERA SELATAN
PARTAI NASIONAL DEMOKRAT (NasDem)

NO.	PEMILU 2014					PEMILU 2019					KETERANGAN
	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	JML KAB/KOTA YANG DIAJUKAN	NAMA KAB/KOTA	STATUS	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	NAMA KAB/KOTA	STATUS		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	15	11	15	1 Kota Palembang 2 Kota Prabumulih 3 Kota Pagar Alam 4 Kota Lubuk Linggau 5 Empat Lawang 6 Ogan Komering Ulu 7 Ogan Komering Ulu Selatan 8 Ogan Komering Ulu Timur 9 Ogan Komering Ulir 10 Ogan Ilir 11 Musi Rawas 12 Muara Enim 13 Lahat 14 Banyuasin 15 Musi Banyuasin	MS	17	13	1 Kota Palembang 2 Kota Prabumulih 3 Kota Pagar Alam 4 Kota Lubuk Linggau 5 Empat Lawang 6 Ogan Komering Ulu 7 Ogan Komering Ulu Selatan 8 Ogan Komering Ulu Timur 9 Ogan Komering Ulir 10 Ogan Ilir 11 Musi Rawas 12 Muara Enim 13 Lahat 14 Banyuasin 15 Musi Banyuasin 16 Musirawas Utara 17 Penukal Abab Lematang Ilir	MS	1 Tidak dilakukan verifikasi faktual karena telah memenuhi syarat sebaran kabupaten/kota yaitu memiliki 15 kabupaten/kota dari 13 kabupaten/ kota batas minimum syarat sebaran setelah terbentuknya Kabupaten Musirawas Utara dan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. 2 Terdapat 2 kabupaten pemekaran di Provinsi Sumatera Selatan : a. Dari Kabupaten Musirawas yaitu Kabupaten Kab. Musirawas Utara (UU No. 16 Tahun 2013); b. Dari Kabupaten Muara Enim yaitu Kab. Penukal Abab Lematang Ilir (UU No. 7 Tahun 2013).	

PEMENUHAN PERSYARATAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TERAKHIR PADA DAERAH OTONOM BARU MENJADI PESERTA PEMILU TAHUN 2019
PROVINSI SUMATERA SELATAN
PARTAI DEMOKRAT

NO.	PEMILU 2014					PEMILU 2019					KETERANGAN
	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	JML KAB/KOTA YANG DIAJUKAN	NAMA KAB/KOTA	STATUS	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	NAMA KAB/KOTA	STATUS		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	15	11	15	1 Kota Palembang 2 Kota Prabumulih 3 Kota Pagar Alam 4 Kota Lubuk Linggau 5 Empat Lawang 6 Ogan Komering Ulu 7 Ogan Komering Ulu Selatan 8 Ogan Komering Ulu Timur 9 Ogan Komering Ulir 10 Ogan Ilir 11 Musi Rawas 12 Muara Enim 13 Lahat 14 Banyuasin 15 Musi Banyuasin	MS	17	13	1 Kota Palembang 2 Kota Prabumulih 3 Kota Pagar Alam 4 Kota Lubuk Linggau 5 Empat Lawang 6 Ogan Komering Ulu 7 Ogan Komering Ulu Selatan 8 Ogan Komering Ulu Timur 9 Ogan Komering Ulir 10 Ogan Ilir 11 Musi Rawas 12 Muara Enim 13 Lahat 14 Banyuasin 15 Musi Banyuasin 16 Musirawas Utara 17 Penukal Abab Lematang Ilir	MS	1 Tidak dilakukan verifikasi faktual karena telah memenuhi syarat sebaran kabupaten/kota yaitu memiliki 15 kabupaten/kota dari 13 kabupaten/ kota batas minimum syarat sebaran setelah terbentuknya Kabupaten Musirawas Utara dan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. 2 Terdapat 2 kabupaten pemekaran di Provinsi Sumatera Selatan : a. Dari Kabupaten Musirawas yaitu Kabupaten Kab. Musirawas Utara (UU No. 16 Tahun 2013); b. Dari Kabupaten Muara Enim yaitu Kab. Penukal Abab Lematang Ilir (UU No. 7 Tahun 2013).	

**PEMENUHAN PERSYARATAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TERAKHIR PADA DAERAH OTONOM BARU MENJADI PESERTA PEMILU TAHUN 2019
PROVINSI SUMATERA SELATAN
PARTAI KADEILAN SEJAHTERA (PKS)**

PEMENUHAN PERSYARATAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TERAKHIR PADA DAERAH OTONOM BARU MENJADI PESERTA PEMILU TAHUN 2019
PROVINSI SUMATERA SELATAN
PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN)

NO.	PEMILU 2014					PEMILU 2019					KETERANGAN
	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	JML KAB/KOTA YANG DIAJUKAN	NAMA KAB/KOTA	STATUS	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	NAMA KAB/KOTA	STATUS	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	15	11	15	1 Kota Palembang 2 Kota Prabumulih 3 Kota Pagar Alam 4 Kota Lubuk Linggau 5 Empat Lawang 6 Ogan Komering Ulu 7 Ogan Komering Ulu Selatan 8 Ogan Komering Ulu Timur 9 Ogan Komering Ulir 10 Ogan Ilir 11 Musi Rawas 12 Muara Enim 13 Lahat 14 Banyuasin 15 Musi Banyuasin	MS	17	13	1 Kota Palembang 2 Kota Prabumulih 3 Kota Pagar Alam 4 Kota Lubuk Linggau 5 Empat Lawang 6 Ogan Komering Ulu 7 Ogan Komering Ulu Selatan 8 Ogan Komering Ulu Timur 9 Ogan Komering Ulir 10 Ogan Ilir 11 Musi Rawas 12 Muara Enim 13 Lahat 14 Banyuasin 15 Musi Banyuasin 16 Musirawas Utara 17 Penukal Abab Lematang Ilir	MS	1 Tidak dilakukan verifikasi faktual karena telah memenuhi syarat sebaran kabupaten/kota yaitu memiliki 15 kabupaten/kota dari 13 kabupaten/ kota batas minimum syarat sebaran setelah terbentuknya Kabupaten Musirawas Utara dan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. 2 Terdapat 2 kabupaten pemekaran di Provinsi Sumatera Selatan : a. Dari Kabupaten Musirawas yaitu Kabupaten Kab. Musirawas Utara (UU No. 16 Tahun 2013); b. Dari Kabupaten Muara Enim yaitu Kab. Penukal Abab Lematang Ilir (UU No. 7 Tahun 2013).	

PEMENUHAN PERSYARATAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TERAKHIR PADA DAERAH OTONOM BARU MENJADI PESERTA PEMILU TAHUN 2019
PROVINSI SUMATERA SELATAN
PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP)

NO.	PEMILU 2014					PEMILU 2019					KETERANGAN
	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	JML KAB/KOTA YANG DIAJUKAN	NAMA KAB/KOTA	STATUS	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	NAMA KAB/KOTA	STATUS		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	15	11	15	1 Kota Palembang 2 Kota Prabumulih 3 Kota Pagar Alam 4 Kota Lubuk Linggau 5 Empat Lawang 6 Ogan Komering Ulu 7 Ogan Komering Ulu Selatan 8 Ogan Komering Ulu Timur 9 Ogan Komering Ulir 10 Ogan Ilir 11 Musi Rawas 12 Muara Enim 13 Lahat 14 Banyuasin 15 Musi Banyuasin	MS	17	13	1 Kota Palembang 2 Kota Prabumulih 3 Kota Pagar Alam 4 Kota Lubuk Linggau 5 Empat Lawang 6 Ogan Komering Ulu 7 Ogan Komering Ulu Selatan 8 Ogan Komering Ulu Timur 9 Ogan Komering Ulir 10 Ogan Ilir 11 Musi Rawas 12 Muara Enim 13 Lahat 14 Banyuasin 15 Musi Banyuasin 16 Musirawas Utara 17 Penukal Abab Lematang Ilir	MS	1 Tidak dilakukan verifikasi faktual karena telah memenuhi syarat sebaran kabupaten/kota yaitu memiliki 15 kabupaten/kota dari 13 kabupaten/ kota batas minimum syarat sebaran setelah terbentuknya Kabupaten Musirawas Utara dan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. 2 Terdapat 2 kabupaten pemekaran di Provinsi Sumatera Selatan : a. Dari Kabupaten Musirawas yaitu Kabupaten Kab. Musirawas Utara (UU No. 16 Tahun 2013); b. Dari Kabupaten Muara Enim yaitu Kab. Penukal Abab Lematang Ilir (UU No. 7 Tahun 2013).	

PEMENUHAN PERSYARATAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TERAKHIR PADA DAERAH OTONOM BARU MENJADI PESERTA PEMILU TAHUN 2019
PROVINSI SUMATERA SELATAN
PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)

NO.	PEMILU 2014					PEMILU 2019					KETERANGAN
	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	JML KAB/KOTA YANG DIAJUKAN	NAMA KAB/KOTA	STATUS	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	NAMA KAB/KOTA	STATUS		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	15	11	15	1 Kota Palembang 2 Kota Prabumulih 3 Kota Pagar Alam 4 Kota Lubuk Linggau 5 Empat Lawang 6 Ogan Komering Ulu 7 Ogan Komering Ulu Selatan 8 Ogan Komering Ulu Timur 9 Ogan Komering Ulir 10 Ogan Ilir 11 Musi Rawas 12 Muara Enim 13 Lahat 14 Banyuasin 15 Musi Banyuasin	MS	17	13	1 Kota Palembang 2 Kota Prabumulih 3 Kota Pagar Alam 4 Kota Lubuk Linggau 5 Empat Lawang 6 Ogan Komering Ulu 7 Ogan Komering Ulu Selatan 8 Ogan Komering Ulu Timur 9 Ogan Komering Ulir 10 Ogan Ilir 11 Musi Rawas 12 Muara Enim 13 Lahat 14 Banyuasin 15 Musi Banyuasin 16 Musirawas Utara 17 Penukal Abab Lematang Ilir	MS	1 Tidak dilakukan verifikasi faktual karena telah memenuhi syarat sebaran kabupaten/kota yaitu memiliki 15 kabupaten/kota dari 13 kabupaten/ kota batas minimum syarat sebaran setelah terbentuknya Kabupaten Musirawas Utara dan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. 2 Terdapat 2 kabupaten pemekaran di Provinsi Sumatera Selatan : a. Dari Kabupaten Musirawas yaitu Kabupaten Kab. Musirawas Utara (UU No. 16 Tahun 2013); b. Dari Kabupaten Muara Enim yaitu Kab. Penukal Abab Lematang Ilir (UU No. 7 Tahun 2013).	

PEMENUHAN PERSYARATAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TERAKHIR PADA DAERAH OTONOM BARU MENJADI PESERTA PEMILU TAHUN 2019
PROVINSI SUMATERA SELATAN
PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDIP)

NO.	PEMILU 2014					PEMILU 2019				KETERANGAN
	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	JML KAB/KOTA YANG DIAJUKAN	NAMA KAB/KOTA	STATUS	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	NAMA KAB/KOTA	STATUS	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	15	11	15	1 Kota Palembang 2 Kota Prabumulih 3 Kota Pagar Alam 4 Kota Lubuk Linggau 5 Empat Lawang 6 Ogan Komering Ulu 7 Ogan Komering Ulu Selatan 8 Ogan Komering Ulu Timur 9 Ogan Komering Ulir 10 Ogan Ilir 11 Musi Rawas 12 Muara Enim 13 Lahat 14 Banyuasin 15 Musi Banyuasin	MS	17	13	1 Kota Palembang 2 Kota Prabumulih 3 Kota Pagar Alam 4 Kota Lubuk Linggau 5 Empat Lawang 6 Ogan Komering Ulu 7 Ogan Komering Ulu Selatan 8 Ogan Komering Ulu Timur 9 Ogan Komering Ulir 10 Ogan Ilir 11 Musi Rawas 12 Muara Enim 13 Lahat 14 Banyuasin 15 Musi Banyuasin 16 Musirawas Utara 17 Penukal Abab Lematang Ilir	MS	1 Tidak dilakukan verifikasi faktual karena telah memenuhi syarat sebaran kabupaten/kota yaitu memiliki 15 kabupaten/kota dari 13 kabupaten/ kota batas minimum syarat sebaran setelah terbentuknya Kabupaten Musirawas Utara dan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. 2 Terdapat 2 kabupaten pemekaran di Provinsi Sumatera Selatan : a. Dari Kabupaten Musirawas yaitu Kabupaten Kab. Musirawas Utara (UU No. 16 Tahun 2013); b. Dari Kabupaten Muara Enim yaitu Kab. Penukal Abab Lematang Ilir (UU No. 7 Tahun 2013).

PEMENUHAN PERSYARATAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TERAKHIR PADA DAERAH OTONOM BARU MENJADI PESERTA PEMILU TAHUN 2019
PROVINSI SUMATERA SELATAN
PARTAI HATI NURANI RAKYAT (HANURA)

NO.	PEMILU 2014					PEMILU 2019					KETERANGAN
	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	JML KAB/KOTA YANG DIAJUKAN	NAMA KAB/KOTA	STATUS	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	NAMA KAB/KOTA	STATUS		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	15	11	15	1 Kota Palembang 2 Kota Prabumulih 3 Kota Pagar Alam 4 Kota Lubuk Linggau 5 Empat Lawang 6 Ogan Komering Ulu 7 Ogan Komering Ulu Selatan 8 Ogan Komering Ulu Timur 9 Ogan Komering Ulir 10 Ogan Ilir 11 Musi Rawas 12 Muara Enim 13 Lahat 14 Banyuasin 15 Musi Banyuasin	MS	17	13	1 Kota Palembang 2 Kota Prabumulih 3 Kota Pagar Alam 4 Kota Lubuk Linggau 5 Empat Lawang 6 Ogan Komering Ulu 7 Ogan Komering Ulu Selatan 8 Ogan Komering Ulu Timur 9 Ogan Komering Ulir 10 Ogan Ilir 11 Musi Rawas 12 Muara Enim 13 Lahat 14 Banyuasin 15 Musi Banyuasin 16 Musirawas Utara 17 Penukal Abab Lematang Ilir	MS	1 Tidak dilakukan verifikasi faktual karena telah memenuhi syarat sebaran kabupaten/kota yaitu memiliki 15 kabupaten/kota dari 13 kabupaten/ kota batas minimum syarat sebaran setelah terbentuknya Kabupaten Musirawas Utara dan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. 2 Terdapat 2 kabupaten pemekaran di Provinsi Sumatera Selatan : a. Dari Kabupaten Musirawas yaitu Kabupaten Kab. Musirawas Utara (UU No. 16 Tahun 2013); b. Dari Kabupaten Muara Enim yaitu Kab. Penukal Abab Lematang Ilir (UU No. 7 Tahun 2013).	

PEMENUHAN PERSYARATAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TERAKHIR PADA DAERAH OTONOM BARU MENJADI PESERTA PEMILU TAHUN 2019
PROVINSI SUMATERA SELATAN
PARTAI GOLONGAN KARYA (GOLKAR)

NO.	PEMILU 2014					PEMILU 2019					KETERANGAN
	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	JML KAB/KOTA YANG DIAJUKAN	NAMA KAB/KOTA	STATUS	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	NAMA KAB/KOTA	STATUS		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	15	11	15	1 Kota Palembang 2 Kota Prabumulih 3 Kota Pagar Alam 4 Kota Lubuk Linggau 5 Empat Lawang 6 Ogan Komering Ulu 7 Ogan Komering Ulu Selatan 8 Ogan Komering Ulu Timur 9 Ogan Komering Ulir 10 Ogan Ilir 11 Musi Rawas 12 Muara Enim 13 Lahat 14 Banyuasin 15 Musi Banyuasin	MS	17	13	1 Kota Palembang 2 Kota Prabumulih 3 Kota Pagar Alam 4 Kota Lubuk Linggau 5 Empat Lawang 6 Ogan Komering Ulu 7 Ogan Komering Ulu Selatan 8 Ogan Komering Ulu Timur 9 Ogan Komering Ulir 10 Ogan Ilir 11 Musi Rawas 12 Muara Enim 13 Lahat 14 Banyuasin 15 Musi Banyuasin 16 Musirawas Utara 17 Penukal Abab Lematang Ilir	MS	1 Tidak dilakukan verifikasi faktual karena telah memenuhi syarat sebaran kabupaten/kota yaitu memiliki 15 kabupaten/kota dari 13 kabupaten/ kota batas minimum syarat sebaran setelah terbentuknya Kabupaten Musirawas Utara dan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. 2 Terdapat 2 kabupaten pemekaran di Provinsi Sumatera Selatan : a. Dari Kabupaten Musirawas yaitu Kabupaten Kab. Musirawas Utara (UU No. 16 Tahun 2013); b. Dari Kabupaten Muara Enim yaitu Kab. Penukal Abab Lematang Ilir (UU No. 7 Tahun 2013).	

PEMENUHAN PERSYARATAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TERAKHIR PADA DAERAH OTONOM BARU MENJADI PESERTA PEMILU TAHUN 2019
PROVINSI SUMATERA SELATAN
PARTAI BULAN BINTANG (PBB)

NO.	PEMILU 2014					PEMILU 2019					KETERANGAN
	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	JML KAB/KOTA YANG DIAJUKAN	NAMA KAB/KOTA	STATUS	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	NAMA KAB/KOTA	STATUS		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	15	11	15	1 Kota Palembang 2 Kota Prabumulih 3 Kota Pagar Alam 4 Kota Lubuk Linggau 5 Empat Lawang 6 Ogan Komering Ulu 7 Ogan Komering Ulu Selatan 8 Ogan Komering Ulu Timur 9 Ogan Komering Ulir 10 Ogan Ilir 11 Musi Rawas 12 Muara Enim 13 Lahat 14 Banyuasin 15 Musi Banyuasin	MS	17	13	1 Kota Palembang 2 Kota Prabumulih 3 Kota Pagar Alam 4 Kota Lubuk Linggau 5 Empat Lawang 6 Ogan Komering Ulu 7 Ogan Komering Ulu Selatan 8 Ogan Komering Ulu Timur 9 Ogan Komering Ulir 10 Ogan Ilir 11 Musi Rawas 12 Muara Enim 13 Lahat 14 Banyuasin 15 Musi Banyuasin 16 Musirawas Utara 17 Penukal Abab Lematang Ilir	MS	1 Tidak dilakukan verifikasi faktual karena telah memenuhi syarat sebaran kabupaten/kota yaitu memiliki 15 kabupaten/kota dari 13 kabupaten/ kota batas minimum syarat sebaran setelah terbentuknya Kabupaten Musirawas Utara dan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. 2 Terdapat 2 kabupaten pemekaran di Provinsi Sumatera Selatan : a. Dari Kabupaten Musirawas yaitu Kabupaten Kab. Musirawas Utara (UU No. 16 Tahun 2013); b. Dari Kabupaten Muara Enim yaitu Kab. Penukal Abab Lematang Ilir (UU No. 7 Tahun 2013).	

PEMENUHAN PERSYARATAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TERAKHIR PADA DAERAH OTONOM BARU MENJADI PESERTA PEMILU TAHUN 2019
PROVINSI SUMATERA SELATAN
PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB)

NO.	PEMILU 2014					PEMILU 2019					KETERANGAN
	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	JML KAB/KOTA YANG DIAJUKAN	NAMA KAB/KOTA	STATUS	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	NAMA KAB/KOTA	STATUS		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	15	11	15	1 Kota Palembang 2 Kota Prabumulih 3 Kota Pagar Alam 4 Kota Lubuk Linggau 5 Empat Lawang 6 Ogan Komering Ulu 7 Ogan Komering Ulu Selatan 8 Ogan Komering Ulu Timur 9 Ogan Komering Ulir 10 Ogan Ilir 11 Musi Rawas 12 Muara Enim 13 Lahat 14 Banyuasin 15 Musi Banyuasin	MS	17	13	1 Kota Palembang 2 Kota Prabumulih 3 Kota Pagar Alam 4 Kota Lubuk Linggau 5 Empat Lawang 6 Ogan Komering Ulu 7 Ogan Komering Ulu Selatan 8 Ogan Komering Ulu Timur 9 Ogan Komering Ulir 10 Ogan Ilir 11 Musi Rawas 12 Muara Enim 13 Lahat 14 Banyuasin 15 Musi Banyuasin 16 Musirawas Utara 17 Penukal Abab Lematang Ilir	MS	1 Tidak dilakukan verifikasi faktual karena telah memenuhi syarat sebaran kabupaten/kota yaitu memiliki 15 kabupaten/kota dari 13 kabupaten/ kota batas minimum syarat sebaran setelah terbentuknya Kabupaten Musirawas Utara dan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. 2 Terdapat 2 kabupaten pemekaran di Provinsi Sumatera Selatan : a. Dari Kabupaten Musirawas yaitu Kabupaten Kab. Musirawas Utara (UU No. 16 Tahun 2013); b. Dari Kabupaten Muara Enim yaitu Kab. Penukal Abab Lematang Ilir (UU No. 7 Tahun 2013).	

**PEMENUHAN PERSYARATAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TERAKHIR PADA DAERAH OTONOM BARU MENJADI PESERTA PEMILU TAHUN 2019
PROVINSI SUMATERA SELATAN
PARTAI KEDILIAN DAN PERSATUAN INDONESIA (PKPI)**

NO.	PEMILU 2014					PEMILU 2019					KETERANGAN
	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	JML KAB/KOTA YANG DIAJUKAN	NAMA KAB/KOTA	STATUS	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	NAMA KAB/KOTA	STATUS		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	15	11	15		MS	17	13		BMS		1 Dilakukan verifikasi faktual karena belum memenuhi syarat sebaran kabupaten/kota yaitu baru memiliki 12 kabupaten/kota dari 13 kabupaten/ kota batas minimum syarat sebaran setelah terbentuknya Kabupaten Musirawas Utara dan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. 2 Terdapat 2 kabupaten pemekaran di Provinsi Sumatera Selatan : a. Dari Kabupaten Musirawas yaitu Kabupaten Kab. Musirawas Utara (UU No. 16 Tahun 2013); b. Dari Kabupaten Muara Enim yaitu Kab. Penukal Abab Lematang Ilir (UU No. 7 Tahun 2013).
				1 Kota Palembang 2 Kota Prabumulih 3 Kota Pagar Alam 4 Kota Lubuk Linggau 5 Empat Lawang 6 Ogan Komering Ulu 7 Ogan Komering Ulu Selatan 8 Ogan Komering Ulu Timur 9 Ogan Komering Ulir 10 Ogan Ilir 11 Musi Rawas 12 Muara Enim 13 Lahat 14 Banyuasin 15 Musi Banyuasin	MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS TMS MS MS MS MS TMS		1 Kota Palembang 2 Kota Prabumulih 3 Kota Pagar Alam 4 Kota Lubuk Linggau 5 Empat Lawang 6 Ogan Komering Ulu 7 Ogan Komering Ulu Selatan 8 Ogan Komering Ulu Timur 9 Ogan Komering Ulir 10 Ogan Ilir 11 Musi Rawas 12 Muara Enim 13 Lahat 14 Banyuasin 15 Musi Banyuasin 16 Musirawas Utara 17 Penukal Abab Lematang Ilir	MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS TMS MS MS MS MS TMS			

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Desember 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

ARIEF BUDIMAN

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA
Kepala Biro Hukum,

Sigit Joyowardono

LAMPIRAN IV
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR : 227/PL.01.1-Kpt/03/KPU/XII/2017
 TENTANG KEDUDUKAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM
 TAHUN 2014 PADA DAERAH OTONOM BARU DALAM PEMENUHAN
 PERSYARATAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

PEMENUHAN PERSYARATAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TERAKHIR PADA DAERAH OTONOM BARU MENJADI PESERTA PEMILU TAHUN 2019
PROVINSI JAWA BARAT
PARTAI NASIONAL DEMOKRAT (NasDem)

NO.	PEMILU 2014					PEMILU 2019					KETERANGAN
	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	JML KAB/KOTA YANG DIAJUKAN	NAMA KAB/KOTA	STATUS	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	NAMA KAB/KOTA	STATUS		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	26	20	26	1 Bogor 2 Sukabumi 3 Cianjur 4 Bandung 5 Garut 6 Tasikmalaya 7 Ciamis 8 Kuningan 9 Cirebon 10 Majalengka 11 Sumedang 12 Indramayu 13 Subang 14 Purwakarta 15 Karawang 16 Bekasi 17 Bandung Barat 18 Kota Bogor 19 Kota Sukabumi 20 Kota Bandung 21 Kota Cirebon 22 Kota Bekasi 23 Kota Depok 24 Kota Cimahi 25 Kota Tasikmalaya 26 Kota Banjar	MS	27	21	1 Bogor 2 Sukabumi 3 Cianjur 4 Bandung 5 Garut 6 Tasikmalaya 7 Ciamis 8 Kuningan 9 Cirebon 10 Majalengka 11 Sumedang 12 Indramayu 13 Subang 14 Purwakarta 15 Karawang 16 Bekasi 17 Bandung Barat 18 Kota Bogor 19 Kota Sukabumi 20 Kota Bandung 21 Kota Cirebon 22 Kota Bekasi 23 Kota Depok 24 Kota Cimahi 25 Kota Tasikmalaya 26 Kota Banjar 27 Pangandaran	MS	1 Tidak dilakukan verifikasi faktual karena telah memenuhi syarat sebaran kabupaten/kota yaitu memiliki 26 kabupaten/kota yang MS dari 21 kabupaten/kota batas minimum syarat sebaran setelah terbentuknya Kabupaten Pangandaran. 2 Terdapat 1 kabupaten pemekaran dari Kabupaten Ciamis yaitu Kabupaten Pangandaran berdasarkan UU Nomor 21 Tahun 2012.	

PEMENUHAN PERSYARATAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TERAKHIR PADA DAERAH OTONOM BARU MENJADI PESERTA PEMILU TAHUN 2019
PROVINSI JAWA BARAT
PARTAI DEMOKRAT

NO.	PEMILU 2014					PEMILU 2019					KETERANGAN
	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	JML KAB/KOTA YANG DIAJUKAN	NAMA KAB/KOTA	STATUS	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	NAMA KAB/KOTA	STATUS		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	26	20	26	1 Bogor 2 Sukabumi 3 Cianjur 4 Bandung 5 Garut 6 Tasikmalaya 7 Ciamis 8 Kuningan 9 Cirebon 10 Majalengka 11 Sumedang 12 Indramayu 13 Subang 14 Purwakarta 15 Karawang 16 Bekasi 17 Bandung Barat 18 Kota Bogor 19 Kota Sukabumi 20 Kota Bandung 21 Kota Cirebon 22 Kota Bekasi 23 Kota Depok 24 Kota Cimahi 25 Kota Tasikmalaya 26 Kota Banjar	MS	27	21	1 Bogor 2 Sukabumi 3 Cianjur 4 Bandung 5 Garut 6 Tasikmalaya 7 Ciamis 8 Kuningan 9 Cirebon 10 Majalengka 11 Sumedang 12 Indramayu 13 Subang 14 Purwakarta 15 Karawang 16 Bekasi 17 Bandung Barat 18 Kota Bogor 19 Kota Sukabumi 20 Kota Bandung 21 Kota Cirebon 22 Kota Bekasi 23 Kota Depok 24 Kota Cimahi 25 Kota Tasikmalaya 26 Kota Banjar 27 Pangandaran	MS	1 Tidak dilakukan verifikasi faktual karena telah memenuhi syarat sebaran kabupaten/kota yaitu memiliki 26 kabupaten/kota yang MS dari 21 kabupaten/kota batas minimum syarat sebaran setelah terbentuknya Kabupaten Pangandaran. 2 Terdapat 1 kabupaten pemekaran dari Kabupaten Ciamis yaitu Kabupaten Pangandaran berdasarkan UU Nomor 21 Tahun 2012.	

PEMENUHAN PERSYARATAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TERAKHIR PADA DAERAH OTONOM BARU MENJADI PESERTA PEMILU TAHUN 2019
PROVINSI JAWA BARAT
PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS)

NO.	PEMILU 2014					PEMILU 2019					KETERANGAN
	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	JML KAB/KOTA YANG DIAJUKAN	NAMA KAB/KOTA	STATUS	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	NAMA KAB/KOTA	STATUS		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	26	20	26	1 Bogor 2 Sukabumi 3 Cianjur 4 Bandung 5 Garut 6 Tasikmalaya 7 Ciamis 8 Kuningan 9 Cirebon 10 Majalengka 11 Sumedang 12 Indramayu 13 Subang 14 Purwakarta 15 Karawang 16 Bekasi 17 Bandung Barat 18 Kota Bogor 19 Kota Sukabumi 20 Kota Bandung 21 Kota Cirebon 22 Kota Bekasi 23 Kota Depok 24 Kota Cimahi 25 Kota Tasikmalaya 26 Kota Banjar	MS	27	21	1 Bogor 2 Sukabumi 3 Cianjur 4 Bandung 5 Garut 6 Tasikmalaya 7 Ciamis 8 Kuningan 9 Cirebon 10 Majalengka 11 Sumedang 12 Indramayu 13 Subang 14 Purwakarta 15 Karawang 16 Bekasi 17 Bandung Barat 18 Kota Bogor 19 Kota Sukabumi 20 Kota Bandung 21 Kota Cirebon 22 Kota Bekasi 23 Kota Depok 24 Kota Cimahi 25 Kota Tasikmalaya 26 Kota Banjar 27 Pangandaran	MS	1 Tidak dilakukan verifikasi faktual karena telah memenuhi syarat sebaran kabupaten/kota yaitu memiliki 26 kabupaten/kota yang MS dari 21 kabupaten/kota batas minimum syarat sebaran setelah terbentuknya Kabupaten Pangandaran. 2 Terdapat 1 kabupaten pemekaran dari Kabupaten Ciamis yaitu Kabupaten Pangandaran berdasarkan UU Nomor 21 Tahun 2012.	

PEMENUHAN PERSYARATAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TERAKHIR PADA DAERAH OTONOM BARU MENJADI PESERTA PEMILU TAHUN 2019
PROVINSI JAWA BARAT
PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN)

NO.	PEMILU 2014					PEMILU 2019				KETERANGAN
	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	JML KAB/KOTA YANG DIAJUKAN	NAMA KAB/KOTA	STATUS	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	NAMA KAB/KOTA	STATUS	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	26	20	26	1 Bogor 2 Sukabumi 3 Cianjur 4 Bandung 5 Garut 6 Tasikmalaya 7 Ciamis 8 Kuningan 9 Cirebon 10 Majalengka 11 Sumedang 12 Indramayu 13 Subang 14 Purwakarta 15 Karawang 16 Bekasi 17 Bandung Barat 18 Kota Bogor 19 Kota Sukabumi 20 Kota Bandung 21 Kota Cirebon 22 Kota Bekasi 23 Kota Depok 24 Kota Cimahi 25 Kota Tasikmalaya 26 Kota Banjar	MS	27	21	1 Bogor 2 Sukabumi 3 Cianjur 4 Bandung 5 Garut 6 Tasikmalaya 7 Ciamis 8 Kuningan 9 Cirebon 10 Majalengka 11 Sumedang 12 Indramayu 13 Subang 14 Purwakarta 15 Karawang 16 Bekasi 17 Bandung Barat 18 Kota Bogor 19 Kota Sukabumi 20 Kota Bandung 21 Kota Cirebon 22 Kota Bekasi 23 Kota Depok 24 Kota Cimahi 25 Kota Tasikmalaya 26 Kota Banjar 27 Pangandaran	MS	1 Tidak dilakukan verifikasi faktual karena telah memenuhi syarat sebaran kabupaten/kota yaitu memiliki 26 kabupaten/kota yang MS dari 21 kabupaten/kota batas minimum syarat sebaran setelah terbentuknya Kabupaten Pangandaran. 2 Terdapat 1 kabupaten pemekaran dari Kabupaten Ciamis yaitu Kabupaten Pangandaran berdasarkan UU Nomor 21 Tahun 2012.

PEMENUHAN PERSYARATAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TERAKHIR PADA DAERAH OTONOM BARU MENJADI PESERTA PEMILU TAHUN 2019
PROVINSI JAWA BARAT
PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP)

NO.	PEMILU 2014					PEMILU 2019					KETERANGAN
	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	JML KAB/KOTA YANG DIAJUKAN	NAMA KAB/KOTA	STATUS	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	NAMA KAB/KOTA	STATUS		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	26	20	26	1 Bogor 2 Sukabumi 3 Cianjur 4 Bandung 5 Garut 6 Tasikmalaya 7 Ciamis 8 Kuningan 9 Cirebon 10 Majalengka 11 Sumedang 12 Indramayu 13 Subang 14 Purwakarta 15 Karawang 16 Bekasi 17 Bandung Barat 18 Kota Bogor 19 Kota Sukabumi 20 Kota Bandung 21 Kota Cirebon 22 Kota Bekasi 23 Kota Depok 24 Kota Cimahi 25 Kota Tasikmalaya 26 Kota Banjar	MS	27	21	1 Bogor 2 Sukabumi 3 Cianjur 4 Bandung 5 Garut 6 Tasikmalaya 7 Ciamis 8 Kuningan 9 Cirebon 10 Majalengka 11 Sumedang 12 Indramayu 13 Subang 14 Purwakarta 15 Karawang 16 Bekasi 17 Bandung Barat 18 Kota Bogor 19 Kota Sukabumi 20 Kota Bandung 21 Kota Cirebon 22 Kota Bekasi 23 Kota Depok 24 Kota Cimahi 25 Kota Tasikmalaya 26 Kota Banjar 27 Pangandaran	MS	1 Tidak dilakukan verifikasi faktual karena telah memenuhi syarat sebaran kabupaten/kota yaitu memiliki 26 kabupaten/kota yang MS dari 21 kabupaten/kota batas minimum syarat sebaran setelah terbentuknya Kabupaten Pangandaran. 2 Terdapat 1 kabupaten pemekaran dari Kabupaten Ciamis yaitu Kabupaten Pangandaran berdasarkan UU Nomor 21 Tahun 2012.	

PEMENUHAN PERSYARATAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TERAKHIR PADA DAERAH OTONOM BARU MENJADI PESERTA PEMILU TAHUN 2019
PROVINSI JAWA BARAT
PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)

NO.	PEMILU 2014					PEMILU 2019					KETERANGAN
	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	JML KAB/KOTA YANG DIAJUKAN	NAMA KAB/KOTA	STATUS	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	NAMA KAB/KOTA	STATUS		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	26	20	26	1 Bogor 2 Sukabumi 3 Cianjur 4 Bandung 5 Garut 6 Tasikmalaya 7 Ciamis 8 Kuningan 9 Cirebon 10 Majalengka 11 Sumedang 12 Indramayu 13 Subang 14 Purwakarta 15 Karawang 16 Bekasi 17 Bandung Barat 18 Kota Bogor 19 Kota Sukabumi 20 Kota Bandung 21 Kota Cirebon 22 Kota Bekasi 23 Kota Depok 24 Kota Cimahi 25 Kota Tasikmalaya 26 Kota Banjar	MS	27	21	1 Bogor 2 Sukabumi 3 Cianjur 4 Bandung 5 Garut 6 Tasikmalaya 7 Ciamis 8 Kuningan 9 Cirebon 10 Majalengka 11 Sumedang 12 Indramayu 13 Subang 14 Purwakarta 15 Karawang 16 Bekasi 17 Bandung Barat 18 Kota Bogor 19 Kota Sukabumi 20 Kota Bandung 21 Kota Cirebon 22 Kota Bekasi 23 Kota Depok 24 Kota Cimahi 25 Kota Tasikmalaya 26 Kota Banjar 27 Pangandaran	MS	1 Tidak dilakukan verifikasi faktual karena telah memenuhi syarat sebaran kabupaten/kota yaitu memiliki 26 kabupaten/kota yang MS dari 21 kabupaten/kota batas minimum syarat sebaran setelah terbentuknya Kabupaten Pangandaran. 2 Terdapat 1 kabupaten pemekaran dari Kabupaten Ciamis yaitu Kabupaten Pangandaran berdasarkan UU Nomor 21 Tahun 2012.	

PEMENUHAN PERSYARATAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TERAKHIR PADA DAERAH OTONOM BARU MENJADI PESERTA PEMILU TAHUN 2019
PROVINSI JAWA BARAT
PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDIP)

NO.	PEMILU 2014					PEMILU 2019					KETERANGAN
	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	JML KAB/KOTA YANG DIAJUKAN	NAMA KAB/KOTA	STATUS	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	NAMA KAB/KOTA	STATUS		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	26	20	26	1 Bogor 2 Sukabumi 3 Cianjur 4 Bandung 5 Garut 6 Tasikmalaya 7 Ciamis 8 Kuningan 9 Cirebon 10 Majalengka 11 Sumedang 12 Indramayu 13 Subang 14 Purwakarta 15 Karawang 16 Bekasi 17 Bandung Barat 18 Kota Bogor 19 Kota Sukabumi 20 Kota Bandung 21 Kota Cirebon 22 Kota Bekasi 23 Kota Depok 24 Kota Cimahi 25 Kota Tasikmalaya 26 Kota Banjar	MS	27	21	1 Bogor 2 Sukabumi 3 Cianjur 4 Bandung 5 Garut 6 Tasikmalaya 7 Ciamis 8 Kuningan 9 Cirebon 10 Majalengka 11 Sumedang 12 Indramayu 13 Subang 14 Purwakarta 15 Karawang 16 Bekasi 17 Bandung Barat 18 Kota Bogor 19 Kota Sukabumi 20 Kota Bandung 21 Kota Cirebon 22 Kota Bekasi 23 Kota Depok 24 Kota Cimahi 25 Kota Tasikmalaya 26 Kota Banjar 27 Pangandaran	MS	1 Tidak dilakukan verifikasi faktual karena telah memenuhi syarat sebaran kabupaten/kota yaitu memiliki 26 kabupaten/kota yang MS dari 21 kabupaten/kota batas minimum syarat sebaran setelah terbentuknya Kabupaten Pangandaran. 2 Terdapat 1 kabupaten pemekaran dari Kabupaten Ciamis yaitu Kabupaten Pangandaran berdasarkan UU Nomor 21 Tahun 2012.	

PEMENUHAN PERSYARATAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TERAKHIR PADA DAERAH OTONOM BARU MENJADI PESERTA PEMILU TAHUN 2019
PROVINSI JAWA BARAT
PARTAI HATI NURANI RAKYAT (HANURA)

NO.	PEMILU 2014					PEMILU 2019				KETERANGAN
	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	JML KAB/KOTA YANG DIAJUKAN	NAMA KAB/KOTA	STATUS	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	NAMA KAB/KOTA	STATUS	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	26	20	26	1 Bogor 2 Sukabumi 3 Cianjur 4 Bandung 5 Garut 6 Tasikmalaya 7 Ciamis 8 Kuningan 9 Cirebon 10 Majalengka 11 Sumedang 12 Indramayu 13 Subang 14 Purwakarta 15 Karawang 16 Bekasi 17 Bandung Barat 18 Kota Bogor 19 Kota Sukabumi 20 Kota Bandung 21 Kota Cirebon 22 Kota Bekasi 23 Kota Depok 24 Kota Cimahi 25 Kota Tasikmalaya 26 Kota Banjar	MS	27	21	1 Bogor 2 Sukabumi 3 Cianjur 4 Bandung 5 Garut 6 Tasikmalaya 7 Ciamis 8 Kuningan 9 Cirebon 10 Majalengka 11 Sumedang 12 Indramayu 13 Subang 14 Purwakarta 15 Karawang 16 Bekasi 17 Bandung Barat 18 Kota Bogor 19 Kota Sukabumi 20 Kota Bandung 21 Kota Cirebon 22 Kota Bekasi 23 Kota Depok 24 Kota Cimahi 25 Kota Tasikmalaya 26 Kota Banjar 27 Pangandaran	MS	1 Tidak dilakukan verifikasi faktual karena telah memenuhi syarat sebaran kabupaten/kota yaitu memiliki 26 kabupaten/kota yang MS dari 21 kabupaten/kota batas minimum syarat sebaran setelah terbentuknya Kabupaten Pangandaran. 2 Terdapat 1 kabupaten pemekaran dari Kabupaten Ciamis yaitu Kabupaten Pangandaran berdasarkan UU Nomor 21 Tahun 2012.

PEMENUHAN PERSYARATAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TERAKHIR PADA DAERAH OTONOM BARU MENJADI PESERTA PEMILU TAHUN 2019
PROVINSI JAWA BARAT
PARTAI GOLONGAN KARYA (GOLKAR)

NO.	PEMILU 2014					PEMILU 2019					KETERANGAN
	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	JML KAB/KOTA YANG DIAJUKAN	NAMA KAB/KOTA	STATUS	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	NAMA KAB/KOTA	STATUS		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	26	20	26	1 Bogor 2 Sukabumi 3 Cianjur 4 Bandung 5 Garut 6 Tasikmalaya 7 Ciamis 8 Kuningan 9 Cirebon 10 Majalengka 11 Sumedang 12 Indramayu 13 Subang 14 Purwakarta 15 Karawang 16 Bekasi 17 Bandung Barat 18 Kota Bogor 19 Kota Sukabumi 20 Kota Bandung 21 Kota Cirebon 22 Kota Bekasi 23 Kota Depok 24 Kota Cimahi 25 Kota Tasikmalaya 26 Kota Banjar	MS	27	21	1 Bogor 2 Sukabumi 3 Cianjur 4 Bandung 5 Garut 6 Tasikmalaya 7 Ciamis 8 Kuningan 9 Cirebon 10 Majalengka 11 Sumedang 12 Indramayu 13 Subang 14 Purwakarta 15 Karawang 16 Bekasi 17 Bandung Barat 18 Kota Bogor 19 Kota Sukabumi 20 Kota Bandung 21 Kota Cirebon 22 Kota Bekasi 23 Kota Depok 24 Kota Cimahi 25 Kota Tasikmalaya 26 Kota Banjar 27 Pangandaran	MS	1 Tidak dilakukan verifikasi faktual karena telah memenuhi syarat sebaran kabupaten/kota yaitu memiliki 26 kabupaten/kota yang MS dari 21 kabupaten/kota batas minimum syarat sebaran setelah terbentuknya Kabupaten Pangandaran. 2 Terdapat 1 kabupaten pemekaran dari Kabupaten Ciamis yaitu Kabupaten Pangandaran berdasarkan UU Nomor 21 Tahun 2012.	

PEMENUHAN PERSYARATAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TERAKHIR PADA DAERAH OTONOM BARU MENJADI PESERTA PEMILU TAHUN 2019
PROVINSI JAWA BARAT
PARTAI BULAN BINTANG (PBB)

NO.	PEMILU 2014					PEMILU 2019					KETERANGAN
	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	JML KAB/KOTA YANG DIAJUKAN	NAMA KAB/KOTA	STATUS	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	NAMA KAB/KOTA	STATUS		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	26	20	26	1 Bogor 2 Sukabumi 3 Cianjur 4 Bandung 5 Garut 6 Tasikmalaya 7 Ciamis 8 Kuningan 9 Cirebon 10 Majalengka 11 Sumedang 12 Indramayu 13 Subang 14 Purwakarta 15 Karawang 16 Bekasi 17 Bandung Barat 18 Kota Bogor 19 Kota Sukabumi 20 Kota Bandung 21 Kota Cirebon 22 Kota Bekasi 23 Kota Depok 24 Kota Cimahi 25 Kota Tasikmalaya 26 Kota Banjar	MS	27	21	1 Bogor 2 Sukabumi 3 Cianjur 4 Bandung 5 Garut 6 Tasikmalaya 7 Ciamis 8 Kuningan 9 Cirebon 10 Majalengka 11 Sumedang 12 Indramayu 13 Subang 14 Purwakarta 15 Karawang 16 Bekasi 17 Bandung Barat 18 Kota Bogor 19 Kota Sukabumi 20 Kota Bandung 21 Kota Cirebon 22 Kota Bekasi 23 Kota Depok 24 Kota Cimahi 25 Kota Tasikmalaya 26 Kota Banjar 27 Pangandaran	MS	1 Tidak dilakukan verifikasi faktual karena telah memenuhi syarat sebaran kabupaten/kota yaitu memiliki 25 kabupaten/kota yang MS dari 21 kabupaten/ kota batas minimum syarat sebaran setelah terbentuknya Kabupaten Pangandaran. 2 Terdapat 1 kabupaten pemekaran dari Kabupaten Ciamis yaitu Kabupaten Pangandaran berdasarkan UU Nomor 21 Tahun 2012.	

PEMENUHAN PERSYARATAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TERAKHIR PADA DAERAH OTONOM BARU MENJADI PESERTA PEMILU TAHUN 2019
PROVINSI JAWA BARAT
PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB)

NO.	PEMILU 2014					PEMILU 2019					KETERANGAN
	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	JML KAB/KOTA YANG DIAJUKAN	NAMA KAB/KOTA	STATUS	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	NAMA KAB/KOTA	STATUS		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	26	20	26	1 Bogor 2 Sukabumi 3 Cianjur 4 Bandung 5 Garut 6 Tasikmalaya 7 Ciamis 8 Kuningan 9 Cirebon 10 Majalengka 11 Sumedang 12 Indramayu 13 Subang 14 Purwakarta 15 Karawang 16 Bekasi 17 Bandung Barat 18 Kota Bogor 19 Kota Sukabumi 20 Kota Bandung 21 Kota Cirebon 22 Kota Bekasi 23 Kota Depok 24 Kota Cimahi 25 Kota Tasikmalaya 26 Kota Banjar	MS	27	21	1 Bogor 2 Sukabumi 3 Cianjur 4 Bandung 5 Garut 6 Tasikmalaya 7 Ciamis 8 Kuningan 9 Cirebon 10 Majalengka 11 Sumedang 12 Indramayu 13 Subang 14 Purwakarta 15 Karawang 16 Bekasi 17 Bandung Barat 18 Kota Bogor 19 Kota Sukabumi 20 Kota Bandung 21 Kota Cirebon 22 Kota Bekasi 23 Kota Depok 24 Kota Cimahi 25 Kota Tasikmalaya 26 Kota Banjar 27 Pangandaran	MS	1 Tidak dilakukan verifikasi faktual karena telah memenuhi syarat sebaran kabupaten/kota yaitu memiliki 25 kabupaten/kota yang MS dari 21 kabupaten/kota batas minimum syarat sebaran setelah terbentuknya Kabupaten Pangandaran. 2 Terdapat 1 kabupaten pemekaran dari Kabupaten Ciamis yaitu Kabupaten Pangandaran berdasarkan UU Nomor 21 Tahun 2012.	

PEMENUHAN PERSYARATAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TERAKHIR PADA DAERAH OTONOM BARU MENJADI PESERTA PEMILU TAHUN 2019

PROVINSI JAWA BARAT

PARTAI KEDILAN DAN PERSATUAN INDONESIA (PKDI)

NO.	PEMILU 2014					PEMILU 2019					KETERANGAN
	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	JML KAB/KOTA YANG DIAJUKAN	NAMA KAB/KOTA	STATUS	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	NAMA KAB/KOTA	STATUS	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	26	20	26		MS	27	21		BMS	1 Dilakukan verifikasi faktual karena belum memenuhi syarat sebaran kabupaten/kota yaitu baru memiliki 20 kabupaten/kota yang MS dari 27 kabupaten/kota batas minimum syarat sebaran setelah terbentuknya Kabupaten Pangandaran.	
				1 Bogor	MS			1 Bogor		MS	2 Terdapat 1 kabupaten pemekaran dari Kabupaten Ciamis yaitu Kabupaten Pangandaran berdasarkan UU Nomor 21 Tahun 2012.
				2 Sukabumi	MS			2 Sukabumi		MS	
				3 Cianjur	TMS			3 Cianjur		TMS	
				4 Bandung	MS			4 Bandung		MS	
				5 Garut	MS			5 Garut		MS	
				6 Tasikmalaya	MS			6 Tasikmalaya		MS	
				7 Ciamis	MS			7 Ciamis		MS	
				8 Kuningan	MS			8 Kuningan		MS	
				9 Cirebon	MS			9 Cirebon		MS	
				10 Majalengka	MS			10 Majalengka		MS	
				11 Sumedang	TMS			11 Sumedang		TMS	
				12 Indramayu	TMS			12 Indramayu		TMS	
				13 Subang	TMS			13 Subang		TMS	
				14 Purwakarta	TMS			14 Purwakarta		TMS	
				15 Karawang	MS			15 Karawang		MS	
				16 Bekasi	MS			16 Bekasi		MS	
				17 Bandung Barat	MS			17 Bandung Barat		MS	
				18 Kota Bogor	MS			18 Kota Bogor		MS	
				19 Kota Sukabumi	MS			19 Kota Sukabumi		MS	
				20 Kota Bandung	MS			20 Kota Bandung		MS	
				21 Kota Cirebon	MS			21 Kota Cirebon		MS	
				22 Kota Bekasi	MS			22 Kota Bekasi		MS	
				23 Kota Depok	MS			23 Kota Depok		MS	
				24 Kota Cimahi	TMS			24 Kota Cimahi		TMS	
				25 Kota Tasikmalaya	MS			25 Kota Tasikmalaya		MS	
				26 Kota Banjar	MS			26 Kota Banjar		MS	
								27 Pangandaran			

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Desember 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

ARIEF BUDIMAN



LAMPIRAN V
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR : 227/PL.01.1-Kpt/03/KPU/XII/2017
 TENTANG KEDUDUKAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM
 TAHUN 2014 PADA DAERAH OTONOM BARU DALAM PEMENUHAN
 PERSYARATAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

PEMENUHAN PERSYARATAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TERAKHIR PADA DAERAH OTONOM BARU MENJADI PESERTA PEMILU TAHUN 2019
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PARTAI NASIONAL DEMOKRAT (NasDem)

NO.	PEMILU 2014					PEMILU 2019					KETERANGAN
	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	JML KAB/KOTA YANG DIAJUKAN	NAMA KAB/KOTA	STATUS	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	NAMA KAB/KOTA	STATUS		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	21	16	21	1 Kota Kupang 2 Kupang 3 Timor Tengah Selatan 4 Timor Tengah Utara 5 Belu 6 Alor 7 Lembata 8 Flores Timur 9 Sikka 10 Ende 11 Nagekeo 12 Ngada 13 Manggarai Timur 14 Manggarai 15 Manggarai Barat 16 Sumba Timur 17 Sumba Tengah 18 Sumba Barat 19 Sumba Barat Daya 20 Rote Ndao 21 Sabu Raijua	MS	22	17	1 Kota Kupang 2 Kupang 3 Timor Tengah Selatan 4 Timor Tengah Utara 5 Belu 6 Alor 7 Lembata 8 Flores Timur 9 Sikka 10 Ende 11 Nagekeo 12 Ngada 13 Manggarai Timur 14 Manggarai 15 Manggarai Barat 16 Sumba Timur 17 Sumba Tengah 18 Sumba Barat 19 Sumba Barat Daya 20 Rote Ndao 21 Sabu Raijua 22 Malaka	MS	1 Tidak dilakukan verifikasi faktual karena masih memenuhi syarat sebaran kabupaten/kota yaitu 21 kabupaten/kota dari 17 kabupaten/kota batas minimum syarat sebaran setelah terbentuknya Kabupaten Malaka. 2 Terdapat satu kabupaten pemekaran dari Kabupaten Belu yaitu Kabupaten Malaka berdasarkan UU Nomor 3 Tahun 2013.	

PEMENUHAN PERSYARATAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TERAKHIR PADA DAERAH OTONOM BARU MENJADI PESERTA PEMILU TAHUN 2019
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PARTAI DEMOKRAT

NO.	PEMILU 2014					PEMILU 2019				KETERANGAN
	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	JML KAB/KOTA YANG DIAJUKAN	NAMA KAB/KOTA	STATUS	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	NAMA KAB/KOTA	STATUS	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	21	16	21	1 Kota Kupang 2 Kupang 3 Timor Tengah Selatan 4 Timor Tengah Utara 5 Belu 6 Alor 7 Lembata 8 Flores Timur 9 Sikka 10 Ende 11 Nagekeo 12 Ngada 13 Manggarai Timur 14 Manggarai 15 Manggarai Barat 16 Sumba Timur 17 Sumba Tengah 18 Sumba Barat 19 Sumba Barat Daya 20 Rote Ndao 21 Sabu Raijua	MS	22	17	1 Kota Kupang 2 Kupang 3 Timor Tengah Selatan 4 Timor Tengah Utara 5 Belu 6 Alor 7 Lembata 8 Flores Timur 9 Sikka 10 Ende 11 Nagekeo 12 Ngada 13 Manggarai Timur 14 Manggarai 15 Manggarai Barat 16 Sumba Timur 17 Sumba Tengah 18 Sumba Barat 19 Sumba Barat Daya 20 Rote Ndao 21 Sabu Raijua 22 Malaka	MS	1 Tidak dilakukan verifikasi faktual karena masih memenuhi syarat sebaran kabupaten/kota yaitu 20 kabupaten/kota dari 17 kabupaten/kota batas minimum syarat sebaran setelah terbentuknya Kabupaten Malaka. 2 Terdapat satu kabupaten pemekaran dari Kabupaten Belu yaitu Kabupaten Malaka berdasarkan UU Nomor 3 Tahun 2013.

**PEMENUHAN PERSYARATAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TERAKHIR PADA DAERAH OTONOM BARU MENJADI PESERTA PEMILU TAHUN 2019
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS)**

PEMENUHAN PERSYARATAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TERAKHIR PADA DAERAH OTONOM BARU MENJADI PESERTA PEMILU TAHUN 2019
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN)

NO.	PEMILU 2014					PEMILU 2019				KETERANGAN
	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	JML KAB/KOTA YANG DIAJUKAN	NAMA KAB/KOTA	STATUS	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	NAMA KAB/KOTA	STATUS	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	21	16	21	1 Kota Kupang 2 Kupang 3 Timor Tengah Selatan 4 Timor Tengah Utara 5 Belu 6 Alor 7 Lembata 8 Flores Timur 9 Sikka 10 Ende 11 Nagekeo 12 Ngada 13 Manggarai Timur 14 Manggarai 15 Manggarai Barat 16 Sumba Timur 17 Sumba Tengah 18 Sumba Barat 19 Sumba Barat Daya 20 Rote Ndao 21 Sabu Raijua	MS	22	17	1 Kota Kupang 2 Kupang 3 Timor Tengah Selatan 4 Timor Tengah Utara 5 Belu 6 Alor 7 Lembata 8 Flores Timur 9 Sikka 10 Ende 11 Nagekeo 12 Ngada 13 Manggarai Timur 14 Manggarai 15 Manggarai Barat 16 Sumba Timur 17 Sumba Tengah 18 Sumba Barat 19 Sumba Barat Daya 20 Rote Ndao 21 Sabu Raijua 22 Malaka	MS	1 Tidak dilakukan verifikasi faktual karena masih memenuhi syarat sebaran kabupaten/kota yaitu 21 kabupaten/kota dari 17 kabupaten/kota batas minimum syarat sebaran setelah terbentuknya Kabupaten Malaka. 2 Terdapat satu kabupaten pemekaran dari Kabupaten Belu yaitu Kabupaten Malaka berdasarkan UU Nomor 3 Tahun 2013.

**PEMENUHAN PERSYARATAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TERAKHIR PADA DAERAH OTONOM BARU MENJADI PESERTA PEMILU TAHUN 2019
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP)**

PEMENUHAN PERSYARATAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TERAKHIR PADA DAERAH OTONOM BARU MENJADI PESERTA PEMILU TAHUN 2019
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)

NO.	PEMILU 2014					PEMILU 2019				KETERANGAN
	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	JML KAB/KOTA YANG DIAJUKAN	NAMA KAB/KOTA	STATUS	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	NAMA KAB/KOTA	STATUS	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	21	16	21	1 Kota Kupang 2 Kupang 3 Timor Tengah Selatan 4 Timor Tengah Utara 5 Belu 6 Alor 7 Lembata 8 Flores Timur 9 Sikka 10 Ende 11 Nagekeo 12 Ngada 13 Manggarai Timur 14 Manggarai 15 Manggarai Barat 16 Sumba Timur 17 Sumba Tengah 18 Sumba Barat 19 Sumba Barat Daya 20 Rote Ndao 21 Sabu Raijua	MS	22	17	1 Kota Kupang 2 Kupang 3 Timor Tengah Selatan 4 Timor Tengah Utara 5 Belu 6 Alor 7 Lembata 8 Flores Timur 9 Sikka 10 Ende 11 Nagekeo 12 Ngada 13 Manggarai Timur 14 Manggarai 15 Manggarai Barat 16 Sumba Timur 17 Sumba Tengah 18 Sumba Barat 19 Sumba Barat Daya 20 Rote Ndao 21 Sabu Raijua 22 Malaka	MS	1 Tidak dilakukan verifikasi faktual karena masih memenuhi syarat sebaran kabupaten/kota yaitu 21 kabupaten/kota dari 17 kabupaten/kota batas minimum syarat sebaran setelah terbentuknya Kabupaten Malaka. 2 Terdapat satu kabupaten pemekaran dari Kabupaten Belu yaitu Kabupaten Malaka berdasarkan UU Nomor 3 Tahun 2013.

PEMENUHAN PERSYARATAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TERAKHIR PADA DAERAH OTONOM BARU MENJADI PESERTA PEMILU TAHUN 2019
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDIP)

NO.	PEMILU 2014					PEMILU 2019				KETERANGAN
	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	JML KAB/KOTA YANG DIAJUKAN	NAMA KAB/KOTA	STATUS	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	NAMA KAB/KOTA	STATUS	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	21	16	21	1 Kota Kupang 2 Kupang 3 Timor Tengah Selatan 4 Timor Tengah Utara 5 Belu 6 Alor 7 Lembata 8 Flores Timur 9 Sikka 10 Ende 11 Nagekeo 12 Ngada 13 Manggarai Timur 14 Manggarai 15 Manggarai Barat 16 Sumba Timur 17 Sumba Tengah 18 Sumba Barat 19 Sumba Barat Daya 20 Rote Ndao 21 Sabu Raijua	MS	22	17	1 Kota Kupang 2 Kupang 3 Timor Tengah Selatan 4 Timor Tengah Utara 5 Belu 6 Alor 7 Lembata 8 Flores Timur 9 Sikka 10 Ende 11 Nagekeo 12 Ngada 13 Manggarai Timur 14 Manggarai 15 Manggarai Barat 16 Sumba Timur 17 Sumba Tengah 18 Sumba Barat 19 Sumba Barat Daya 20 Rote Ndao 21 Sabu Raijua 22 Malaka	MS	1 Tidak dilakukan verifikasi faktual karena masih memenuhi syarat sebaran kabupaten/kota yaitu 21 kabupaten/kota dari 17 kabupaten/kota batas minimum syarat sebaran setelah terbentuknya Kabupaten Malaka. 2 Terdapat satu kabupaten pemekaran dari Kabupaten Belu yaitu Kabupaten Malaka berdasarkan UU Nomor 3 Tahun 2013.

PEMENUHAN PERSYARATAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TERAKHIR PADA DAERAH OTONOM BARU MENJADI PESERTA PEMILU TAHUN 2019
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PARTAI HATI NURANI RAKYAT (HANURA)

NO.	PEMILU 2014					PEMILU 2019					KETERANGAN
	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	JML KAB/KOTA YANG DIAJUKAN	NAMA KAB/KOTA	STATUS	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	NAMA KAB/KOTA	STATUS		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	21	16	21	1 Kota Kupang 2 Kupang 3 Timor Tengah Selatan 4 Timor Tengah Utara 5 Belu 6 Alor 7 Lembata 8 Flores Timur 9 Sikka 10 Ende 11 Nagekeo 12 Ngada 13 Manggarai Timur 14 Manggarai 15 Manggarai Barat 16 Sumba Timur 17 Sumba Tengah 18 Sumba Barat 19 Sumba Barat Daya 20 Rote Ndao 21 Sabu Raijua	MS	22	17	1 Kota Kupang 2 Kupang 3 Timor Tengah Selatan 4 Timor Tengah Utara 5 Belu 6 Alor 7 Lembata 8 Flores Timur 9 Sikka 10 Ende 11 Nagekeo 12 Ngada 13 Manggarai Timur 14 Manggarai 15 Manggarai Barat 16 Sumba Timur 17 Sumba Tengah 18 Sumba Barat 19 Sumba Barat Daya 20 Rote Ndao 21 Sabu Raijua 22 Malaka	MS	1 Tidak dilakukan verifikasi faktual karena masih memenuhi syarat sebaran kabupaten/kota yaitu 21 kabupaten/kota dari 17 kabupaten/kota batas minimum syarat sebaran setelah terbentuknya Kabupaten Malaka. 2 Terdapat satu kabupaten pemekaran dari Kabupaten Belu yaitu Kabupaten Malaka berdasarkan UU Nomor 3 Tahun 2013.	

PEMENUHAN PERSYARATAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TERAKHIR PADA DAERAH OTONOM BARU MENJADI PESERTA PEMILU TAHUN 2019
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PARTAI GOLONGAN KARYA (GOLKAR)

NO.	PEMILU 2014					PEMILU 2019				KETERANGAN
	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	JML KAB/KOTA YANG DIAJUKAN	NAMA KAB/KOTA	STATUS	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	NAMA KAB/KOTA	STATUS	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	21	16	21	1 Kota Kupang 2 Kupang 3 Timor Tengah Selatan 4 Timor Tengah Utara 5 Belu 6 Alor 7 Lembata 8 Flores Timur 9 Sikka 10 Ende 11 Nagekeo 12 Ngada 13 Manggarai Timur 14 Manggarai 15 Manggarai Barat 16 Sumba Timur 17 Sumba Tengah 18 Sumba Barat 19 Sumba Barat Daya 20 Rote Ndao 21 Sabu Raijua	MS	22	17	1 Kota Kupang 2 Kupang 3 Timor Tengah Selatan 4 Timor Tengah Utara 5 Belu 6 Alor 7 Lembata 8 Flores Timur 9 Sikka 10 Ende 11 Nagekeo 12 Ngada 13 Manggarai Timur 14 Manggarai 15 Manggarai Barat 16 Sumba Timur 17 Sumba Tengah 18 Sumba Barat 19 Sumba Barat Daya 20 Rote Ndao 21 Sabu Raijua 22 Malaka	MS	1 Tidak dilakukan verifikasi faktual karena masih memenuhi syarat sebaran kabupaten/kota yaitu 21 kabupaten/kota dari 17 kabupaten/kota batas minimum syarat sebaran setelah terbentuknya Kabupaten Malaka. 2 Terdapat satu kabupaten pemekaran dari Kabupaten Belu yaitu Kabupaten Malaka berdasarkan UU Nomor 3 Tahun 2013.

PEMENUHAN PERSYARATAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TERAKHIR PADA DAERAH OTONOM BARU MENJADI PESERTA PEMILU TAHUN 2019
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PARTAI BULAN BINTANG (PBB)

NO.	PEMILU 2014					PEMILU 2019					KETERANGAN
	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	JML KAB/KOTA YANG DIAJUKAN	NAMA KAB/KOTA	STATUS	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	NAMA KAB/KOTA	STATUS		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	21	16	21	1 Kota Kupang 2 Kupang 3 Timor Tengah Selatan 4 Timor Tengah Utara 5 Belu 6 Alor 7 Lembata 8 Flores Timur 9 Sikka 10 Ende 11 Nagekeo 12 Ngada 13 Manggarai Timur 14 Manggarai 15 Manggarai Barat 16 Sumba Timur 17 Sumba Tengah 18 Sumba Barat 19 Sumba Barat Daya 20 Rote Ndao 21 Sabu Raijua	MS	22	17	1 Kota Kupang 2 Kupang 3 Timor Tengah Selatan 4 Timor Tengah Utara 5 Belu 6 Alor 7 Lembata 8 Flores Timur 9 Sikka 10 Ende 11 Nagekeo 12 Ngada 13 Manggarai Timur 14 Manggarai 15 Manggarai Barat 16 Sumba Timur 17 Sumba Tengah 18 Sumba Barat 19 Sumba Barat Daya 20 Rote Ndao 21 Sabu Raijua 22 Malaka	BMS	1 dilakukan verifikasi faktual karena belum memenuhi syarat sebaran kabupaten/kota yaitu baru memiliki 16 kabupaten/kota dari 17 kabupaten/kota batas minimum syarat sebaran setelah terbentuknya Kabupaten Malaka. 2 Terdapat satu kabupaten pemekaran dari Kabupaten Belu yaitu Kabupaten Malaka berdasarkan UU Nomor 3 Tahun 2013.	

PEMENUHAN PERSYARATAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TERAKHIR PADA DAERAH OTONOM BARU MENJADI PESERTA PEMILU TAHUN 2019
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB)

NO.	PEMILU 2014					PEMILU 2019				KETERANGAN
	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	JML KAB/KOTA YANG DIAJUKAN	NAMA KAB/KOTA	STATUS	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	NAMA KAB/KOTA	STATUS	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	21	16	21	1 Kota Kupang 2 Kupang 3 Timor Tengah Selatan 4 Timor Tengah Utara 5 Belu 6 Alor 7 Lembata 8 Flores Timur 9 Sikka 10 Ende 11 Nagekeo 12 Ngada 13 Manggarai Timur 14 Manggarai 15 Manggarai Barat 16 Sumba Timur 17 Sumba Tengah 18 Sumba Barat 19 Sumba Barat Daya 20 Rote Ndao 21 Sabu Raijua	MS	22	17	1 Kota Kupang 2 Kupang 3 Timor Tengah Selatan 4 Timor Tengah Utara 5 Belu 6 Alor 7 Lembata 8 Flores Timur 9 Sikka 10 Ende 11 Nagekeo 12 Ngada 13 Manggarai Timur 14 Manggarai 15 Manggarai Barat 16 Sumba Timur 17 Sumba Tengah 18 Sumba Barat 19 Sumba Barat Daya 20 Rote Ndao 21 Sabu Raijua 22 Malaka	MS	1 Tidak dilakukan verifikasi faktual karena masih memenuhi syarat sebaran kabupaten/kota yaitu 19 kabupaten/kota dari 17 kabupaten/kota batas minimum syarat sebaran setelah terbentuknya Kabupaten Malaka. 2 Terdapat satu kabupaten pemekaran dari Kabupaten Belu yaitu Kabupaten Malaka berdasarkan UU Nomor 3 Tahun 2013.

PEMENUHAN PERSYARATAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TERAKHIR PADA DAERAH OTONOM BARU MENJADI PESERTA PEMILU TAHUN 2019

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PARTAI KEDILAN DAN PERSATUAN INDONESIA (PKPI)

NO.	PEMILU 2014					PEMILU 2019					KETERANGAN
	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	JML KAB/KOTA YANG DIAJUKAN	NAMA KAB/KOTA	STATUS	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	NAMA KAB/KOTA	STATUS		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	21	16	21		MS	22	17		MS		
				1 Kota Kupang	MS			1 Kota Kupang	MS	1 Tidak dilakukan verifikasi faktual karena masih memenuhi syarat sebaran kabupaten/kota yaitu 18 kabupaten/kota dari 17 kabupaten/kota batas minimum syarat sebaran setelah terbentuknya Kabupaten Malaka.	
				2 Kupang	MS			2 Kupang	MS		
				3 Timor Tengah Selatan	MS			3 Timor Tengah Selatan	MS		
				4 Timor Tengah Utara	MS			4 Timor Tengah Utara	MS		
				5 Belu	MS			5 Belu	MS		
				6 Alor	MS			6 Alor	MS		
				7 Lembata	MS			7 Lembata	MS		
				8 Flores Timur	TMS			8 Flores Timur	TMS		
				9 Sikka	-			9 Sikka	-		
				10 Ende	MS			10 Ende	MS		
				11 Nagekeo	MS			11 Nagekeo	MS		
				12 Ngada	MS			12 Ngada	MS		
				13 Manggarai Timur	MS			13 Manggarai Timur	MS		
				14 Manggarai	MS			14 Manggarai	MS		
				15 Manggarai Barat	MS			15 Manggarai Barat	MS		
				16 Sumba Timur	-			16 Sumba Timur	-		
				17 Sumba Tengah	MS			17 Sumba Tengah	MS		
				18 Sumba Barat	MS			18 Sumba Barat	MS		
				19 Sumba Barat Daya	MS			19 Sumba Barat Daya	MS		
				20 Rote Ndao	MS			20 Rote Ndao	MS		
				21 Sabu Raijua	MS			21 Sabu Raijua	MS		
								22 Malaka			

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Desember 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

ARIEF BUDIMAN



Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

Kepala Biro Hukum,

[Handwritten signature]

Sigit Joyowardono

LAMPIRAN VI
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR : 227/PL.01.1-Kpt/03/KPU/XII/2017
 TENTANG KEDUDUKAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM
 TAHUN 2014 PADA DAERAH OTONOM BARU DALAM PEMENUHAN
 PERSYARATAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

PEMENUHAN PERSYARATAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TERAKHIR PADA DAERAH OTONOM BARU MENJADI PESERTA PEMILU TAHUN 2019
PROVINSI SULAWESI BARAT
PARTAI NASIONAL DEMOKRAT (NasDem)

NO.	PEMILU 2014					PEMILU 2019					KETERANGAN
	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	JML KAB/KOTA YANG DIAJUKAN	NAMA KAB/KOTA	STATUS	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	NAMA KAB/KOTA	STATUS		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	5	4	5	1 Mamuju 2 Majene 3 Polman 4 Mamasa 5 Mamuju Utara	MS	6	5	1 Mamuju 2 Majene 3 Polman 4 Mamasa 5 Mamuju Utara 6 Mamuju Tengah	MS	1 Tidak dilakukan verifikasi faktual karena masih memenuhi syarat sebaran kabupaten/kota yaitu 5 kabupaten/kota dari 5 kabupaten/kota batas minimum syarat sebaran setelah terbentuknya Kabupaten Mamuju Tengah. 2 Terdapat 1 kabupaten pemekaran dari Kabupaten Mamuju yaitu Kabupaten Mamuju Tengah berdasarkan UU Nomor 4 Tahun 2013.	

PEMENUHAN PERSYARATAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TERAKHIR PADA DAERAH OTONOM BARU MENJADI PESERTA PEMILU TAHUN 2019
PROVINSI SULAWESI BARAT
PARTAI DEMOKRAT

NO.	PEMILU 2014					PEMILU 2019					KETERANGAN
	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	JML KAB/KOTA YANG DIAJUKAN	NAMA KAB/KOTA	STATUS	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	NAMA KAB/KOTA	STATUS		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	5	4	5	1 Mamuju 2 Majene 3 Polman 4 Mamasa 5 Mamuju Utara	MS	6	5	1 Mamuju 2 Majene 3 Polman 4 Mamasa 5 Mamuju Utara 6 Mamuju Tengah	MS	1 Tidak dilakukan verifikasi faktual karena masih memenuhi syarat sebaran kabupaten/kota yaitu 5 kabupaten/kota dari 5 kabupaten/kota batas minimum syarat sebaran setelah terbentuknya Kabupaten Mamuju Tengah. 2 Terdapat 1 kabupaten pemekaran dari Kabupaten Mamuju yaitu Kabupaten Mamuju Tengah berdasarkan UU Nomor 4 Tahun 2013.	

PEMENUHAN PERSYARATAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TERAKHIR PADA DAERAH OTONOM BARU MENJADI PESERTA PEMILU TAHUN 2019
PROVINSI SULAWESI BARAT
PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS)

NO.	PEMILU 2014					PEMILU 2019					KETERANGAN
	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	JML KAB/KOTA YANG DIAJUKAN	NAMA KAB/KOTA	STATUS	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	NAMA KAB/KOTA	STATUS		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	5	4	5	1 Mamuju 2 Majene 3 Polman 4 Mamasa 5 Mamuju Utara	MS MS MS - MS	6	5	1 Mamuju 2 Majene 3 Polman 4 Mamasa 5 Mamuju Utara 6 Mamuju Tengah	BMS MS MS MS - MS	1 Dilakukan verifikasi faktual karena belum memenuhi syarat sebaran kabupaten/kota yaitu baru memiliki 4 kabupaten/kota yang MS dari 5 kabupaten/kota batas minimum syarat sebaran setelah terbentuknya Kabupaten Mamuju Tengah. 2 Terdapat 1 kabupaten pemekaran dari Kabupaten Mamuju yaitu Kabupaten Mamuju Tengah berdasarkan UU Nomor 4 Tahun 2013.	

PEMENUHAN PERSYARATAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TERAKHIR PADA DAERAH OTONOM BARU MENJADI PESERTA PEMILU TAHUN 2019
PROVINSI SULAWESI BARAT
PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN)

NO.	PEMILU 2014					PEMILU 2019					KETERANGAN
	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	JML KAB/KOTA YANG DIAJUKAN	NAMA KAB/KOTA	STATUS	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	NAMA KAB/KOTA	STATUS		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	5	4	5	1 Mamuju 2 Majene 3 Polman 4 Mamasa 5 Mamuju Utara	MS	6	5	1 Mamuju 2 Majene 3 Polman 4 Mamasa 5 Mamuju Utara 6 Mamuju Tengah	MS	1 Tidak dilakukan verifikasi faktual karena masih memenuhi syarat sebaran kabupaten/kota yaitu 5 kabupaten/kota dari 5 kabupaten/kota batas minimum syarat sebaran setelah terbentuknya Kabupaten Mamuju Tengah. 2 Terdapat 1 kabupaten pemekaran dari Kabupaten Mamuju yaitu Kabupaten Mamuju Tengah berdasarkan UU Nomor 4 Tahun 2013.	

PEMENUHAN PERSYARATAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TERAKHIR PADA DAERAH OTONOM BARU MENJADI PESERTA PEMILU TAHUN 2019
PROVINSI SULAWESI BARAT
PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP)

NO.	PEMILU 2014					PEMILU 2019					KETERANGAN
	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	JML KAB/KOTA YANG DIAJUKAN	NAMA KAB/KOTA	STATUS	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	NAMA KAB/KOTA	STATUS		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	5	4	5	1 Mamuju 2 Majene 3 Polman 4 Mamasan 5 Mamuju Utara	MS	6	5	1 Mamuju 2 Majene 3 Polman 4 Mamasan 5 Mamuju Utara 6 Mamuju Tengah	MS	1 Tidak dilakukan verifikasi faktual karena masih memenuhi syarat sebaran kabupaten/kota yaitu 5 kabupaten/kota dari 5 kabupaten/kota batas minimum syarat sebaran setelah terbentuknya Kabupaten Mamuju Tengah. 2 Terdapat 1 kabupaten pemekaran dari Kabupaten Mamuju yaitu Kabupaten Mamuju Tengah berdasarkan UU Nomor 4 Tahun 2013.	

PEMENUHAN PERSYARATAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TERAKHIR PADA DAERAH OTONOM BARU MENJADI PESERTA PEMILU TAHUN 2019
PROVINSI SULAWESI BARAT
PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)

NO.	PEMILU 2014					PEMILU 2019					KETERANGAN
	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	JML KAB/KOTA YANG DIAJUKAN	NAMA KAB/KOTA	STATUS	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	NAMA KAB/KOTA	STATUS		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	5	4	5	1 Mamuju 2 Majene 3 Polman 4 Mamasa 5 Mamuju Utara	MS	6	5	1 Mamuju 2 Majene 3 Polman 4 Mamasa 5 Mamuju Utara 6 Mamuju Tengah	MS	1 Tidak dilakukan verifikasi faktual karena masih memenuhi syarat sebaran kabupaten/kota yaitu 5 kabupaten/kota dari 5 kabupaten/kota batas minimum syarat sebaran setelah terbentuknya Kabupaten Mamuju Tengah. 2 Terdapat 1 kabupaten pemekaran dari Kabupaten Mamuju yaitu Kabupaten Mamuju Tengah berdasarkan UU Nomor 4 Tahun 2013.	

PEMENUHAN PERSYARATAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TERAKHIR PADA DAERAH OTONOM BARU MENJADI PESERTA PEMILU TAHUN 2019
PROVINSI SULAWESI BARAT
PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDIP)

NO.	PEMILU 2014					PEMILU 2019					KETERANGAN
	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	JML KAB/KOTA YANG DIAJUKAN	NAMA KAB/KOTA	STATUS	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	NAMA KAB/KOTA	STATUS		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	5	4	5	1 Mamuju 2 Majene 3 Polman 4 Mamasa 5 Mamuju Utara	MS MS MS MS TMS MS	6	5	1 Mamuju 2 Majene 3 Polman 4 Mamasa 5 Mamuju Utara 6 Mamuju Tengah	BMS MS MS MS TMS MS	1 Dilakukan verifikasi faktual karena belum memenuhi syarat sebaran kabupaten/kota yaitu baru memiliki 4 kabupaten/kota yang MS dari 5 kabupaten/kota batas minimum syarat sebaran setelah terbentuknya Kabupaten Mamuju Tengah. 2 Terdapat 1 kabupaten pemekaran dari Kabupaten Mamuju yaitu Kabupaten Mamuju Tengah berdasarkan UU Nomor 4 Tahun 2013.	

PEMENUHAN PERSYARATAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TERAKHIR PADA DAERAH OTONOM BARU MENJADI PESERTA PEMILU TAHUN 2019
PROVINSI SULAWESI BARAT
PARTAI HATI NURANI RAKYAT (HANURA)

NO.	PEMILU 2014					PEMILU 2019					KETERANGAN
	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	JML KAB/KOTA YANG DIAJUKAN	NAMA KAB/KOTA	STATUS	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	NAMA KAB/KOTA	STATUS		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	5	4	5	1 Mamuju 2 Majene 3 Polman 4 Mamasa 5 Mamuju Utara	MS	6	5	1 Mamuju 2 Majene 3 Polman 4 Mamasa 5 Mamuju Utara 6 Mamuju Tengah	MS	1 Tidak dilakukan verifikasi faktual karena masih memenuhi syarat sebaran kabupaten/kota yaitu 5 kabupaten/kota dari 5 kabupaten/kota batas minimum syarat sebaran setelah terbentuknya Kabupaten Mamuju Tengah. 2 Terdapat 1 kabupaten pemekaran dari Kabupaten Mamuju yaitu Kabupaten Mamuju Tengah berdasarkan UU Nomor 4 Tahun 2013.	

PEMENUHAN PERSYARATAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TERAKHIR PADA DAERAH OTONOM BARU MENJADI PESERTA PEMILU TAHUN 2019
PROVINSI SULAWESI BARAT
PARTAI GOLONGAN KARYA (GOLKAR)

NO.	PEMILU 2014					PEMILU 2019					KETERANGAN
	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	JML KAB/KOTA YANG DIAJUKAN	NAMA KAB/KOTA	STATUS	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	NAMA KAB/KOTA	STATUS		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	5	4	5	1 Mamuju 2 Majene 3 Polman 4 Mamasa 5 Mamuju Utara	MS	6	5	1 Mamuju 2 Majene 3 Polman 4 Mamasa 5 Mamuju Utara 6 Mamuju Tengah	MS	1 Tidak dilakukan verifikasi faktual karena masih memenuhi syarat sebaran kabupaten/kota yaitu 5 kabupaten/kota dari 5 kabupaten/kota batas minimum syarat sebaran setelah terbentuknya Kabupaten Mamuju Tengah. 2 Terdapat 1 kabupaten pemekaran dari Kabupaten Mamuju yaitu Kabupaten Mamuju Tengah berdasarkan UU Nomor 4 Tahun 2013.	

PEMENUHAN PERSYARATAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TERAKHIR PADA DAERAH OTONOM BARU MENJADI PESERTA PEMILU TAHUN 2019
PROVINSI SULAWESI BARAT
PARTAI BULAN BINTANG (PBB)

NO.	PEMILU 2014					PEMILU 2019					KETERANGAN
	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	JML KAB/KOTA YANG DIAJUKAN	NAMA KAB/KOTA	STATUS	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	NAMA KAB/KOTA	STATUS		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	5	4	5	1 Mamuju 2 Majene 3 Polman 4 Mamasa 5 Mamuju Utara	MS	6	5	1 Mamuju 2 Majene 3 Polman 4 Mamasa 5 Mamuju Utara 6 Mamuju Tengah	MS	1 Tidak dilakukan verifikasi faktual karena masih memenuhi syarat sebaran kabupaten/kota yaitu 5 kabupaten/kota dari 5 kabupaten/kota batas minimum syarat sebaran setelah terbentuknya Kabupaten Mamuju Tengah. 2 Terdapat 1 kabupaten pemekaran dari Kabupaten Mamuju yaitu Kabupaten Mamuju Tengah berdasarkan UU Nomor 4 Tahun 2013.	

PEMENUHAN PERSYARATAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TERAKHIR PADA DAERAH OTONOM BARU MENJADI PESERTA PEMILU TAHUN 2019
PROVINSI SULAWESI BARAT
PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB)

NO.	PEMILU 2014					PEMILU 2019				KETERANGAN
	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	JML KAB/KOTA YANG DIAJUKAN	NAMA KAB/KOTA	STATUS	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	NAMA KAB/KOTA	STATUS	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	5	4	5	1 Mamuju 2 Majene 3 Polman 4 Mamasas 5 Mamuju Utara	MS	6	5	1 Mamuju 2 Majene 3 Polman 4 Mamasas 5 Mamuju Utara 6 Mamuju Tengah	MS	<p>1 Tidak dilakukan verifikasi faktual karena masih memenuhi syarat sebaran kabupaten/kota yaitu 5 kabupaten/kota dari 5 kabupaten/kota batas minimum syarat sebaran setelah terbentuknya Kabupaten Mamuju Tengah.</p> <p>2 Terdapat 1 kabupaten pemekaran dari Kabupaten Mamuju yaitu Kabupaten Mamuju Tengah berdasarkan UU Nomor 4 Tahun 2013.</p>

PEMENUHAN PERSYARATAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TERAKHIR PADA DAERAH OTONOM BARU MENJADI PESERTA PEMILU TAHUN 2019
PROVINSI SULAWESI BARAT
PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA (PKPI)

NO.	PEMILU 2014					PEMILU 2019					KETERANGAN
	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	JML KAB/KOTA YANG DIAJUKAN	NAMA KAB/KOTA	STATUS	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	NAMA KAB/KOTA	STATUS	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	5	4	5	1 Mamuju 2 Majene 3 Polman 4 Mamasa 5 Mamuju Utara	MS	6	5	1 Mamuju 2 Majene 3 Polman 4 Mamasa 5 Mamuju Utara 6 Mamuju Tengah	MS	1 Tidak dilakukan verifikasi faktual karena masih memenuhi syarat sebaran kabupaten/kota yaitu 5 kabupaten/kota dari 5 kabupaten/kota batas minimum syarat sebaran setelah terbentuknya Kabupaten Mamuju Tengah. 2 Terdapat 1 kabupaten pemekaran dari Kabupaten Mamuju yaitu Kabupaten Mamuju Tengah berdasarkan UU Nomor 4 Tahun 2013.	

Ditetapkan di Jakarta
 pada tanggal 11 Desember 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 REPUBLIK INDONESIA

ttd.

ARIEF BUDIMAN

Salinan sesuai aslinya
 SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM
 REPUBLIK INDONESIA

Kepala Biro Hukum,

Sigit Joyowardono



LAMPIRAN VII
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR : 227/PL.01.1-Kpt/03/KPU/XII/2017
 TENTANG KEDUDUKAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN
 2014 PADA DAERAH OTONOM BARU DALAM PEMENUHAN PERSYARATAN
 PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

PEMENUHAN PERSYARATAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TERAKHIR PADA DAERAH OTONOM BARU MENJADI PESERTA PEMILU TAHUN 2019
PROVINSI SULAWESI TENGAH
PARTAI NASIONAL DEMOKRAT (NasDem)

NO.	PEMILU 2014				PEMILU 2019				KETERANGAN	
	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	JML KAB/KOTA YANG DIAJUKAN	NAMA KAB/KOTA	STATUS	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	NAMA KAB/KOTA	STATUS	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	11	8	11	1 Kota Palu 2 Donggala 3 Poso 4 Morowali 5 Tojo Una-Una 6 Banggai 7 Banggai Kepulauan 8 Tolitoli 9 Buol 10 Sigi 11 Parigi Moutong	MS	13	10	1 Kota Palu 2 Donggala 3 Poso 4 Morowali 5 Tojo Una-Una 6 Banggai 7 Banggai Kepulauan 8 Tolitoli 9 Buol 10 Sigi 11 Parigi Moutong 12 Banggai Laut 13 Morowali Utara	MS	1 Tidak dilakukan verifikasi faktual karena masih memenuhi syarat sebaran kabupaten/kota yaitu 11 kabupaten/kota dari 10 kabupaten/kota batas minimum syarat sebaran setelah terbentuknya Kabupaten Banggai Laut dan Kabupaten Morowali Utara. 2 Terdapat 2 kabupaten pemekaran dari Kabupaten Banggai Kepulauan yaitu Kabupaten Banggai Laut berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 2013 dan dari Kabupaten Morowali yaitu Kabupaten Morowali Utara berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2013.

PEMENUHAN PERSYARATAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TERAKHIR PADA DAERAH OTONOM BARU MENJADI PESERTA PEMILU TAHUN 2019
PROVINSI SULAWESI TENGAH
PARTAI DEMOKRAT

NO.	PEMILU 2014					PEMILU 2019					KETERANGAN
	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	JML KAB/KOTA YANG DIAJUKAN	NAMA KAB/KOTA	STATUS	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	NAMA KAB/KOTA	STATUS		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	11	8	11	1 Kota Palu 2 Donggala 3 Poso 4 Morowali 5 Tojo Una-Una 6 Banggai 7 Banggai Kepulauan 8 Tolitoli 9 Buol 10 Sigi 11 Parigi Moutong	MS	13	10	1 Kota Palu 2 Donggala 3 Poso 4 Morowali 5 Tojo Una-Una 6 Banggai 7 Banggai Kepulauan 8 Tolitoli 9 Buol 10 Sigi 11 Parigi Moutong 12 Banggai Laut 13 Morowali Utara	MS	1 Tidak dilakukan verifikasi faktual karena masih memenuhi syarat sebaran kabupaten/kota yaitu 11 kabupaten/kota dari 10 kabupaten/kota batas minimum syarat sebaran setelah terbentuknya Kabupaten Banggai Laut dan Kabupaten Morowali Utara. 2 Terdapat 2 kabupaten pemekaran dari Kabupaten Banggai Kepulauan yaitu Kabupaten Banggai Laut berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 2013 dan dari Kabupaten Morowali yaitu Kabupaten Morowali Utara berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2013.	

PEMENUHAN PERSYARATAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TERAKHIR PADA DAERAH OTONOM BARU MENJADI PESERTA PEMILU TAHUN 2019
PROVINSI SULAWESI TENGAH
PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS)

NO.	PEMILU 2014					PEMILU 2019					KETERANGAN
	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	JML KAB/KOTA YANG DIAJUKAN	NAMA KAB/KOTA	STATUS	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	NAMA KAB/KOTA	STATUS		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	11	8	11	1 Kota Palu 2 Donggala 3 Poso 4 Morowali 5 Tojo Una-Una 6 Banggai 7 Banggai Kepulauan 8 Tolitoli 9 Buol 10 Sigi 11 Parigi Moutong	MS	13	10	1 Kota Palu 2 Donggala 3 Poso 4 Morowali 5 Tojo Una-Una 6 Banggai 7 Banggai Kepulauan 8 Tolitoli 9 Buol 10 Sigi 11 Parigi Moutong 12 Banggai Laut 13 Morowali Utara	MS	1 Tidak dilakukan verifikasi faktual karena masih memenuhi syarat sebaran kabupaten/kota yaitu 11 kabupaten/kota dari 10 kabupaten/kota batas minimum syarat sebaran setelah terbentuknya Kabupaten Banggai Laut dan Kabupaten Morowali Utara. 2 Terdapat 2 kabupaten pemekaran dari Kabupaten Banggai Kepulauan yaitu Kabupaten Banggai Laut berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 2013 dan dari Kabupaten Morowali yaitu Kabupaten Morowali Utara berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2013.	

PEMENUHAN PERSYARATAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TERAKHIR PADA DAERAH OTONOM BARU MENJADI PESERTA PEMILU TAHUN 2019
PROVINSI SULAWESI TENGAH
PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN)

NO.	PEMILU 2014					PEMILU 2019					KETERANGAN
	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	JML KAB/KOTA YANG DIAJUKAN	NAMA KAB/KOTA	STATUS	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	NAMA KAB/KOTA	STATUS		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	11	8	11	1 Kota Palu 2 Donggala 3 Poso 4 Morowali 5 Tojo Una-Una 6 Banggai 7 Banggai Kepulauan 8 Tolitoli 9 Buol 10 Sigi 11 Parigi Moutong	MS	13	10	1 Kota Palu 2 Donggala 3 Poso 4 Morowali 5 Tojo Una-Una 6 Banggai 7 Banggai Kepulauan 8 Tolitoli 9 Buol 10 Sigi 11 Parigi Moutong 12 Banggai Laut 13 Morowali Utara	MS	1 Tidak dilakukan verifikasi faktual karena masih memenuhi syarat sebaran kabupaten/kota yaitu 11 kabupaten/kota dari 10 kabupaten/kota batas minimum syarat sebaran setelah terbentuknya Kabupaten Banggai Laut dan Kabupaten Morowali Utara. 2 Terdapat 2 kabupaten pemekaran dari Kabupaten Banggai Kepulauan yaitu Kabupaten Banggai Laut berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 2013 dan dari Kabupaten Morowali yaitu Kabupaten Morowali Utara berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2013.	

PEMENUHAN PERSYARATAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TERAKHIR PADA DAERAH OTONOM BARU MENJADI PESERTA PEMILU TAHUN 2019
PROVINSI SULAWESI TENGAH
PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP)

NO.	PEMILU 2014					PEMILU 2019					KETERANGAN
	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	JML KAB/KOTA YANG DIAJUKAN	NAMA KAB/KOTA	STATUS	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	NAMA KAB/KOTA	STATUS		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	11	8	11	1 Kota Palu 2 Donggala 3 Poso 4 Morowali 5 Tojo Una-Una 6 Banggai 7 Banggai Kepulauan 8 Tolitoli 9 Buol 10 Sigi 11 Parigi Moutong	MS	13	10	1 Kota Palu 2 Donggala 3 Poso 4 Morowali 5 Tojo Una-Una 6 Banggai 7 Banggai Kepulauan 8 Tolitoli 9 Buol 10 Sigi 11 Parigi Moutong 12 Banggai Laut 13 Morowali Utara	MS	1 Tidak dilakukan verifikasi faktual karena masih memenuhi syarat sebaran kabupaten/kota yaitu 11 kabupaten/kota dari 10 kabupaten/kota batas minimum syarat sebaran setelah terbentuknya Kabupaten Banggai Laut dan Kabupaten Morowali Utara. 2 Terdapat 2 kabupaten pemekaran dari Kabupaten Banggai Kepulauan yaitu Kabupaten Banggai Laut berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 2013 dan dari Kabupaten Morowali yaitu Kabupaten Morowali Utara berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2013.	

PEMENUHAN PERSYARATAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TERAKHIR PADA DAERAH OTONOM BARU MENJADI PESERTA PEMILU TAHUN 2019
PROVINSI SULAWESI TENGAH
PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)

NO.	PEMILU 2014					PEMILU 2019					KETERANGAN
	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	JML KAB/KOTA YANG DIAJUKAN	NAMA KAB/KOTA	STATUS	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	NAMA KAB/KOTA	STATUS	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	11	8	11	1 Kota Palu 2 Donggala 3 Poso 4 Morowali 5 Tojo Una-Una 6 Banggai 7 Banggai Kepulauan 8 Tolitoli 9 Buol 10 Sigi 11 Parigi Moutong	MS	13	10	1 Kota Palu 2 Donggala 3 Poso 4 Morowali 5 Tojo Una-Una 6 Banggai 7 Banggai Kepulauan 8 Tolitoli 9 Buol 10 Sigi 11 Parigi Moutong 12 Banggai Laut 13 Morowali Utara	MS	1 Tidak dilakukan verifikasi faktual karena masih memenuhi syarat sebaran kabupaten/kota yaitu 11 kabupaten/kota dari 10 kabupaten/kota batas minimum syarat sebaran setelah terbentuknya Kabupaten Banggai Laut dan Kabupaten Morowali Utara. 2 Terdapat 2 kabupaten pemekaran dari Kabupaten Banggai Kepulauan yaitu Kabupaten Banggai Laut berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 2013 dan dari Kabupaten Morowali yaitu Kabupaten Morowali Utara berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2013.	

PEMENUHAN PERSYARATAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TERAKHIR PADA DAERAH OTONOM BARU MENJADI PESERTA PEMILU TAHUN 2019
PROVINSI SULAWESI TENGAH
PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDIP)

NO.	PEMILU 2014					PEMILU 2019					KETERANGAN
	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	JML KAB/KOTA YANG DIAJUKAN	NAMA KAB/KOTA	STATUS	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	NAMA KAB/KOTA	STATUS		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	11	8	11	1 Kota Palu 2 Donggala 3 Poso 4 Morowali 5 Tojo Una-Una 6 Banggai 7 Banggai Kepulauan 8 Tolitoli 9 Buol 10 Sigi 11 Parigi Moutong	MS	13	10	1 Kota Palu 2 Donggala 3 Poso 4 Morowali 5 Tojo Una-Una 6 Banggai 7 Banggai Kepulauan 8 Tolitoli 9 Buol 10 Sigi 11 Parigi Moutong 12 Banggai Laut 13 Morowali Utara	MS	1 Tidak dilakukan verifikasi faktual karena masih memenuhi syarat sebaran kabupaten/kota yaitu 11 kabupaten/kota dari 10 kabupaten/kota batas minimum syarat sebaran setelah terbentuknya Kabupaten Banggai Laut dan Kabupaten Morowali Utara. 2 Terdapat 2 kabupaten pemekaran dari Kabupaten Banggai Kepulauan yaitu Kabupaten Banggai Laut berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 2013 dan dari Kabupaten Morowali yaitu Kabupaten Morowali Utara berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2013.	

PEMENUHAN PERSYARATAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TERAKHIR PADA DAERAH OTONOM BARU MENJADI PESERTA PEMILU TAHUN 2019
PROVINSI SULAWESI TENGAH
PARTAI HATI NURANI RAKYAT (HANURA)

NO.	PEMILU 2014					PEMILU 2019					KETERANGAN
	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	JML KAB/KOTA YANG DIAJUKAN	NAMA KAB/KOTA	STATUS	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	NAMA KAB/KOTA	STATUS		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	11	8	11	1 Kota Palu 2 Donggala 3 Poso 4 Morowali 5 Tojo Una-Una 6 Banggai 7 Banggai Kepulauan 8 Tolitoli 9 Buol 10 Sigi 11 Parigi Moutong	MS	13	10	1 Kota Palu 2 Donggala 3 Poso 4 Morowali 5 Tojo Una-Una 6 Banggai 7 Banggai Kepulauan 8 Tolitoli 9 Buol 10 Sigi 11 Parigi Moutong 12 Banggai Laut 13 Morowali Utara	MS	1 Tidak dilakukan verifikasi faktual karena masih memenuhi syarat sebaran kabupaten/kota yaitu 11 kabupaten/kota dari 10 kabupaten/kota batas minimum syarat sebaran setelah terbentuknya Kabupaten Banggai Laut dan Kabupaten Morowali Utara. 2 Terdapat 2 kabupaten pemekaran dari Kabupaten Banggai Kepulauan yaitu Kabupaten Banggai Laut berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 2013 dan dari Kabupaten Morowali yaitu Kabupaten Morowali Utara berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2013.	

PEMENUHAN PERSYARATAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TERAKHIR PADA DAERAH OTONOM BARU MENJADI PESERTA PEMILU TAHUN 2019
PROVINSI SULAWESI TENGAH
PARTAI GOLONGAN KARYA (GOLKAR)

NO.	PEMILU 2014					PEMILU 2019					KETERANGAN
	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	JML KAB/KOTA YANG DIAJUKAN	NAMA KAB/KOTA	STATUS	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	NAMA KAB/KOTA	STATUS		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	11	8	11	1 Kota Palu 2 Donggala 3 Poso 4 Morowali 5 Tojo Una-Una 6 Banggai 7 Banggai Kepulauan 8 Tolitoli 9 Buol 10 Sigi 11 Parigi Moutong	MS	13	10	1 Kota Palu 2 Donggala 3 Poso 4 Morowali 5 Tojo Una-Una 6 Banggai 7 Banggai Kepulauan 8 Tolitoli 9 Buol 10 Sigi 11 Parigi Moutong 12 Banggai Laut 13 Morowali Utara	MS	1 Tidak dilakukan verifikasi faktual karena masih memenuhi syarat sebaran kabupaten/kota yaitu 11 kabupaten/kota dari 10 kabupaten/kota batas minimum syarat sebaran setelah terbentuknya Kabupaten Banggai Laut dan Kabupaten Morowali Utara. 2 Terdapat 2 kabupaten pemekaran dari Kabupaten Banggai Kepulauan yaitu Kabupaten Banggai Laut berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 2013 dan dari Kabupaten Morowali yaitu Kabupaten Morowali Utara berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2013.	

PEMENUHAN PERSYARATAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TERAKHIR PADA DAERAH OTONOM BARU MENJADI PESERTA PEMILU TAHUN 2019
PROVINSI SULAWESI TENGAH
PARTAI BULAN BINTANG (PBB)

NO.	PEMILU 2014					PEMILU 2019					KETERANGAN
	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	JML KAB/KOTA YANG DIAJUKAN	NAMA KAB/KOTA	STATUS	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	NAMA KAB/KOTA	STATUS		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	11	8	11	1 Kota Palu 2 Donggala 3 Poso 4 Morowali 5 Tojo Una-Una 6 Banggai 7 Banggai Kepulauan 8 Tolitoli 9 Buol 10 Sigi 11 Parigi Moutong	MS	13	10	1 Kota Palu 2 Donggala 3 Poso 4 Morowali 5 Tojo Una-Una 6 Banggai 7 Banggai Kepulauan 8 Tolitoli 9 Buol 10 Sigi 11 Parigi Moutong 12 Banggai Laut 13 Morowali Utara	MS	1 Tidak dilakukan verifikasi faktual karena masih memenuhi syarat sebaran kabupaten/kota yaitu 10 kabupaten/kota dari 10 kabupaten/kota batas minimum syarat sebaran setelah terbentuknya Kabupaten Banggai Laut dan Kabupaten Morowali Utara. 2 Terdapat 2 kabupaten pemekaran dari Kabupaten Banggai Kepulauan yaitu Kabupaten Banggai Laut berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 2013 dan dari Kabupaten Morowali yaitu Kabupaten Morowali Utara berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2013.	

PEMENUHAN PERSYARATAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TERAKHIR PADA DAERAH OTONOM BARU MENJADI PESERTA PEMILU TAHUN 2019
PROVINSI SULAWESI TENGAH
PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB)

NO.	PEMILU 2014					PEMILU 2019				KETERANGAN
	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	JML KAB/KOTA YANG DIAJUKAN	NAMA KAB/KOTA	STATUS	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	NAMA KAB/KOTA	STATUS	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	11	8	11	1 Kota Palu 2 Donggala 3 Poso 4 Morowali 5 Tojo Una-Una 6 Banggai 7 Banggai Kepulauan 8 Tolitoli 9 Buol 10 Sigi 11 Parigi Moutong	MS 	13	10	1 Kota Palu 2 Donggala 3 Poso 4 Morowali 5 Tojo Una-Una 6 Banggai 7 Banggai Kepulauan 8 Tolitoli 9 Buol 10 Sigi 11 Parigi Moutong 12 Banggai Laut 13 Morowali Utara	MS 	1 Tidak dilakukan verifikasi faktual karena masih memenuhi syarat sebaran kabupaten/kota yaitu 10 kabupaten/kota dari 10 kabupaten/kota batas minimum syarat sebaran setelah terbentuknya Kabupaten Banggai Laut dan Kabupaten Morowali Utara. 2 Terdapat 2 kabupaten pemekaran dari Kabupaten Banggai Kepulauan yaitu Kabupaten Banggai Laut berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 2013 dan dari Kabupaten Morowali yaitu Kabupaten Morowali Utara berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2013.

PEMENUHAN PERSYARATAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TERAKHIR PADA DAERAH OTONOM BARU MENJADI PESERTA PEMILU TAHUN 2019
PROVINSI SULAWESI TENGAH
PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA (PKPI)

NO.	PEMILU 2014					PEMILU 2019					KETERANGAN
	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	JML KAB/KOTA YANG DIAJUKAN	NAMA KAB/KOTA	STATUS	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	NAMA KAB/KOTA	STATUS	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	11	8	11	1 Kota Palu 2 Donggala 3 Poso 4 Morowali 5 Tojo Una-Una 6 Banggai 7 Banggai Kepulauan 8 Tolitoli 9 Buol 10 Sigi 11 Parigi Moutong	MS	13	10	1 Kota Palu 2 Donggala 3 Poso 4 Morowali 5 Tojo Una-Una 6 Banggai 7 Banggai Kepulauan 8 Tolitoli 9 Buol 10 Sigi 11 Parigi Moutong 12 Banggai Laut 13 Morowali Utara	MS	1 Tidak dilakukan verifikasi faktual karena masih memenuhi syarat sebaran kabupaten/kota yaitu 10 kabupaten/kota dari 10 kabupaten/kota batas minimum syarat sebaran setelah terbentuknya Kabupaten Banggai Laut dan Kabupaten Morowali Utara. 2 Terdapat 2 kabupaten pemekaran dari Kabupaten Banggai Kepulauan yaitu Kabupaten Banggai Laut berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 2013 dan dari Kabupaten Morowali yaitu Kabupaten Morowali Utara berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2013.	

Ditetapkan di Jakarta
 pada tanggal 11 Desember 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 REPUBLIK INDONESIA

ttd.

ARIEF BUDIMAN



LAMPIRAN VIII
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR : 227/PL.01.1-Kpt/03/KPU/XII/2017
 TENTANG KEDUDUKAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014
 PADA DAERAH OTONOM BARU DALAM PEMENUHAN PERSYARATAN PARTAI
 POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

PEMENUHAN PERSYARATAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TERAKHIR PADA DAERAH OTONOM BARU MENJADI PESERTA PEMILU TAHUN 2019
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PARTAI NASIONAL DEMOKRAT (NasDem)

NO.	PEMILU 2014					PEMILU 2019					KETERANGAN
	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	JML KAB/KOTA YANG DIAJUKAN	NAMA KAB/KOTA	STATUS	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	NAMA KAB/KOTA	STATUS		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	12	9	12	1 Kota Kendari 2 Konawe Selatan 3 Konawe 4 Konawe Utara 5 Kolaka 6 Kolaka Utara 7 Muna 8 Baubau 9 Buton 10 Buton Utara 11 Bombana 12 Wakatobi	MS	17	13	1 Kota Kendari 2 Konawe Selatan 3 Konawe 4 Konawe Utara 5 Kolaka 6 Kolaka Utara 7 Muna 8 Baubau 9 Buton 10 Buton Utara 11 Bombana 12 Wakatobi 13 Buton Selatan 14 Buton Tengah 15 Muna Barat 16 Konawe Kepulauan 17 Kolaka Timur	BMS	1 Dilakukan verifikasi faktual karena belum memenuhi syarat sebaran kabupaten/kota yaitu baru memiliki 12 kabupaten/kota dari 13 kabupaten/kota batas minimum syarat sebaran setelah terbentuknya Kabupaten Buton Selatan, Kabupaten Buton Tengah, Kabupaten Muna Barat, Kabupaten Konawe Kepulauan dan Kabupaten Kolaka Timur. 2 Terdapat 5 kabupaten pemekaran di Provinsi Sulawesi Tenggara : a. Dari Kabupaten Buton yaitu Kab. Buton Selatan (UU No. 16 Tahun 2014) dan Kabupaten Buton Tengah (UU Nomor 15 Tahun 2014). b. Dari Kabupaten Muna yaitu Kabupaten Munda Barat (UU Nomor 14 Tahun 2014). c. Dari Kabupaten Konawe yaitu Kabupaten Konawe Kepulauan (UU Nomor 13 Tahun 2013). d. Dari Kabupaten Kolaka yaitu Kabupaten Kolaka Timur (UU Nomor 8 Tahun 2013).	

PEMENUHAN PERSYARATAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TERAKHIR PADA DAERAH OTONOM BARU MENJADI PESERTA PEMILU TAHUN 2019
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PARTAI DEMOKRAT

NO.	PEMILU 2014					PEMILU 2019				KETERANGAN
	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	JML KAB/KOTA YANG DIAJUKAN	NAMA KAB/KOTA	STATUS	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	NAMA KAB/KOTA	STATUS	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	12	9	12	1 Kota Kendari 2 Konawe Selatan 3 Konawe 4 Konawe Utara 5 Kolaka 6 Kolaka Utara 7 Muna 8 Baubau 9 Buton 10 Buton Utara 11 Bombana 12 Wakatobi	MS	17	13	1 Kota Kendari 2 Konawe Selatan 3 Konawe 4 Konawe Utara 5 Kolaka 6 Kolaka Utara 7 Muna 8 Baubau 9 Buton 10 Buton Utara 11 Bombana 12 Wakatobi 13 Buton Selatan 14 Buton Tengah 15 Muna Barat 16 Konawe Kepulauan 17 Kolaka Timur	BMS	1 Dilakukan verifikasi faktual karena belum memenuhi syarat sebaran kabupaten/kota yaitu baru memiliki 12 kabupaten/kota dari 13 kabupaten/kota batas minimum syarat sebaran setelah terbentuknya Kabupaten Buton Selatan, Kabupaten Buton Tengah, Kabupaten Muna Barat, Kabupaten Konawe Kepulauan dan Kabupaten Kolaka Timur. 2 Terdapat 5 kabupaten pemekaran di Provinsi Sulawesi Tenggara : a. Dari Kabupaten Buton yaitu Kab. Buton Selatan (UU No. 16 Tahun 2014) dan Kabupaten Buton Tengah (UU Nomor 15 Tahun 2014). b. Dari Kabupaten Muna yaitu Kabupaten Munda Barat (UU Nomor 14 Tahun 2014). c. Dari Kabupaten Konawe yaitu Kabupaten Konawe Kepulauan (UU Nomor 13 Tahun 2013). d. Dari Kabupaten Kolaka yaitu Kabupaten Kolaka Timur (UU Nomor 8 Tahun 2013).

PEMENUHAN PERSYARATAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TERAKHIR PADA DAERAH OTONOM BARU MENJADI PESERTA PEMILU TAHUN 2019
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS)

NO.	PEMILU 2014					PEMILU 2019					KETERANGAN
	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	JML KAB/KOTA YANG DIAJUKAN	NAMA KAB/KOTA	STATUS	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	NAMA KAB/KOTA	STATUS		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	12	9	12	1 Kota Kendari 2 Konawe Selatan 3 Konawe 4 Konawe Utara 5 Kolaka 6 Kolaka Utara 7 Muna 8 Baubau 9 Buton 10 Buton Utara 11 Bombana 12 Wakatobi	MS	17	13	1 Kota Kendari 2 Konawe Selatan 3 Konawe 4 Konawe Utara 5 Kolaka 6 Kolaka Utara 7 Muna 8 Baubau 9 Buton 10 Buton Utara 11 Bombana 12 Wakatobi 13 Buton Selatan 14 Buton Tengah 15 Muna Barat 16 Konawe Kepulauan 17 Kolaka Timur	BMS	1 Dilakukan verifikasi faktual karena belum memenuhi syarat sebaran kabupaten/kota yaitu baru memiliki 12 kabupaten/kota dari 13 kabupaten/kota batas minimum syarat sebaran setelah terbentuknya Kabupaten Buton Selatan, Kabupaten Buton Tengah, Kabupaten Muna Barat, Kabupaten Konawe Kepulauan dan Kabupaten Kolaka Timur. 2 Terdapat 5 kabupaten pemekaran di Provinsi Sulawesi Tenggara : a. Dari Kabupaten Buton yaitu Kab. Buton Selatan (UU No. 16 Tahun 2014) dan Kabupaten Buton Tengah (UU Nomor 15 Tahun 2014). b. Dari Kabupaten Muna yaitu Kabupaten Munda Barat (UU Nomor 14 Tahun 2014). c. Dari Kabupaten Konawe yaitu Kabupaten Konawe Kepulauan (UU Nomor 13 Tahun 2013). d. Dari Kabupaten Kolaka yaitu Kabupaten Kolaka Timur (UU Nomor 8 Tahun 2013).	

PEMENUHAN PERSYARATAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TERAKHIR PADA DAERAH OTONOM BARU MENJADI PESERTA PEMILU TAHUN 2019
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN)

NO.	PEMILU 2014					PEMILU 2019				KETERANGAN
	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	JML KAB/KOTA YANG DIAJUKAN	NAMA KAB/KOTA	STATUS	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	NAMA KAB/KOTA	STATUS	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	12	9	12	1 Kota Kendari 2 Konawe Selatan 3 Konawe 4 Konawe Utara 5 Kolaka 6 Kolaka Utara 7 Muna 8 Baubau 9 Buton 10 Buton Utara 11 Bombana 12 Wakatobi	MS	17	13	1 Kota Kendari 2 Konawe Selatan 3 Konawe 4 Konawe Utara 5 Kolaka 6 Kolaka Utara 7 Muna 8 Baubau 9 Buton 10 Buton Utara 11 Bombana 12 Wakatobi 13 Buton Selatan 14 Buton Tengah 15 Muna Barat 16 Konawe Kepulauan 17 Kolaka Timur	BMS	1 Dilakukan verifikasi faktual karena belum memenuhi syarat sebaran kabupaten/kota yaitu baru memiliki 12 kabupaten/kota dari 13 kabupaten/kota batas minimum syarat sebaran setelah terbentuknya Kabupaten Buton Selatan, Kabupaten Buton Tengah, Kabupaten Muna Barat, Kabupaten Konawe Kepulauan dan Kabupaten Kolaka Timur. 2 Terdapat 5 kabupaten pemekaran di Provinsi Sulawesi Tenggara : a. Dari Kabupaten Buton yaitu Kab. Buton Selatan (UU No. 16 Tahun 2014) dan Kabupaten Buton Tengah (UU Nomor 15 Tahun 2014). b. Dari Kabupaten Muna yaitu Kabupaten Munda Barat (UU Nomor 14 Tahun 2014). c. Dari Kabupaten Konawe yaitu Kabupaten Konawe Kepulauan (UU Nomor 13 Tahun 2013). d. Dari Kabupaten Kolaka yaitu Kabupaten Kolaka Timur (UU Nomor 8 Tahun 2013).

PEMENUHAN PERSYARATAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TERAKHIR PADA DAERAH OTONOM BARU MENJADI PESERTA PEMILU TAHUN 2019
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP)

NO.	PEMILU 2014					PEMILU 2019					KETERANGAN
	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	JML KAB/KOTA YANG DIAJUKAN	NAMA KAB/KOTA	STATUS	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	NAMA KAB/KOTA	STATUS		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	12	9	12	1 Kota Kendari 2 Konawe Selatan 3 Konawe 4 Konawe Utara 5 Kolaka 6 Kolaka Utara 7 Muna 8 Baubau 9 Buton 10 Buton Utara 11 Bombana 12 Wakatobi	MS	17	13	1 Kota Kendari 2 Konawe Selatan 3 Konawe 4 Konawe Utara 5 Kolaka 6 Kolaka Utara 7 Muna 8 Baubau 9 Buton 10 Buton Utara 11 Bombana 12 Wakatobi 13 Buton Selatan 14 Buton Tengah 15 Muna Barat 16 Konawe Kepulauan 17 Kolaka Timur	BMS	1 Dilakukan verifikasi faktual karena belum memenuhi syarat sebaran kabupaten/kota yaitu baru memiliki 12 kabupaten/kota dari 13 kabupaten/kota batas minimum syarat sebaran setelah terbentuknya Kabupaten Buton Selatan, Kabupaten Buton Tengah, Kabupaten Muna Barat, Kabupaten Konawe Kepulauan dan Kabupaten Kolaka Timur. 2 Terdapat 5 kabupaten pemekaran di Provinsi Sulawesi Tenggara : a. Dari Kabupaten Buton yaitu Kab. Buton Selatan (UU No. 16 Tahun 2014) dan Kabupaten Buton Tengah (UU Nomor 15 Tahun 2014). b. Dari Kabupaten Muna yaitu Kabupaten Munda Barat (UU Nomor 14 Tahun 2014). c. Dari Kabupaten Konawe yaitu Kabupaten Konawe Kepulauan (UU Nomor 13 Tahun 2013). d. Dari Kabupaten Kolaka yaitu Kabupaten Kolaka Timur (UU Nomor 8 Tahun 2013).	

PEMENUHAN PERSYARATAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TERAKHIR PADA DAERAH OTONOM BARU MENJADI PESERTA PEMILU TAHUN 2019
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)

NO.	PEMILU 2014					PEMILU 2019					KETERANGAN
	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	JML KAB/KOTA YANG DIAJUKAN	NAMA KAB/KOTA	STATUS	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	NAMA KAB/KOTA	STATUS		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	12	9	12	1 Kota Kendari 2 Konawe Selatan 3 Konawe 4 Konawe Utara 5 Kolaka 6 Kolaka Utara 7 Muna 8 Baubau 9 Buton 10 Buton Utara 11 Bombana 12 Wakatobi	MS	17	13	1 Kota Kendari 2 Konawe Selatan 3 Konawe 4 Konawe Utara 5 Kolaka 6 Kolaka Utara 7 Muna 8 Baubau 9 Buton 10 Buton Utara 11 Bombana 12 Wakatobi 13 Buton Selatan 14 Buton Tengah 15 Muna Barat 16 Konawe Kepulauan 17 Kolaka Timur	BMS	1 Dilakukan verifikasi faktual karena belum memenuhi syarat sebaran kabupaten/kota yaitu baru memiliki 12 kabupaten/kota dari 13 kabupaten/kota batas minimum syarat sebaran setelah terbentuknya Kabupaten Buton Selatan, Kabupaten Buton Tengah, Kabupaten Muna Barat, Kabupaten Konawe Kepulauan dan Kabupaten Kolaka Timur. 2 Terdapat 5 kabupaten pemekaran di Provinsi Sulawesi Tenggara : a. Dari Kabupaten Buton yaitu Kab. Buton Selatan (UU No. 16 Tahun 2014) dan Kabupaten Buton Tengah (UU Nomor 15 Tahun 2014). b. Dari Kabupaten Muna yaitu Kabupaten Munda Barat (UU Nomor 14 Tahun 2014). c. Dari Kabupaten Konawe yaitu Kabupaten Konawe Kepulauan (UU Nomor 13 Tahun 2013). d. Dari Kabupaten Kolaka yaitu Kabupaten Kolaka Timur (UU Nomor 8 Tahun 2013).	

PEMENUHAN PERSYARATAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TERAKHIR PADA DAERAH OTONOM BARU MENJADI PESERTA PEMILU TAHUN 2019
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDIP)

NO.	PEMILU 2014					PEMILU 2019				KETERANGAN
	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	JML KAB/KOTA YANG DIAJUKAN	NAMA KAB/KOTA	STATUS	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	NAMA KAB/KOTA	STATUS	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	12	9	12	1 Kota Kendari 2 Konawe Selatan 3 Konawe 4 Konawe Utara 5 Kolaka 6 Kolaka Utara 7 Muna 8 Baubau 9 Buton 10 Buton Utara 11 Bombana 12 Wakatobi	MS	17	13	1 Kota Kendari 2 Konawe Selatan 3 Konawe 4 Konawe Utara 5 Kolaka 6 Kolaka Utara 7 Muna 8 Baubau 9 Buton 10 Buton Utara 11 Bombana 12 Wakatobi 13 Buton Selatan 14 Buton Tengah 15 Muna Barat 16 Konawe Kepulauan 17 Kolaka Timur	BMS	1 Dilakukan verifikasi faktual karena belum memenuhi syarat sebaran kabupaten/kota yaitu baru memiliki 12 kabupaten/kota dari 13 kabupaten/kota batas minimum syarat sebaran setelah terbentuknya Kabupaten Buton Selatan, Kabupaten Buton Tengah, Kabupaten Muna Barat, Kabupaten Konawe Kepulauan dan Kabupaten Kolaka Timur. 2 Terdapat 5 kabupaten pemekaran di Provinsi Sulawesi Tenggara : a. Dari Kabupaten Buton yaitu Kab. Buton Selatan (UU No. 16 Tahun 2014) dan Kabupaten Buton Tengah (UU Nomor 15 Tahun 2014). b. Dari Kabupaten Muna yaitu Kabupaten Munda Barat (UU Nomor 14 Tahun 2014). c. Dari Kabupaten Konawe yaitu Kabupaten Konawe Kepulauan (UU Nomor 13 Tahun 2013). d. Dari Kabupaten Kolaka yaitu Kabupaten Kolaka Timur (UU Nomor 8 Tahun 2013).

**PEMENUHAN PERSYARATAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TERAKHIR PADA DAERAH OTONOM BARU MENJADI PESERTA PEMILU TAHUN 2019
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PARTAI HATI NURANI RAKYAT (HANURA)**

PEMENUHAN PERSYARATAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TERAKHIR PADA DAERAH OTONOM BARU MENJADI PESERTA PEMILU TAHUN 2019
PROVINSI SULAWESI PAPUA TENGGARA
PARTAI GOLONGAN KARYA (GOLKAR)

NO.	PEMILU 2014					PEMILU 2019					KETERANGAN
	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	JML KAB/KOTA YANG DIAJUKAN	NAMA KAB/KOTA	STATUS	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	NAMA KAB/KOTA	STATUS		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	12	9	12	1 Kota Kendari 2 Konawe Selatan 3 Konawe 4 Konawe Utara 5 Kolaka 6 Kolaka Utara 7 Muna 8 Baubau 9 Buton 10 Buton Utara 11 Bombana 12 Wakatobi	MS	17	13	1 Kota Kendari 2 Konawe Selatan 3 Konawe 4 Konawe Utara 5 Kolaka 6 Kolaka Utara 7 Muna 8 Baubau 9 Buton 10 Buton Utara 11 Bombana 12 Wakatobi 13 Buton Selatan 14 Buton Tengah 15 Muna Barat 16 Konawe Kepulauan 17 Kolaka Timur	BMS	1 Dilakukan verifikasi faktual karena belum memenuhi syarat sebaran kabupaten/kota yaitu baru memiliki 12 kabupaten/kota dari 13 kabupaten/kota batas minimum syarat sebaran setelah terbentuknya Kabupaten Buton Selatan, Kabupaten Buton Tengah, Kabupaten Muna Barat, Kabupaten Konawe Kepulauan dan Kabupaten Kolaka Timur. 2 Terdapat 5 kabupaten pemekaran di Provinsi Sulawesi Tenggara : a. Dari Kabupaten Buton yaitu Kab. Buton Selatan (UU No. 16 Tahun 2014) dan Kabupaten Buton Tengah (UU Nomor 15 Tahun 2014). b. Dari Kabupaten Muna yaitu Kabupaten Munda Barat (UU Nomor 14 Tahun 2014). c. Dari Kabupaten Konawe yaitu Kabupaten Konawe Kepulauan (UU Nomor 13 Tahun 2013). d. Dari Kabupaten Kolaka yaitu Kabupaten Kolaka Timur (UU Nomor 8 Tahun 2013).	

PEMENUHAN PERSYARATAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TERAKHIR PADA DAERAH OTONOM BARU MENJADI PESERTA PEMILU TAHUN 2019
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PARTAI BULAN BINTANG (PBB)

NO.	PEMILU 2014					PEMILU 2019					KETERANGAN
	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	JML KAB/KOTA YANG DIAJUKAN	NAMA KAB/KOTA	STATUS	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	NAMA KAB/KOTA	STATUS		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	12	9	12		MS	17	13		BMS		
				1 Kota Kendari 2 Konawe Selatan 3 Konawe 4 Konawe Utara 5 Kolaka 6 Kolaka Utara 7 Muna 8 Baubau 9 Buton 10 Buton Utara 11 Bombana 12 Wakatobi	MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS			1 Kota Kendari 2 Konawe Selatan 3 Konawe 4 Konawe Utara 5 Kolaka 6 Kolaka Utara 7 Muna 8 Baubau 9 Buton 10 Buton Utara 11 Bombana 12 Wakatobi 13 Buton Selatan 14 Buton Tengah 15 Muna Barat 16 Konawe Kepulauan 17 Kolaka Timur	MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS	1 Dilakukan verifikasi faktual karena belum memenuhi syarat sebaran kabupaten/kota yaitu baru memiliki 12 kabupaten/kota dari 13 kabupaten/kota batas minimum syarat sebaran setelah terbentuknya Kabupaten Buton Selatan, Kabupaten Buton Tengah, Kabupaten Muna Barat, Kabupaten Konawe Kepulauan dan Kabupaten Kolaka Timur. 2 Terdapat 5 kabupaten pemekaran di Provinsi Sulawesi Tenggara : a. Dari Kabupaten Buton yaitu Kab. Buton Selatan (UU No. 16 Tahun 2014) dan Kabupaten Buton Tengah (UU Nomor 15 Tahun 2014). b. Dari Kabupaten Muna yaitu Kabupaten Munda Barat (UU Nomor 14 Tahun 2014). c. Dari Kabupaten Konawe yaitu Kabupaten Konawe Kepulauan (UU Nomor 13 Tahun 2013). d. Dari Kabupaten Kolaka yaitu Kabupaten Kolaka Timur (UU Nomor 8 Tahun 2013).	

PEMENUHAN PERSYARATAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TERAKHIR PADA DAERAH OTONOM BARU MENJADI PESERTA PEMILU TAHUN 2019
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB)

NO.	PEMILU 2014					PEMILU 2019				KETERANGAN
	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	JML KAB/KOTA YANG DIAJUKAN	NAMA KAB/KOTA	STATUS	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	NAMA KAB/KOTA	STATUS	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	12	9	12	1 Kota Kendari 2 Konawe Selatan 3 Konawe 4 Konawe Utara 5 Kolaka 6 Kolaka Utara 7 Muna 8 Baubau 9 Buton 10 Buton Utara 11 Bombana 12 Wakatobi	MS	17	13	1 Kota Kendari 2 Konawe Selatan 3 Konawe 4 Konawe Utara 5 Kolaka 6 Kolaka Utara 7 Muna 8 Baubau 9 Buton 10 Buton Utara 11 Bombana 12 Wakatobi 13 Buton Selatan 14 Buton Tengah 15 Muna Barat 16 Konawe Kepulauan 17 Kolaka Timur	BMS	1 Dilakukan verifikasi faktual karena belum memenuhi syarat sebaran kabupaten/kota baru memiliki 12 kabupaten/kota dari 13 kabupaten/kota batas minimum syarat sebaran setelah terbentuknya Kabupaten Buton Selatan, Kabupaten Buton Tengah, Kabupaten Muna Barat, Kabupaten Konawe Kepulauan dan Kabupaten Kolaka Timur. 2 Terdapat 5 kabupaten pemekaran di Provinsi Sulawesi Tenggara : a. Dari Kabupaten Buton yaitu Kab. Buton Selatan (UU No. 16 Tahun 2014) dan Kabupaten Buton Tengah (UU Nomor 15 Tahun 2014). b. Dari Kabupaten Muna yaitu Kabupaten Munda Barat (UU Nomor 14 Tahun 2014). c. Dari Kabupaten Konawe yaitu Kabupaten Konawe Kepulauan (UU Nomor 13 Tahun 2013). d. Dari Kabupaten Kolaka yaitu Kabupaten Kolaka Timur (UU Nomor 8 Tahun 2013).

PEMENUHAN PERSYARATAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TERAKHIR PADA DAERAH OTONOM BARU MENJADI PESERTA PEMILU TAHUN 2019
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA (PKPI)

NO.	PEMILU 2014					PEMILU 2019					KETERANGAN
	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	JML KAB/KOTA YANG DIAJUKAN	NAMA KAB/KOTA	STATUS	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	NAMA KAB/KOTA	STATUS	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	12	9	12	1 Kota Kendari 2 Konawe Selatan 3 Konawe 4 Konawe Utara 5 Kolaka 6 Kolaka Utara 7 Muna 8 Baubau 9 Buton 10 Buton Utara 11 Bombana 12 Wakatobi	MS	17	13	1 Kota Kendari 2 Konawe Selatan 3 Konawe 4 Konawe Utara 5 Kolaka 6 Kolaka Utara 7 Muna 8 Baubau 9 Buton 10 Buton Utara 11 Bombana 12 Wakatobi 13 Buton Selatan 14 Buton Tengah 15 Muna Barat 16 Konawe Kepulauan 17 Kolaka Timur	BMS	1 Dilakukan verifikasi faktual karena belum memenuhi syarat sebaran kabupaten/kota yaitu baru memiliki 10 kabupaten/kota dari 13 kabupaten/kota batas minimum syarat sebaran setelah terbentuknya Kabupaten Buton Selatan, Kabupaten Buton Tengah, Kabupaten Muna Barat, Kabupaten Konawe Kepulauan dan Kabupaten Kolaka Timur. 2 Terdapat 5 kabupaten pemekaran di Provinsi Sulawesi Tenggara : a. Dari Kabupaten Buton yaitu Kab. Buton Selatan (UU No. 16 Tahun 2014) dan Kabupaten Buton Tengah (UU Nomor 15 Tahun 2014). b. Dari Kabupaten Muna yaitu Kabupaten Muna Barat (UU Nomor 14 Tahun 2014). c. Dari Kabupaten Konawe yaitu Kabupaten Konawe Kepulauan (UU Nomor 13 Tahun 2013). d. Dari Kabupaten Kolaka yaitu Kabupaten Kolaka Timur (UU Nomor 8 Tahun 2013).	

Ditetapkan di Jakarta
 pada tanggal 11 Desember 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 REPUBLIK INDONESIA

ttd.

ARIEF BUDIMAN

Salinan sesuai aslinya
 SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM
 REPUBLIK INDONESIA
 Kepala Biro Hukum,

Sigit Joyowardono



LAMPIRAN IX
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR : 227/PL.01.1-Kpt/03/KPU/XII/2017
 TENTANG KEDUDUKAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN
 2014 PADA DAERAH OTONOM BARU DALAM PEMENUHAN PERSYARATAN
 PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

PEMENUHAN PERSYARATAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TERAKHIR PADA DAERAH OTONOM BARU MENJADI PESERTA PEMILU TAHUN 2019
PROVINSI MALUKU UTARA
PARTAI NASIONAL DEMOKRAT (NasDem)

NO.	PEMILU 2014					PEMILU 2019					KETERANGAN
	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	JML KAB/KOTA YANG DIAJUKAN	NAMA KAB/KOTA	STATUS	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	NAMA KAB/KOTA	STATUS		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	9	7	9	1 Kota Ternate 2 Kota Tidore Kepulauan 3 Halmahera Barat 4 Halmahera Utara 5 Halmahera Tengah 6 Halmahera Timur 7 Halmahera Selatan 8 Kepulauan Sula 9 Pulau Morotai	MS	10	8	1 Kota Ternate 2 Kota Tidore Kepulauan 3 Halmahera Barat 4 Halmahera Utara 5 Halmahera Tengah 6 Halmahera Timur 7 Halmahera Selatan 8 Kepulauan Sula 9 Pulau Morotai 10 Pulau Taliabu	MS	1 Tidak dilakukan verifikasi faktual karena masih memenuhi syarat sebaran kabupaten/kota yaitu 9 kabupaten/kota dari 8 kabupaten/kota batas minimum syarat sebaran setelah terbentuknya Kabupaten Pualu Taliabu. 2 Terdapat satu kabupaten pemekaran dari Kabupaten Kepulauan Sula yaitu Kabupaten Pulau Taliabu berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2013.	

PEMENUHAN PERSYARATAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TERAKHIR PADA DAERAH OTONOM BARU MENJADI PESERTA PEMILU TAHUN 2019
PROVINSI MALUKU UTARA
PARTAI DEMOKRAT

NO.	PEMILU 2014					PEMILU 2019				KETERANGAN	
	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	JML KAB/KOTA YANG DIAJUKAN	NAMA KAB/KOTA	STATUS	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	NAMA KAB/KOTA	STATUS		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	9	7	9	1 Kota Ternate 2 Kota Tidore Kepulauan 3 Halmahera Barat 4 Halmahera Utara 5 Halmahera Tengah 6 Halmahera Timur 7 Halmahera Selatan 8 Kepulauan Sula 9 Pulau Morotai	MS MS MS TMS MS MS MS MS MS MS 10 Pulau Taliabu	10	8	1 Kota Ternate 2 Kota Tidore Kepulauan 3 Halmahera Barat 4 Halmahera Utara 5 Halmahera Tengah 6 Halmahera Timur 7 Halmahera Selatan 8 Kepulauan Sula 9 Pulau Morotai 10 Pulau Taliabu	MS MS MS MS TMS MS MS MS MS MS 	MS	1 Tidak dilakukan verifikasi faktual karena masih memenuhi syarat sebaran kabupaten/kota yaitu 8 kabupaten/kota dari 8 kabupaten/kota batas minimum syarat sebaran setelah terbentuknya Kabupaten Pualu Taliabu. 2 Terdapat satu kabupaten pemekaran dari Kabupaten Kepulauan Sula yaitu Kabupaten Pulau Taliabu berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2013.

PEMENUHAN PERSYARATAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TERAKHIR PADA DAERAH OTONOM BARU MENJADI PESERTA PEMILU TAHUN 2019
PROVINSI MALUKU UTARA
PARTAI KEDILAN SEJAHTERA (PKS)

NO.	PEMILU 2014					PEMILU 2019					KETERANGAN
	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	JML KAB/KOTA YANG DIAJUKAN	NAMA KAB/KOTA	STATUS	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	NAMA KAB/KOTA	STATUS		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	9	7	9	1 Kota Ternate 2 Kota Tidore Kepulauan 3 Halmahera Barat 4 Halmahera Utara 5 Halmahera Tengah 6 Halmahera Timur 7 Halmahera Selatan 8 Kepulauan Sula 9 Pulau Morotai	MS MS MS TMS MS MS MS MS MS MS 10 Pulau Taliabu	10	8	1 Kota Ternate 2 Kota Tidore Kepulauan 3 Halmahera Barat 4 Halmahera Utara 5 Halmahera Tengah 6 Halmahera Timur 7 Halmahera Selatan 8 Kepulauan Sula 9 Pulau Morotai 10 Pulau Taliabu	MS MS MS MS TMS MS MS MS MS MS 	MS 1 Tidak dilakukan verifikasi faktual karena masih memenuhi syarat sebaran kabupaten/kota yaitu 8 kabupaten/kota yang MS dari 8 kabupaten/kota batas minimum syarat sebaran setelah terbentuknya Kabupaten Pualu Taliabu. 2 Terdapat satu kabupaten pemekaran dari Kabupaten Kepulauan Sula yaitu Kabupaten Pulau Taliabu berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2013.	

PEMENUHAN PERSYARATAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TERAKHIR PADA DAERAH OTONOM BARU MENJADI PESERTA PEMILU TAHUN 2019
PROVINSI MALUKU UTARA
PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN)

NO.	PEMILU 2014					PEMILU 2019				KETERANGAN
	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	JML KAB/KOTA YANG DIAJUKAN	NAMA KAB/KOTA	STATUS	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	NAMA KAB/KOTA	STATUS	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	9	7	9	1 Kota Ternate 2 Kota Tidore Kepulauan 3 Halmahera Barat 4 Halmahera Utara 5 Halmahera Tengah 6 Halmahera Timur 7 Halmahera Selatan 8 Kepulauan Sula 9 Pulau Morotai	MS	10	8	1 Kota Ternate 2 Kota Tidore Kepulauan 3 Halmahera Barat 4 Halmahera Utara 5 Halmahera Tengah 6 Halmahera Timur 7 Halmahera Selatan 8 Kepulauan Sula 9 Pulau Morotai 10 Pulau Taliabu	MS	1 Tidak dilakukan verifikasi faktual karena masih memenuhi syarat sebaran kabupaten/kota yaitu 9 kabupaten/kota dari 8 kabupaten/kota batas minimum syarat sebaran setelah terbentuknya Kabupaten Pulau Taliabu. 2 Terdapat satu kabupaten pemekaran dari Kabupaten Kepulauan Sula yaitu Kabupaten Pulau Taliabu berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2013.

PEMENUHAN PERSYARATAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TERAKHIR PADA DAERAH OTONOM BARU MENJADI PESERTA PEMILU TAHUN 2019
PROVINSI MALUKU UTARA
PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP)

NO.	PEMILU 2014					PEMILU 2019				KETERANGAN
	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	JML KAB/KOTA YANG DIAJUKAN	NAMA KAB/KOTA	STATUS	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	NAMA KAB/KOTA	STATUS	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	9	7	9	1 Kota Ternate 2 Kota Tidore Kepulauan 3 Halmahera Barat 4 Halmahera Utara 5 Halmahera Tengah 6 Halmahera Timur 7 Halmahera Selatan 8 Kepulauan Sula 9 Pulau Morotai	MS	10	8	1 Kota Ternate 2 Kota Tidore Kepulauan 3 Halmahera Barat 4 Halmahera Utara 5 Halmahera Tengah 6 Halmahera Timur 7 Halmahera Selatan 8 Kepulauan Sula 9 Pulau Morotai 10 Pulau Taliabu	MS	1 Tidak dilakukan verifikasi faktual karena masih memenuhi syarat sebaran kabupaten/kota yaitu 9 kabupaten/kota dari 8 kabupaten/kota batas minimum syarat sebaran setelah terbentuknya Kabupaten Pulau Taliabu. 2 Terdapat satu kabupaten pemekaran dari Kabupaten Kepulauan Sula yaitu Kabupaten Pulau Taliabu berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2013.

PEMENUHAN PERSYARATAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TERAKHIR PADA DAERAH OTONOM BARU MENJADI PESERTA PEMILU TAHUN 2019
PROVINSI MALUKU UTARA
PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)

NO.	PEMILU 2014					PEMILU 2019				KETERANGAN
	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	JML KAB/KOTA YANG DIAJUKAN	NAMA KAB/KOTA	STATUS	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	NAMA KAB/KOTA	STATUS	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	9	7	9	1 Kota Ternate 2 Kota Tidore Kepulauan 3 Halmahera Barat 4 Halmahera Utara 5 Halmahera Tengah 6 Halmahera Timur 7 Halmahera Selatan 8 Kepulauan Sula 9 Pulau Morotai	MS	10	8	1 Kota Ternate 2 Kota Tidore Kepulauan 3 Halmahera Barat 4 Halmahera Utara 5 Halmahera Tengah 6 Halmahera Timur 7 Halmahera Selatan 8 Kepulauan Sula 9 Pulau Morotai 10 Pulau Taliabu	MS	1 Tidak dilakukan verifikasi faktual karena masih memenuhi syarat sebaran kabupaten/kota yaitu 9 kabupaten/kota dari 8 kabupaten/kota batas minimum syarat sebaran setelah terbentuknya Kabupaten Pualu Taliabu. 2 Terdapat satu kabupaten pemekaran dari Kabupaten Kepulauan Sula yaitu Kabupaten Pulau Taliabu berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2013.

PEMENUHAN PERSYARATAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TERAKHIR PADA DAERAH OTONOM BARU MENJADI PESERTA PEMILU TAHUN 2019
PROVINSI MALUKU UTARA
PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDIP)

NO.	PEMILU 2014					PEMILU 2019				KETERANGAN
	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	JML KAB/KOTA YANG DIAJUKAN	NAMA KAB/KOTA	STATUS	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	NAMA KAB/KOTA	STATUS	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	9	7	9	1 Kota Ternate 2 Kota Tidore Kepulauan 3 Halmahera Barat 4 Halmahera Utara 5 Halmahera Tengah 6 Halmahera Timur 7 Halmahera Selatan 8 Kepulauan Sula 9 Pulau Morotai	MS	10	8	1 Kota Ternate 2 Kota Tidore Kepulauan 3 Halmahera Barat 4 Halmahera Utara 5 Halmahera Tengah 6 Halmahera Timur 7 Halmahera Selatan 8 Kepulauan Sula 9 Pulau Morotai 10 Pulau Taliabu	MS	1 Tidak dilakukan verifikasi faktual karena masih memenuhi syarat sebaran kabupaten/kota yaitu 9 kabupaten/kota dari 8 kabupaten/kota batas minimum syarat sebaran setelah terbentuknya Kabupaten Pualu Taliabu. 2 Terdapat satu kabupaten pemekaran dari Kabupaten Kepulauan Sula yaitu Kabupaten Pulau Taliabu berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2013.

PEMENUHAN PERSYARATAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TERAKHIR PADA DAERAH OTONOM BARU MENJADI PESERTA PEMILU TAHUN 2019
PROVINSI MALUKU UTARA
PARTAI HATI NURANI RAKYAT (HANURA)

NO.	PEMILU 2014					PEMILU 2019					KETERANGAN
	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	JML KAB/KOTA YANG DIAJUKAN	NAMA KAB/KOTA	STATUS	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	NAMA KAB/KOTA	STATUS		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	9	7	9	1 Kota Ternate 2 Kota Tidore Kepulauan 3 Halmahera Barat 4 Halmahera Utara 5 Halmahera Tengah 6 Halmahera Timur 7 Halmahera Selatan 8 Kepulauan Sula 9 Pulau Morotai	MS MS TMS MS MS MS MS MS MS	10	8	1 Kota Ternate 2 Kota Tidore Kepulauan 3 Halmahera Barat 4 Halmahera Utara 5 Halmahera Tengah 6 Halmahera Timur 7 Halmahera Selatan 8 Kepulauan Sula 9 Pulau Morotai 10 Pulau Taliabu	MS MS TMS MS MS MS MS MS MS	1 Tidak dilakukan verifikasi faktual karena masih memenuhi syarat sebaran kabupaten/kota yaitu 8 kabupaten/kota dari 8 kabupaten/kota batas minimum syarat sebaran setelah terbentuknya Kabupaten Pualu Taliabu. 2 Terdapat satu kabupaten pemekaran dari Kabupaten Kepulauan Sula yaitu Kabupaten Pulau Taliabu berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2013.	

PEMENUHAN PERSYARATAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TERAKHIR PADA DAERAH OTONOM BARU MENJADI PESERTA PEMILU TAHUN 2019
PROVINSI MALUKU UTARA
PARTAI GOLONGAN KARYA (GOLKAR)

NO.	PEMILU 2014					PEMILU 2019				KETERANGAN
	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	JML KAB/KOTA YANG DIAJUKAN	NAMA KAB/KOTA	STATUS	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	NAMA KAB/KOTA	STATUS	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	9	7	9	1 Kota Ternate 2 Kota Tidore Kepulauan 3 Halmahera Barat 4 Halmahera Utara 5 Halmahera Tengah 6 Halmahera Timur 7 Halmahera Selatan 8 Kepulauan Sula 9 Pulau Morotai	MS	10	8	1 Kota Ternate 2 Kota Tidore Kepulauan 3 Halmahera Barat 4 Halmahera Utara 5 Halmahera Tengah 6 Halmahera Timur 7 Halmahera Selatan 8 Kepulauan Sula 9 Pulau Morotai 10 Pulau Taliabu	MS	1 Tidak dilakukan verifikasi faktual karena masih memenuhi syarat sebaran kabupaten/kota yaitu 9 kabupaten/kota yang MS dari 8 kabupaten/kota batas minimum syarat sebaran setelah terbentuknya Kabupaten Pualu Taliabu. 2 Terdapat satu kabupaten pemekaran dari Kabupaten Kepulauan Sula yaitu Kabupaten Pulau Taliabu berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2013.

PEMENUHAN PERSYARATAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TERAKHIR PADA DAERAH OTONOM BARU MENJADI PESERTA PEMILU TAHUN 2019
PROVINSI MALUKU UTARA
PARTAI BULAN BINTANG (PBB)

NO.	PEMILU 2014					PEMILU 2019				KETERANGAN
	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	JML KAB/KOTA YANG DIAJUKAN	NAMA KAB/KOTA	STATUS	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	NAMA KAB/KOTA	STATUS	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	9	7	9	1 Kota Ternate 2 Kota Tidore Kepulauan 3 Halmahera Barat 4 Halmahera Utara 5 Halmahera Tengah 6 Halmahera Timur 7 Halmahera Selatan 8 Kepulauan Sula 9 Pulau Morotai	MS MS MS TMS MS MS MS MS MS MS MS 10 Pulau Taliabu	10 8	1 Kota Ternate 2 Kota Tidore Kepulauan 3 Halmahera Barat 4 Halmahera Utara 5 Halmahera Tengah 6 Halmahera Timur 7 Halmahera Selatan 8 Kepulauan Sula 9 Pulau Morotai 10 Pulau Taliabu	MS MS MS TMS MS MS MS MS MS MS MS MS 10 Pulau Taliabu	MS MS MS TMS MS MS MS MS MS 10 Pulau Taliabu	1 Tidak dilakukan verifikasi faktual karena masih memenuhi syarat sebaran kabupaten/kota yaitu 8 kabupaten/kota yang MS dari 8 kabupaten/kota batas minimum syarat sebaran setelah terbentuknya Kabupaten Pulau Taliabu. 2 Terdapat satu kabupaten pemekaran dari Kabupaten Kepulauan Sula yaitu Kabupaten Pulau Taliabu berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2013.

PEMENUHAN PERSYARATAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TERAKHIR PADA DAERAH OTONOM BARU MENJADI PESERTA PEMILU TAHUN 2019
PROVINSI MALUKU UTARA
PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB)

NO.	PEMILU 2014					PEMILU 2019				KETERANGAN
	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	JML KAB/KOTA YANG DIAJUKAN	NAMA KAB/KOTA	STATUS	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	NAMA KAB/KOTA	STATUS	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	9	7	9	1 Kota Ternate 2 Kota Tidore Kepulauan 3 Halmahera Barat 4 Halmahera Utara 5 Halmahera Tengah 6 Halmahera Timur 7 Halmahera Selatan 8 Kepulauan Sula 9 Pulau Morotai	MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS	10	8	1 Kota Ternate 2 Kota Tidore Kepulauan 3 Halmahera Barat 4 Halmahera Utara 5 Halmahera Tengah 6 Halmahera Timur 7 Halmahera Selatan 8 Kepulauan Sula 9 Pulau Morotai 10 Pulau Taliabu	MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS	1 Tidak dilakukan verifikasi faktual karena masih memenuhi syarat sebaran kabupaten/kota yaitu 9 kabupaten/kota yang MS dari 8 kabupaten/kota batas minimum syarat sebaran setelah terbentuknya Kabupaten Pualu Taliabu. 2 Terdapat satu kabupaten pemekaran dari Kabupaten Kepulauan Sula yaitu Kabupaten Pulau Taliabu berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2013.

PEMENUHAN PERSYARATAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TERAKHIR PADA DAERAH OTONOM BARU MENJADI PESERTA PEMILU TAHUN 2019
PROVINSI MALUKU UTARA
PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA (PKPI)

NO.	PEMILU 2014					PEMILU 2019					KETERANGAN
	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	JML KAB/KOTA YANG DIAJUKAN	NAMA KAB/KOTA	STATUS	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	NAMA KAB/KOTA	STATUS	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	9	7	9	1 Kota Ternate 2 Kota Tidore Kepulauan 3 Halmahera Barat 4 Halmahera Utara 5 Halmahera Tengah 6 Halmahera Timur 7 Halmahera Selatan 8 Kepulauan Sula 9 Pulau Morotai	MS	10	8	1 Kota Ternate 2 Kota Tidore Kepulauan 3 Halmahera Barat 4 Halmahera Utara 5 Halmahera Tengah 6 Halmahera Timur 7 Halmahera Selatan 8 Kepulauan Sula 9 Pulau Morotai 10 Pulau Taliabu	BMS	1 Dilakukan verifikasi faktual karena belum memenuhi syarat sebaran kabupaten/kota yaitu baru memiliki 7 kabupaten/kota yang MS dari 8 kabupaten/kota batas minimum syarat sebaran setelah terbentuknya Kabupaten Pualu Taliabu. 2 Terdapat satu kabupaten pemekaran dari Kabupaten Kepulauan Sula yaitu Kabupaten Pulau Taliabu berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2013.	

Ditetapkan di Jakarta
 pada tanggal 11 Desember 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 REPUBLIK INDONESIA

ttd.

ARIEF BUDIMAN

Sahnan sesuai aslinya
 SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM
 REPUBLIK INDONESIA

Kepala Biro Hukum,

Sigit Joyowardono



LAMPIRAN X
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR : 227/PL.01.1-Kpt/03/KPU/XII/2017
 TENTANG KEDUDUKAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM
 TAHUN 2014 PADA DAERAH OTONOM BARU DALAM PEMENUHAN
 PERSYARATAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

PEMENUHAN PERSYARATAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TERAKHIR PADA DAERAH OTONOM BARU MENJADI PESERTA PEMILU TAHUN 2019
PROVINSI PAPUA BARAT
PARTAI NASIONAL DEMOKRAT (NasDem)

NO.	PEMILU 2014					PEMILU 2019					KETERANGAN
	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	JML KAB/KOTA YANG DIAJUKAN	NAMA KAB/KOTA	STATUS	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	NAMA KAB/KOTA	STATUS		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	11	8	11	1 Teluk Bintuni 2 Fak-Fak 3 Kaimana 4 Sorong 5 Manokwari 6 Maybrat 7 Raja Ampat 8 Sorong Selatan 9 Sorong 10 Tambrauw 11 Teluk Wondama	MS	13	10	1 Teluk Bintuni 2 Fak-Fak 3 Kaimana 4 Sorong 5 Manokwari 6 Maybrat 7 Raja Ampat 8 Sorong Selatan 9 Sorong 10 Tambrauw 11 Teluk Wondama 12 Manokwari Selatan 13 Pegunungan Arfak	MS	1 Tidak dilakukan verifikasi faktual karena masih memenuhi syarat sebaran kabupaten/kota yaitu 11 kabupaten/kota dari 10 kabupaten/kota batas minimum syarat sebaran setelah terbentuknya Kabupaten Manokwari Selatan dan Kabupaten Pegunungan Arfak. 2 Terdapat 2 kabupaten pemekaran dari Kabupaten Manokwari yaitu Kabupaten Manokwari Selatan dan Kabupaten Pegunungan Arfak berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2012 dan UU Nomor 24 Tahun 2012 .	

PEMENUHAN PERSYARATAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TERAKHIR PADA DAERAH OTONOM BARU MENJADI PESERTA PEMILU TAHUN 2019
PROVINSI PAPUA BARAT
PARTAI DEMOKRAT

NO.	PEMILU 2014					PEMILU 2019					KETERANGAN
	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	JML KAB/KOTA YANG DIAJUKAN	NAMA KAB/KOTA	STATUS	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	NAMA KAB/KOTA	STATUS		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	11	8	11	1 Teluk Bintuni 2 Fak-Fak 3 Kaimana 4 Sorong 5 Manokwari 6 Maybrat 7 Raja Ampat 8 Sorong Selatan 9 Sorong 10 Tambrauw 11 Teluk Wondama	MS	13	10	1 Teluk Bintuni 2 Fak-Fak 3 Kaimana 4 Sorong 5 Manokwari 6 Maybrat 7 Raja Ampat 8 Sorong Selatan 9 Sorong 10 Tambrauw 11 Teluk Wondama 12 Manokwari Selatan 13 Pegunungan Arfak	MS	1 Tidak dilakukan verifikasi faktual karena masih memenuhi syarat sebaran kabupaten/kota yaitu 11 kabupaten/kota dari 10 kabupaten/kota batas minimum syarat sebaran setelah terbentuknya Kabupaten Manokwari Selatan dan Kabupaten Pegunungan Arfak. 2 Terdapat 2 kabupaten pemekaran dari Kabupaten Manokwari yaitu Kabupaten Manokwari Selatan dan Kabupaten Pegunungan Arfak berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2012 dan UU Nomor 24 Tahun 2012 .	

PEMENUHAN PERSYARATAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TERAKHIR PADA DAERAH OTONOM BARU MENJADI PESERTA PEMILU TAHUN 2019
PROVINSI PAPUA BARAT
PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS)

NO.	PEMILU 2014					PEMILU 2019					KETERANGAN
	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	JML KAB/KOTA YANG DIAJUKAN	NAMA KAB/KOTA	STATUS	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	NAMA KAB/KOTA	STATUS	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	11	8	11	1 Teluk Bintuni 2 Fak-Fak 3 Kaimana 4 Sorong 5 Manokwari 6 Maybrat 7 Raja Ampat 8 Sorong Selatan 9 Sorong 10 Tambrauw 11 Teluk Wondama	MS	13	10	1 Teluk Bintuni 2 Fak-Fak 3 Kaimana 4 Sorong 5 Manokwari 6 Maybrat 7 Raja Ampat 8 Sorong Selatan 9 Sorong 10 Tambrauw 11 Teluk Wondama 12 Manokwari Selatan 13 Pegunungan Arfak	MS	1 Tidak dilakukan verifikasi faktual karena masih memenuhi syarat sebaran kabupaten/kota yaitu 11 kabupaten/kota dari 10 kabupaten/kota batas minimum syarat sebaran setelah terbentuknya Kabupaten Manokwari Selatan dan Kabupaten Pegunungan Arfak. 2 Terdapat 2 kabupaten pemekaran dari Kabupaten Manokwari yaitu Kabupaten Manokwari Selatan dan Kabupaten Pegunungan Arfak berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2012 dan UU Nomor 24 Tahun 2012.	

PEMENUHAN PERSYARATAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TERAKHIR PADA DAERAH OTONOM BARU MENJADI PESERTA PEMILU TAHUN 2019
PROVINSI PAPUA BARAT
PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN)

NO.	PEMILU 2014					PEMILU 2019					KETERANGAN
	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	JML KAB/KOTA YANG DIAJUKAN	NAMA KAB/KOTA	STATUS	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	NAMA KAB/KOTA	STATUS		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	11	8	11	1 Teluk Bintuni 2 Fak-Fak 3 Kaimana 4 Sorong 5 Manokwari 6 Maybrat 7 Raja Ampat 8 Sorong Selatan 9 Sorong 10 Tambrauw 11 Teluk Wondama	MS	13	10	1 Teluk Bintuni 2 Fak-Fak 3 Kaimana 4 Sorong 5 Manokwari 6 Maybrat 7 Raja Ampat 8 Sorong Selatan 9 Sorong 10 Tambrauw 11 Teluk Wondama 12 Manokwari Selatan 13 Pegunungan Arfak	MS	1 Tidak dilakukan verifikasi faktual karena masih memenuhi syarat sebaran kabupaten/kota yaitu 11 kabupaten/kota dari 10 kabupaten/kota batas minimum syarat sebaran setelah terbentuknya Kabupaten Manokwari Selatan dan Kabupaten Pegunungan Arfak. 2 Terdapat 2 kabupaten pemekaran dari Kabupaten Manokwari yaitu Kabupaten Manokwari Selatan dan Kabupaten Pegunungan Arfak berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2012 dan UU Nomor 24 Tahun 2012 .	

PEMENUHAN PERSYARATAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TERAKHIR PADA DAERAH OTONOM BARU MENJADI PESERTA PEMILU TAHUN 2019
PROVINSI PAPUA BARAT
PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP)

NO.	PEMILU 2014					PEMILU 2019					KETERANGAN
	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	JML KAB/KOTA YANG DIAJUKAN	NAMA KAB/KOTA	STATUS	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	NAMA KAB/KOTA	STATUS		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	11	8	11	1 Teluk Bintuni 2 Fak-Fak 3 Kaimana 4 Sorong 5 Manokwari 6 Maybrat 7 Raja Ampat 8 Sorong Selatan 9 Sorong 10 Tambrauw 11 Teluk Wondama	MS	13	10	1 Teluk Bintuni 2 Fak-Fak 3 Kaimana 4 Sorong 5 Manokwari 6 Maybrat 7 Raja Ampat 8 Sorong Selatan 9 Sorong 10 Tambrauw 11 Teluk Wondama 12 Manokwari Selatan 13 Pegunungan Arfak	MS	1 Tidak dilakukan verifikasi faktual karena masih memenuhi syarat sebaran kabupaten/kota yaitu 11 kabupaten/kota dari 10 kabupaten/kota batas minimum syarat sebaran setelah terbentuknya Kabupaten Manokwari Selatan dan Kabupaten Pegunungan Arfak. 2 Terdapat 2 kabupaten pemekaran dari Kabupaten Manokwari yaitu Kabupaten Manokwari Selatan dan Kabupaten Pegunungan Arfak berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2012 dan UU Nomor 24 Tahun 2012.	

PEMENUHAN PERSYARATAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TERAKHIR PADA DAERAH OTONOM BARU MENJADI PESERTA PEMILU TAHUN 2019
PROVINSI PAPUA BARAT
PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)

NO.	PEMILU 2014					PEMILU 2019					KETERANGAN
	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	JML KAB/KOTA YANG DIAJUKAN	NAMA KAB/KOTA	STATUS	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	NAMA KAB/KOTA	STATUS	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	11	8	11	1 Teluk Bintuni 2 Fak-Fak 3 Kaimana 4 Sorong 5 Manokwari 6 Maybrat 7 Raja Ampat 8 Sorong Selatan 9 Sorong 10 Tambrauw 11 Teluk Wondama	MS	13	10	1 Teluk Bintuni 2 Fak-Fak 3 Kaimana 4 Sorong 5 Manokwari 6 Maybrat 7 Raja Ampat 8 Sorong Selatan 9 Sorong 10 Tambrauw 11 Teluk Wondama 12 Manokwari Selatan 13 Pegunungan Arfak	MS	1 Tidak dilakukan verifikasi faktual karena masih memenuhi syarat sebaran kabupaten/kota yaitu 11 kabupaten/kota dari 10 kabupaten/kota batas minimum syarat sebaran setelah terbentuknya Kabupaten Manokwari Selatan dan Kabupaten Pegunungan Arfak. 2 Terdapat 2 kabupaten pemekaran dari Kabupaten Manokwari yaitu Kabupaten Manokwari Selatan dan Kabupaten Pegunungan Arfak berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2012 dan UU Nomor 24 Tahun 2012 .	

PEMENUHAN PERSYARATAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TERAKHIR PADA DAERAH OTONOM BARU MENJADI PESERTA PEMILU TAHUN 2019
PROVINSI PAPUA BARAT
PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDIP)

NO.	PEMILU 2014					PEMILU 2019					KETERANGAN
	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	JML KAB/KOTA YANG DIAJUKAN	NAMA KAB/KOTA	STATUS	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	NAMA KAB/KOTA	STATUS		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	11	8	11	1 Teluk Bintuni 2 Fak-Fak 3 Kaimana 4 Sorong 5 Manokwari 6 Maybrat 7 Raja Ampat 8 Sorong Selatan 9 Sorong 10 Tambrauw 11 Teluk Wondama	MS	13	10	1 Teluk Bintuni 2 Fak-Fak 3 Kaimana 4 Sorong 5 Manokwari 6 Maybrat 7 Raja Ampat 8 Sorong Selatan 9 Sorong 10 Tambrauw 11 Teluk Wondama 12 Manokwari Selatan 13 Pegunungan Arfak	MS	1 Tidak dilakukan verifikasi faktual karena masih memenuhi syarat sebaran kabupaten/kota yaitu 11 kabupaten/kota dari 10 kabupaten/kota batas minimum syarat sebaran setelah terbentuknya Kabupaten Manokwari Selatan dan Kabupaten Pegunungan Arfak. 2 Terdapat 2 kabupaten pemekaran dari Kabupaten Manokwari yaitu Kabupaten Manokwari Selatan dan Kabupaten Pegunungan Arfak berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2012 dan UU Nomor 24 Tahun 2012 .	

PEMENUHAN PERSYARATAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TERAKHIR PADA DAERAH OTONOM BARU MENJADI PESERTA PEMILU TAHUN 2019
PROVINSI PAPUA BARAT
PARTAI HATI NURANI RAKYAT (HANURA)

NO.	PEMILU 2014					PEMILU 2019					KETERANGAN
	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	JML KAB/KOTA YANG DIAJUKAN	NAMA KAB/KOTA	STATUS	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	NAMA KAB/KOTA	STATUS		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	11	8	11	1 Teluk Bintuni 2 Fak-Fak 3 Kaimana 4 Sorong 5 Manokwari 6 Maybrat 7 Raja Ampat 8 Sorong Selatan 9 Sorong 10 Tambrauw 11 Teluk Wondama	MS	13	10	1 Teluk Bintuni 2 Fak-Fak 3 Kaimana 4 Sorong 5 Manokwari 6 Maybrat 7 Raja Ampat 8 Sorong Selatan 9 Sorong 10 Tambrauw 11 Teluk Wondama 12 Manokwari Selatan 13 Pegunungan Arfak	MS	1 Tidak dilakukan verifikasi faktual karena masih memenuhi syarat sebaran kabupaten/kota yaitu 11 kabupaten/kota dari 10 kabupaten/kota batas minimum syarat sebaran setelah terbentuknya Kabupaten Manokwari Selatan dan Kabupaten Pegunungan Arfak. 2 Terdapat 2 kabupaten pemekaran dari Kabupaten Manokwari yaitu Kabupaten Manokwari Selatan dan Kabupaten Pegunungan Arfak berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2012 dan UU Nomor 24 Tahun 2012 .	

PEMENUHAN PERSYARATAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TERAKHIR PADA DAERAH OTONOM BARU MENJADI PESERTA PEMILU TAHUN 2019
PROVINSI PAPUA BARAT
PARTAI GOLONGAN KARYA (GOLKAR)

NO.	PEMILU 2014					PEMILU 2019					KETERANGAN
	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	JML KAB/KOTA YANG DIAJUKAN	NAMA KAB/KOTA	STATUS	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	NAMA KAB/KOTA	STATUS		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	11	8	11	1 Teluk Bintuni 2 Fak-Fak 3 Kaimana 4 Sorong 5 Manokwari 6 Maybrat 7 Raja Ampat 8 Sorong Selatan 9 Sorong 10 Tambrauw 11 Teluk Wondama	MS	13	10	1 Teluk Bintuni 2 Fak-Fak 3 Kaimana 4 Sorong 5 Manokwari 6 Maybrat 7 Raja Ampat 8 Sorong Selatan 9 Sorong 10 Tambrauw 11 Teluk Wondama 12 Manokwari Selatan 13 Pegunungan Arfak	MS	1 Tidak dilakukan verifikasi faktual karena masih memenuhi syarat sebaran kabupaten/kota yaitu 11 kabupaten/kota dari 10 kabupaten/kota batas minimum syarat sebaran setelah terbentuknya Kabupaten Manokwari Selatan dan Kabupaten Pegunungan Arfak. 2 Terdapat 2 kabupaten pemekaran dari Kabupaten Manokwari yaitu Kabupaten Manokwari Selatan dan Kabupaten Pegunungan Arfak berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2012 dan UU Nomor 24 Tahun 2012 .	

PEMENUHAN PERSYARATAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TERAKHIR PADA DAERAH OTONOM BARU MENJADI PESERTA PEMILU TAHUN 2019
PROVINSI PAPUA BARAT
PARTAI BULAN BINTANG (PBB)

NO.	PEMILU 2014					PEMILU 2019					KETERANGAN
	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	JML KAB/KOTA YANG DIAJUKAN	NAMA KAB/KOTA	STATUS	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	NAMA KAB/KOTA	STATUS		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	11	8	11	1 Teluk Bintuni 2 Fak-Fak 3 Kaimana 4 Sorong 5 Manokwari 6 Maybrat 7 Raja Ampat 8 Sorong Selatan 9 Sorong 10 Tambrauw 11 Teluk Wondama	MS	13	10	1 Teluk Bintuni 2 Fak-Fak 3 Kaimana 4 Sorong 5 Manokwari 6 Maybrat 7 Raja Ampat 8 Sorong Selatan 9 Sorong 10 Tambrauw 11 Teluk Wondama 12 Manokwari Selatan 13 Pegunungan Arfak	MS	1 Tidak dilakukan verifikasi faktual karena masih memenuhi syarat sebaran kabupaten/kota yaitu 11 kabupaten/kota dari 10 kabupaten/kota batas minimum syarat sebaran setelah terbentuknya Kabupaten Manokwari Selatan dan Kabupaten Pegunungan Arfak. 2 Terdapat 2 kabupaten pemekaran dari Kabupaten Manokwari yaitu Kabupaten Manokwari Selatan dan Kabupaten Pegunungan Arfak berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2012 dan UU Nomor 24 Tahun 2012 .	

PEMENUHAN PERSYARATAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TERAKHIR PADA DAERAH OTONOM BARU MENJADI PESERTA PEMILU TAHUN 2019
PROVINSI PAPUA BARAT
PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB)

NO.	PEMILU 2014					PEMILU 2019				KETERANGAN
	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	JML KAB/KOTA YANG DIAJUKAN	NAMA KAB/KOTA	STATUS	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	NAMA KAB/KOTA	STATUS	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	11	8	11	1 Teluk Bintuni 2 Fak-Fak 3 Kaimana 4 Sorong 5 Manokwari 6 Maybrat 7 Raja Ampat 8 Sorong Selatan 9 Sorong 10 Tambrauw 11 Teluk Wondama	MS	13	10	1 Teluk Bintuni 2 Fak-Fak 3 Kaimana 4 Sorong 5 Manokwari 6 Maybrat 7 Raja Ampat 8 Sorong Selatan 9 Sorong 10 Tambrauw 11 Teluk Wondama 12 Manokwari Selatan 13 Pegunungan Arfak	MS	1 Tidak dilakukan verifikasi faktual karena masih memenuhi syarat sebaran kabupaten/kota yaitu 11 kabupaten/kota dari 10 kabupaten/kota batas minimum syarat sebaran setelah terbentuknya Kabupaten Manokwari Selatan dan Kabupaten Pegunungan Arfak. 2 Terdapat 2 kabupaten pemekaran dari Kabupaten Manokwari yaitu Kabupaten Manokwari Selatan dan Kabupaten Pegunungan Arfak berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2012 dan UU Nomor 24 Tahun 2012 .

PEMENUHAN PERSYARATAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TERAKHIR PADA DAERAH OTONOM BARU MENJADI PESERTA PEMILU TAHUN 2019
PROVINSI PAPUA BARAT
PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA (PKPI)

NO.	PEMILU 2014					PEMILU 2019					KETERANGAN
	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	JML KAB/KOTA YANG DIAJUKAN	NAMA KAB/KOTA	STATUS	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	NAMA KAB/KOTA	STATUS		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	11	8	11	1 Teluk Bintuni 2 Fak-Fak 3 Kaimana 4 Sorong 5 Manokwari 6 Maybrat 7 Raja Ampat 8 Sorong Selatan 9 Sorong 10 Tambrauw 11 Teluk Wondama	MS	13	10	1 Teluk Bintuni 2 Fak-Fak 3 Kaimana 4 Sorong 5 Manokwari 6 Maybrat 7 Raja Ampat 8 Sorong Selatan 9 Sorong 10 Tambrauw 11 Teluk Wondama 12 Manokwari Selatan 13 Pegunungan Arfak	MS	1 Tidak dilakukan verifikasi faktual karena masih memenuhi syarat sebaran kabupaten/kota yaitu 11 kabupaten/kota dari 10 kabupaten/kota batas minimum syarat sebaran setelah terbentuknya Kabupaten Manokwari Selatan dan Kabupaten Pegunungan Arfak. 2 Terdapat 2 kabupaten pemekaran dari Kabupaten Manokwari yaitu Kabupaten Manokwari Selatan dan Kabupaten Pegunungan Arfak berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2012 dan UU Nomor 24 Tahun 2012.	

Ditetapkan di Jakarta
 pada tanggal 11 Desember 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 REPUBLIK INDONESIA

ttd.

ARIEF BUDIMAN

Salinan sesuai aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM
 REPUBLIK INDONESIA

Kepala Biro Hukum,

Sigit Joyowardono

